

Akses Setara

Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas
dalam Proses Pemilu dan Politik





Manual ini dibuat untuk ulasan oleh United States Agency for International Development (US- AID) dan disiapkan oleh International Foundation for Electoral Systems dan National Democratic Institute. Pendapat penulis yang diutarakan dalam publikasi ini tidak mewakili pendapat USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

Akses Setara

**Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas
dalam Proses Pemilu dan Politik**





Akses Setara: Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik

© 2014 oleh IFES. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Pernyataan Izin: Dilarang mereproduksi bagian manapun dari publikasi ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk fotokopi, rekaman, atau sistem penyimpanan dan pengambilan informasi apapun tanpa izin tertulis dari IFES

Permintaan izin harus mencantumkan informasi berikut:

- Deskripsi material yang ingin dibuat salinannya.
- Tujuan penggunaan material yang disalin dan cara penggunaannya.
- Nama, jabatan, nama perusahaan atau organisasi, nomor telepon, nomor fax, alamat e-mail, dan alamat surat.

Mohon kirimkan semua permintaan izin ke:

International Foundation for Electoral Systems

1850 K Street, NW, Fifth Floor

Washington, D.C. 20006

E-mail: editor@ifes.org

Fax: 202.350.6701

Foto sampul oleh Tsheten Dorji, Bhutan.

Foto pada halaman 22, 28, 50 (atas dan bawah) adalah milik NDI.

Semua foto lainnya adalah milik IFES.

Bagian mudah dibaca disiapkan oleh Grainne de Paor, Down Syndrome Ireland.

Publikasi ini didedikasikan untuk YUSDIANA, seorang duta besar bagi komunitas disabilitas. Upayanya yang tak kunjung lelah adalah inspirasi abadi bagi rekan-rekannya di Asia Tenggara dan seluruh dunia.

Tentang IFES dan NDI

International Foundation for Electoral Systems

International Foundation for Electoral Systems (IFES) mendukung hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. Keahlian independen kami memperkuat sistem pemilu dan membangun kapasitas lokal untuk menghasilkan solusi yang berkelanjutan.

Sebagai pemimpin global dalam mempromosikan demokrasi, kami memajukan pemerintahan yang baik dan hak-hak demokratis dengan:

- Menyediakan bantuan teknis bagi pejabat pemilu
- Memberdayakan pihak yang kurang terwakili untuk berpartisipasi dalam proses politik
- Menerapkan riset berbasis lapangan untuk meningkatkan siklus pemilu

IFES memiliki pengalaman ekstensif dalam memimpin inisiatif di seluruh dunia yang mempromosikan pemberdayaan politik dan pemilu dari orang-orang dengan disabilitas. IFES bekerja sama dengan berbagai organisasi orang-orang dengan disabilitas, dan juga organisasi masyarakat dan pemerintah. Hal ini termasuk menggunakan keahliannya di alat-alat global seperti www.ElectionAccess.org

Sejak 1987, IFES telah bekerja di lebih dari 135 negara – mulai dari demokrasi berkembang hingga demokrasi dewasa. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.ifes.org dan www.ElectionAccess.org

National Democratic Institute

National Democratic Institute (NDI) lembaga swadaya masyarakat nonprofit dan netral yang menjawab aspirasi warga dari seluruh dunia untuk hidup dalam masyarakat demokratis yang mengakui dan memajukan hak-hak asasi manusia.

Sejak didirikan tahun 1983, NDI dan rekan-rekan lokalnya telah bekerja untuk mendukung dan memperkuat institusi dan praktek demokrasi dengan memperkuat partai politik, organisasi sipil dan parlemen, mengawal pemilu, dan mendorong partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dengan anggota staf dan praktisi politik sukarelawan dari lebih dari 100 negara, NDI menyatukan individu dan kelompok untuk berbagi ide, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian. Para rekan menerima eksposur terhadap praktek-praktek terbaik dalam perkembangan demokrasi internasional yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan negara mereka masing-masing. Pendekatan multinasional NDI menggarisbawahi pesan bahwa meski ada berbagai model demokrasi, prinsip-prinsip tertentu diterapkan oleh semua demokrasi.

Upaya NDI menjunjung prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. NDI juga mempromosikan perkembangan jalur-jalur komunikasi kelembagaan di antara masyarakat, lembaga politik, dan pejabat terpilih, dan memperkuat kemampuan mereka dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut tentang NDI, kunjungi www.ndi.org.

Ucapan Terima Kasih

Manual *Akses Setara* ditulis oleh Virginia Atkinson dari *International Foundation for Electoral Systems* (IFES) dan Aaron Azelton dan Kent Fogg dari *National Democratic Institute* (NDI).

IFES dan NDI mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua organisasi dan individu yang menyumbangkan keahlian dan waktu mereka bagi perkembangan manual ini. Hasil akhir manual ini adalah berkat umpan balik dari *peer reviewer* dan organisasi berikut:

- Patrick Clarke – Chief Executive, Down Syndrome Ireland
- Cristina Francisco – Founder of Circle of Women with Disabilities, Dominican Republic
- Susan Henderson – Executive Director, Disability Rights and Education Defence Fund, U.S.-based
- Anna Lawson – Associate Professor, Disability Rights and Law, University of Leeds, United Kingdom
- Farai Mukuta – Executive Director, National Association of Societies for the Care of the Handicapped, Zimbabwe
- Alexandria Panehal – United States Agency for International Development/Dominican Republic, Mission Director
- Hicham Rachidi – Consultant, Moroccan Collective for the Promotion of the Rights of Persons with Disabilities
- Susan Sygall – Co-founder and CEO, Mobility International USA
- Stefan Tromel – Executive Director, International Disability Alliance, Switzerland-based
- Yurdiana – Senior Disability Rights Adviser, Indonesia Disabled People's Association
- Center for Society Orientation, Serbia
- Youth with Disabilities Forum, Serbia

IFES dan NDI juga mengucapkan terima kasih kepada para kolega yang telah menyediakan dukungan teknis sesuai dengan pengalaman mereka bekerja dengan badan penyelenggara pemilu dan organisasi-organisasi masyarakat, termasuk: David Ennis, Kyle Lemargie, dan Maximo Zaldivar dari IFES dan Jelena Abramovic, Pat Merloe, dan Thomas Kelly dari NDI. Manual ini menjadi lebih baik berkat kejelian Erica Shein dan bakat *editing* dan desain grafis Bella Desai dan Jayne Miller dari IFES.

Terakhir, adalah tidak mungkin menulis manual *Akses Setara* tanpa dukungan kuat dari Kantor Perkembangan Internasional Amerika Serikat, khususnya terima kasih kepada Rob Horvath dan Leah Maxson.

Daftar Isi

Akronim dan Singkatan	3
Definisi Istilah-Istilah Kunci	5
Ringkasan Eksekutif Mudah Baca	7
Ringkasan Eksekutif	13
Pendahuluan	17
Bagian 1: Pengenalan Disabilitas	21
Apa itu Disabilitas?	21
Bahasa Berbasis Hak	22
Keberagaman Komunitas Disabilitas	22
Organisasi Orang-Orang dengan Disabilitas	25
Memetakan Komunitas DPO	25
Dasar Hukum untuk Hak-Hak Politik Orang-Orang dengan Disabilitas	27
Kebijakan Disabilitas antara Lembaga-Lembaga Bantuan Pembangunan	29
Menembus Hambatan	31
Strategi-Strategi untuk Mendukung Proses Pemilu dan Politik Inklusif	32
Siklus Pemilu	34
Bagian 2: Periode Prapemilu	36
Penilaian melalui Lensa Disabilitas	37
Reformasi Hukum Pemilu	37
Administrasi Pemilu Inklusif	39
Bagian 3: Periode Pemilu	46
Pengawasan	46
Pencalonan	48
Kampanye	49
Implementasi Hari Pemilu	51
Transmisi Hasil Pemilu	52
Penyelesaian Sengketa Pemilu	52
Bagian 4: Periode Pascapemilu	53
Audit TPS	54
Merekam Pembelajaran	54
Aksesibilitas pada Institusi Pemerintahan	54
Membangun Kapasitas DPO	55
Kriteria Seleksi Komisioner KPU	55
Pendidikan Kewarganegaraan yang Inklusif	55

Bagian 5: Tantangan	57
Kurangnya Data	57
Diskriminasi	58
Lingkungan Beroperasi	58
Wakib Memilih	58
Kepemimpinan	58
Teknologi Aksesibel	59
Memonitor dan Mengevaluasi	59
Berbagi Pembelajaran	60
Bagian 6: Studi Kasus Republik Dominika	61
Garis Besar	61
Bagaimana Proyek Mengikutsertakan Penyandang Disabilitas di Pemilu dan Kehidupan Politik?	62
Tantangan dan Pelajaran	64
Dampak	65
Rekomendasi	65
Lampiran: Tonggak Pencapaian Akses Pemilu	66
Desember 1948 - Universal Declaration of Human Rights - Pasal 21	66
Maret 1976 - International Covenant on Civil and Political Rights - Pasal 25	66
September 2001 - Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities - Pasal 3	66
Mei 2008 - Convention on the Rights of Persons with Disabilities - Pasal 29	67
Mei 2010 - European Court of Human Rights - Kiss v. Hungary	67
November 2011 - Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community	69
November 2011– Council of Europe Recommendation CM/Rec(2011)14 of the Committee of Ministers to Member States on the Participation of Persons with Disabilities in Political and Public Life	69
Desember 2011 – Revised Venice Commission Interpretative Declaration to the Code of Good Practice in Electoral Matters on the Participation of People with Disabilities	70
Desember 2011 – UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – Regional Stakeholder Consultation for the High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons, 2003-2013 (Second Session)	71
Desember 2011 – Thematic Study by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Participation in Political and Public Life by Persons with Disabilities	72
November 2012 – Bali Commitments on Equal Access to Elections	73

Akronim dan Singkatan

ADA	Americans with Disabilities Act
AGENDA	General Election Network for Disability Access in Southeast Asia
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
CRPD	Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Ormas	Organisasi Masyarakat
DPO	Disabled persons' organization / Organisasi Orang-Orang dengan Disabilitas
BPP	Badan Penyelenggara Pemilu
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
IFES	International Foundation for Electoral Systems
LSMI	Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional
LGBT	Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender
NDI	National Democratic Institute
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
PSA	Public service announcement / Iklan Layanan Masyarakat
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
UDHR	Universal Declaration of Human Rights / Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia
UN ESCAP	United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
UN OHCHR	United Nations Office for the High Commissioner for Human Rights
USAID	United States Agency for International Development
WHO	World Health Organization

Definisi Istilah-Istilah Kunci

Sepanjang manual ini, istilah-istilah yang tertulis di bawah ini sering digunakan. Gambar 1 mendefinisikan penggunaan kata tersebut dalam konteks ini dan menyediakan contoh sebagai panduan tambahan.

Gambar 1: Definisi Istilah-Istilah Kunci

Istilah	Definisi	Contoh
Aksesibel	Sebuah tempat, fasilitas, lingkungan kerja, layanan, atau program yang mudah dijangkau, dimasuki, dioperasikan, berpartisipasi di dalamnya dan/atau digunakan secara aman, mandiri, dan terhormat oleh orang-orang dengan disabilitas	TPS tempat pemilih dapat menggunakan kursi roda dan bergerak tanpa dibantu
Format Aksesibel	Informasi cetak, audio, atau visual yang aksesibel bagi orang-orang dengan disabilitas	Braille, alat taktil, cetak besar, bahasa isyarat, mudah-baca
Alat bantu	Alat yang membantu penyelesaian sebuah tugas atau fungsi lainnya yang tanpanya akan sulit atau tidak mungkin dilakukan	Bantuan surat suara taktil atau kaca pembesar
Braille	Sistem tulisan yang berupa titik-titik tonjolan yang digunakan oleh orang tuna netra atau sulit penglihatan	
Organisasi lintas disabilitas	Organisasi yang terdiri dari orang-orang dengan jenis-jenis disabilitas yang berbeda	<i>Disabled People's International</i> ¹ adalah jaringan organisasi nasional orang-orang dengan disabilitas
Organisasi orang-orang dengan disabilitas	Organisasi masyarakat yang dijalankan oleh dan untuk orang-orang dengan disabilitas	Asosiasi Nasional Tuna Rungu Nigeria ² is comprised of deaf and hard-of-hearing Nigerians and works to promote and protect their rights
Mudah-baca	Teks dengan konten, bahasa, ilustrasi, dan susunan grafis yang disederhanakan agar mudah digunakan oleh orang-orang dengan disabilitas intelektual dan/atau pengguna bahasa non-pribumi	Rekomendasi untuk Pemilu Aksesibel dari <i>Inclusion Europe</i> di Eropa ³ atau Ringkasan Eksekutif di halaman 8 manual ini

1 *Disabled People's International*. <<http://www.dpi.otg>>

2 Asosiasi Nasional Tuna Rungu Nigeria. "Nigerian National Association of the Deaf." <<http://www.nnadeaf.org>>

3 Inclusion Europe. "Rekomendasi untuk Pemilu Aksesibel di Eropa." Uni Eropa. <http://www.inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_ADAP/ETR_Policy_Recommenda>

Keterlibatan	Orang-orang dengan disabilitas dilibatkan dalam semua aktivitas pemilu secara setara dengan warga negara lainnya, termasuk posisi kepemimpinan, dan bukan hanya memberi akomodasi yang dapat memisahkan orang-orang dengan disabilitas dari warga negara lainnya.	Selain hanya menyediakan kotak suara yang membawa surat suara ke rumah pemilih, TPS harus juga aksesibel agar pemilih dapat memilih di lokasi yang sama dengan warga lainnya, jika diinginkan.
Disabilitas intelektual	Istilah yang digunakan ketika ada batasan kemampuan seseorang untuk belajar pada tingkatan yang diharapkan dan berfungsi di kehidupan sehari-hari	<i>Down syndrome</i> atau autisme
Pengarusutamaan	Proses untuk integrasi orang-orang dengan disabilitas sebagai peserta dan pemimpin setara dalam program asistensi dan masyarakat	Pengembangan iklan layanan masyarakat yang melibatkan aktor dengan disabilitas di televisi, seperti dilakukan di Guatemala ⁴
Disabilitas psikososial	Kondisi-kondisi yang mempengaruhi kognisi, emosi, dan perilaku	Depresi dan skizofrenia
Akomodasi wajar	Penyediaan bahan atau lingkungan yang memungkinkan orang-orang dengan disabilitas berpartisipasi dan berkontribusi setara dengan yang lainnya	Panduan surat suara taktil adalah akomodasi wajar, karena memberikan pemilih yang tuna netra atau lemah penglihatan kesempatan yang sama untuk memilih secara rahasia tanpa bantuan
Taktil	Simbol-simbol menonjol yang dapat digunakan dalam konteks ketika orang-orang tidak fasih dalam Braille	
Pendekatan dua jalur	Termasuk pengarusutamaan disabilitas melalui aktivitas dan kebijakan-kebijakan, dan juga menyediakan program khusus disabilitas. Ini adalah metode yang dipilih oleh USAID untuk perkembangan inklusif disabilitas	Menampilkan orang-orang dengan disabilitas di bahan pendidikan pemilih, juga mengembangkan bahan pendidikan pemilih yang didasarkan khusus bagi orang-orang dengan disabilitas
<i>Umbrella group</i>	Organisasi orang-orang dengan disabilitas yang terdiri dari organisasi-organisasi anggota yang memfokuskan pada sebuah jenis disabilitas tertentu atau kelompok orang-orang dengan disabilitas	Federasi Nasional Disabilitas Nepal ⁵ termasuk anggota-anggota seperti Yayasan Kesehatan Mental Nepal dan Asosiasi Perempuan Disabilitas Nepal
Universal design	All buildings, materials and processes are designed to be accessible for both persons with and without disabilities from their inception	A new building that is constructed with access ramps and elevators rather than adding these features after the building is completed

4 Pengadilan Agung Pemilu Guatemala. Ahora todos somos del mismo equipo, Votando vamos por Guate. Guatemala's Supreme Electoral Tribunal, 2011.

5 National Federation of the Disabled Nepal. <<http://www.nfdn.or>

Akses Setara: Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik



Manual ini memberi tahu anda cara-cara agar orang-orang dengan disabilitas dapat ikut serta dalam pemilu dan politik.



Manual ini menjelaskan bahwa ikut serta dalam politik dapat membantu orang-orang dengan disabilitas mempengaruhi kebijakan yang penting bagi hidup mereka.

Kebijakan adalah rencana aksi yang dilakukan oleh pemerintah.



Salah satu cara bagi orang-orang dengan disabilitas untuk ikut serta dalam politik adalah ketika dapat menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilu.

Memilih memberi suara politik yang lebih kuat bagi orang-orang dengan disabilitas.

Dipilih merupakan hak semua orang dalam menikmati hak politik sepenuhnya yang harus dimiliki orang dengan disabilitas setara dengan warga negara yang lain.



Orang-orang dengan disabilitas yang memilih dan dipilih dalam pemilu menunjukkan pada khalayak umum bahwa mereka adalah warga negara yang setara.

Manual ini menggambarkan tantangan-tantangan yang dihadapi orang-orang dengan disabilitas ketika mereka ikut serta dalam politik.

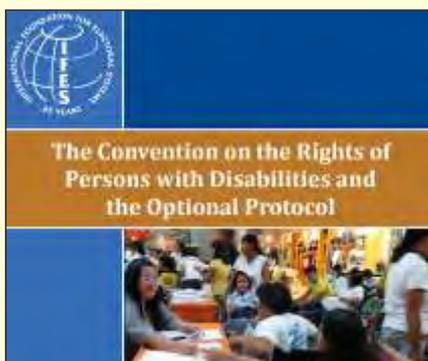
Manual ini memberi ide untuk menghadapi tantangan tersebut.



Manual ini memberi ide tentang berbagai cara orang-orang dengan disabilitas dapat ikut serta dalam pemilu dan politik.

Manual ini menjelaskan bahwa kerja sama dengan rekan adalah penting.

Orang-orang dengan disabilitas perlu terlibat dalam keputusan apapun yang mempengaruhi hidup mereka. Politisi, media, dan organisasi disabilitas adalah beberapa kelompok yang perlu saling bekerja sama.



Konvensi PBB mengenai Hak-Hak bagi Orang-Orang dengan Disabilitas disingkat dengan CRPD.

CRPD adalah dokumen hukum mengenai hak-hak orang dengan disabilitas untuk ikut serta dalam kehidupan publik.

Bagian-bagian dokumen ini, disebut Pasal 12 dan Pasal 29, membahas orang-orang dengan disabilitas ikut serta dalam pemilu.



Manual ini mendukung tujuan-tujuan CRPD. Manual ini memberi 4 ide cara membantu orang-orang dengan disabilitas untuk ikut serta dalam politik.

1. Menyediakan pelatihan mengenai politik, HAM/ hak kewarganegaraan untuk orang-orang dengan disabilitas dan organisasi-organisasi disabilitas.
2. Mendukung pemerintah dan pekerja politik untuk mengembangkan kebijakan dan kemitraan yang akan membantu lebih banyak orang-orang dengan disabilitas ikut serta dalam politik.
3. Melibatkan organisasi-organisasi untuk orang-orang dengan disabilitas dalam mengembangkan kampanye pendidikan mengenai pemilihan bagi khalayak umum.
4. Membantu partai politik melibatkan orang-orang dengan disabilitas selama perencanaan dan persiapan pemilu.

Manual ini terdiri dari 4 bagian utama.



Bagian 1 menjelaskan kata-kata yang tepat digunakan ketika berbicara mengenai berbagai disabilitas.



Bagian 2 membahas yang terjadi sebelum pemilu. Bagian ini adalah mengenai cara memastikan orang-orang dengan disabilitas dapat menjadi bagian dari pemilu dan politik. Beberapa ide dalam bagian ini termasuk:

- Memastikan agar informasi mengenai pemilu **aksesibel**.

Aksesibel berarti sebuah tempat yang bisa dimasuki seseorang

Aksesibel juga berarti informasi yang dapat dipahami orang-orang

- Mengubah hukum-hukum yang mempersulit orang-orang dengan disabilitas ikut serta dalam pemilu.
- Memastikan penyelenggara pemilu dari pusat – daerah/ desa (KPU - KPPS) memiliki perspektif disabilitas

Bagian 2 juga membahas program-program yang dapat digunakan organisasi disabilitas untuk mengembangkan suara yang lebih kuat pada saat-saat yang berbeda dalam pemilu.



Bagian 3 manual ini membahas yang terjadi selama pemilu.

Bagian 3 manual ini memberikan ide untuk:

- Organisasi disabilitas dan orang-orang dengan disabilitas bekerja sama dengan kelompok-kelompok lainnya. Tugas kemitraan ini adalah mengawasi pemilu untuk memastikan orang-orang dengan disabilitas dapat ikut serta dalam pemilu.
- Menemukan dan Memastikan orang-orang dengan disabilitas dapat masuk dalam data pemilih
- Menemukan cara-cara untuk memastikan bahwa orang-orang dengan disabilitas dapat menjadi calon jika diinginkan.
- Membantu partai-partai politik untuk membuat informasi dalam format yang aksesibel.
- Membantu organisasi-organisasi disabilitas untuk bersuara selama pemilu.
- Membuat peraturan untuk memastikan bahwa informasi mengenai pemilu aksesibel.
- Membantu memastikan proses pemilihan selama pemilu aksesibel.
- Memastikan hasil pemilu aksesibel bagi orang-orang dengan disabilitas.



Bagian 4 membahas yang terjadi setelah pemilu selesai



Bagian terakhir manual ini membahas orang-orang dengan disabilitas ikut serta dalam pemilu dan politik di Republik Dominika

Ringkasan Eksekutif

Akses Setara: Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Pemilu dan Proses Politik adalah manual yang menyediakan strategi dan peralatan untuk memperkuat partisipasi orang-orang dengan disabilitas dalam pemilu dan proses politik. Dengan merujuk ke pengalaman dari *International Foundation for Electoral Systems* (IFES) dan *National Democratic Institute* (NDI), manual ini mengenali peran dasar yang dimainkan oleh partisipasi politik dalam membantu orang-orang dengan disabilitas mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka dan membentuk sebuah fondasi untuk keterlibatan di semua aspek masyarakat.

Pemilu menyediakan kesempatan unik untuk meningkatkan partisipasi dan mengubah sudut pandang umum mengenai kemampuan dari orang-orang dengan disabilitas. Hasilnya, orang-orang dengan disabilitas dapat memiliki suara politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai warga negara setara. Ini menyiapkan panggung untuk partisipasi mereka saat ini dalam komunitas mereka dan integrasi sosial dan ekonomi.

Akses Setara mengenali tantangan-tantangan yang dihadapi orang-orang dengan disabilitas dalam partisipasi politik dan menyediakan cara-cara untuk memitigasinya. Manual ini juga mengakui bahwa—beserta hambatan-hambatan unik tersebut—orang-orang dengan disabilitas menghadapi tantangan yang juga mempengaruhi masyarakat dalam demokrasi baru. *Akses Setara* mencakup panduan untuk memberdayakan orang-orang dengan disabilitas untuk berperan aktif dalam proses pemilu sebagai penyelenggara pemilu, KPPS, pemilih, calon, pengawas, pendidik dan/atau pekerja kampanye. Keterlibatan memberdayakan orang-orang dengan disabilitas dan membentuk proses politik dan hasil demokratisasi secara positif.

Banyak pendekatan yang dijabarkan di *Akses Setara* menekankan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pejabat pemilu, media, partai politik, organisasi orang-orang dengan disabilitas (*disabled persons' organization* /DPO) dan organisasi masyarakat lainnya. Akan tetapi, apapun pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan keterlibatan politikal, adalah penting untuk melibatkan orang-orang dengan disabilitas dari awal rancangan program. Ini memastikan bahwa orang-orang dengan disabilitas adalah juga mitra yang setara dan memiliki suara dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) berfungsi sebagai kerangka kerja yang memandu manual ini dan menyediakan dasar hukum dan seperangkat standar untuk partisipasi penuh dan setara orang-orang dengan disabilitas di kehidupan umum. Pasal 29 dan 12 khususnya adalah relevan dengan aktivitas sehubungan pemilu

Untuk mendukung tujuan-tujuan CPRD, manual ini menyiapkan empat strategi yang saling mendukung untuk meningkatkan partisipasi politik orang-orang dengan disabilitas:

- Membangun kapasitas DPO dan memberdayakan anggota-anggota mereka melalui pelatihan terkait sistem pemilu, struktur pemerintahan, dan keterampilan organisasi dan advokasi dasar. Ini membantu membangun profil politik para DPO dan memberdayakan organisasi-organisasi mendorong isu mereka ke dalam agenda politik.
- Mendukung lembaga pemerintahan seperti legislatur dan Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) untuk menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang menyediakan kesempatan yang lebih tinggi bagi partisipasi politik oleh orang-orang dengan disabilitas dan mendorong kerja sama dengan DPO.

- Melibatkan DPO dalam koalisi masyarakat sipil yang luas untuk melakukan pengawasan pemilu atau pendidikan pemilih.
- Membantu partai politik untuk menjangkau orang-orang dengan disabilitas ketika membuat strategi kampanye pemilu dan mengembangkan posisi kebijakan, dan mendorong partai-partai untuk melibatkan orang-orang dengan disabilitas sebagai calon dan dalam peran kepemimpinan.

Manual ini dimulai dengan sebuah tinjauan pada konsep disabilitas dan teknologi, menggarisbawahi keberagaman dari komunitas disabilitas dan cara terbaik berkonsultasi dengan komunitas disabilitas lokal tentang istilah yang mereka ingin gunakan. Bagian inti dari *Akses setara* terpusat pada siklus pemilu, menggarisbawahi cara program menghadapi hambatan dan meningkatkan kemampuan DPO untuk menggunakan kekuatan dan pengaruh pada berbagai tahapan sepanjang pemilu. Lalu manual ini diakhiri dengan studi kasus mengenai usaha-usaha yang dilakukan di Republik Dominika untuk meningkatkan akses pemilu – menyediakan pelajaran yang didapatkan tentang cara-cara meningkatkan dampak program.

Akses Setara juga menggarisbawahi tantangan-tantangan pada penerapan program pemilu inklusif, misalnya:

- Kurangnya data yang tersedia mengenai banyak dan tempat orang-orang dengan disabilitas di negara-negara berkembang
- Diskriminasi masyarakat
- Menantang secara politik lingkungan-lingkungan tempat partisipasi masyarakat ditahan oleh pemerintah
- Ketentuan wajib memilih yang mendenda orang-orang dengan disabilitas jika mereka tidak memilih, atau secara otomatis menghapus nama mereka dari daftar pemilih
- Langkanya kesempatan kepemimpinan untuk orang-orang dengan disabilitas
- Kapasitas terbatas BPP lokal untuk menerapkan solusi teknologi aksesibel

Terlebih dari itu, manual ini membahas keuntungan dari memantau dan mengevaluasi dampak program pemilu yang memilah data berdasarkan disabilitas dan mengumpulkan pelajaran kualitatif mengenai keterlibatan disabilitas. IFES meluncurkan www.electionaccess.org sebagai landasan berbagai pelajaran tentang menghadapi tantangan-tantangan ini⁶.

Pendekatan-pendekatan dan contoh program yang digarisbawahi sepanjang manual dapat membantu memastikan orang-orang dengan disabilitas berpartisipasi dalam kehidupan politik sebagai warga negara setara. Untuk menghadapi semua hambatan, usaha-usaha harus difokuskan lebih dari hanya pada hari pemungutan suara saja. Meski menetapkan preseden adalah penting, satu pemilu tidak langsung menumbangkan semua hambatan fisik dan sosial untuk mengubah persepsi negatif yang ada saat ini tentang orang-orang dengan disabilitas. *Akses Setara* berusaha memberi pemerintah nasional dan lokal, organisasi internasional, organisasi masyarakat, profesional perkembangan, dan donatur peralatan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memastikan setiap suara didengar pada hari pemungutan suara dan setelahnya.

Demokrasi sesungguhnya adalah yang melibatkan semua penduduknya, termasuk yang menyandang disabilitas.

6 www.electionaccess.org diluncurkan tahun 1998, situs tersebut sekarang sedang dirancang ulang

Isi Manual

Bagian 1 meninjau ulang konsep-konsep disabilitas dan istilah-istilah yang lebih digunakan, menggarisbawahi keberagaman komunitas disabilitas.

Bagian 2 merangkum pendekatan-pendekatan dan pertimbangan-pertimbangan berikut dalam **Periode Prapemilu**:

- Penilaian prapemilu dengan lensa disabilitas khusus
- Reformasi hukum pemilu untuk menghilangkan hambatan jelas untuk memilih dan meningkatkan aksesibilitas keseluruhan
- Administrasi pemilu inklusif dengan lensa disabilitas di semua wilayah persiapan

Bagian 3 memeriksa aspek-aspek dan intervensi potensial berikut selama **Periode Pemilu**:

- Mendukung kerja sama antara kelompok pengawas nasional maupun internasional dan DPO, dan termasuk orang-orang dengan disabilitas sebagai pengawas dan pemantau jangka panjang dan pendek
- Memberdayakan orang-orang dengan disabilitas selama proses pencalonan untuk menjadi kandidat yang memenuhi syarat
- Mendukung BPP dan partai politik dalam menyediakan informasi dalam format aksesibel dan mengulurkan tangan secara khusus ke orang-orang dengan disabilitas selama kampanye
- Membantu DPO dalam menjaga janji pemilu dari para calon dan partai politik untuk meningkatkan kesadaran akan inisiatif advokasi dan kecemasan konstituen, dan meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih
- Mempromosikan kode etik bagi partai-partai politik dan calon-calon yang menyediakan informasi dengan bahasa dan format aksesibel dan melibatkan orang-orang dengan disabilitas dalam aktivitas
- Mengorganisir debat dengan para calon mengenai kebijakan yang mempengaruhi orang-orang dengan disabilitas dan memastikan semua debat calon aksesibel bagi orang-orang dengan disabilitas
- Mendukung BPP pada penerapan ketentuan aksesibilitas pada Hari Pemungutan Suara
- Menyampaikan hasil dalam format yang aksesibel
- Memastikan akses ke mekanisme sengketa pemilu dan proses pertimbangan keluhan

Bagian 4 menjelajahi kesempatan-kesempatan berikut untuk pelibatan lebih lanjut di **Periode Pascapemilu**:

- Audit TPS yang termasuk kekuasaan untuk memberi hukuman ketika standar aksesibilitas tidak diikuti
- Proses peninjauan ulang yang inklusif untuk mencatat pelajaran yang diterima dan menilai dampak dari tindakan yang diambil untuk meningkatkan akses
- Memastikan aksesibilitas lembaga-lembaga pemerintahan
- Manual ini diakhiri dengan studi kasus di Republik Dominika, yang:
- Menyediakan pelajaran yang diterima
- Menunjukkan cara meningkatkan dampak program dengan melibatkan orang-orang dengan disabilitas selama merancang program



Seorang pemilih Libya diberi tinta pada jarinya untuk menunjukkan bahwa ia telah memilih pada Hari Pemungutan Suara.

Pendahuluan

“ Kita memiliki kewajiban moral untuk menghilangkan hambatan partisipasi, dan untuk menginvestasikan cukup dana dan keahlian untuk membebaskan potensi besar orang-orang dengan disabilitas. ”

Stephen Hawking
Penulis, Fisikawan, Advokat
World Health Organization World Report on Disability, 2011

Perkembangan demokrasi yang efektif adalah termasuk memastikan rakyat yang paling miskin dan dipinggirkan memiliki suara yang berarti dalam keputusan-keputusan yang terkait kesejahteraan mereka. Akan tetapi orang-orang dengan disabilitas, seringkali adalah yang paling miskin, dilupakan dan berjuang untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa 15 persen dari populasi negara memiliki disabilitas, dengan 80 orang-orang ini hidup di negara-negara berkembang, dengan tingkatan yang kemungkinan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara pascakonflik. Program bantuan demokrasi dapat memberdayakan orang-orang dengan disabilitas untuk terlibat secara politik dan menjadi anggota masyarakat arus utama dengan hak, tanggung jawab, dan kehormatan yang diberikan kepada semua warga negara. Orang-orang dengan disabilitas mewakili berbagai kelompok etnis, agama, sosioekonomi, dan gender. Ketika bagian besar dan luas dari masyarakat tidak berpartisipasi secara politik, demokrasi tidak dapat menjadi lebih dalam dan memberi suara bagi semua warga negara dalam hal pemerintahannya.

Orang-orang dengan disabilitas berpartisipasi secara politik untuk berbagai alasan. Dalam beberapa kasus, mereka mengejar kepentingan yang secara khusus terkait disabilitas mereka, seperti membuat bangunan umum menjadi aksesibel atau memberi interpretasi bahasa isyarat di sekolah-sekolah. Dalam kasus-kasus lainnya, kepentingan mereka bertindih dengan segmen yang lebih luas dalam masyarakat dalam perkara kebutuhan dasar manusia, seperti akses ke air bersih, pendidikan untuk anak mereka, atau pengembangan komunitas yang aman. Seperti warga negara lainnya, orang-orang dengan disabilitas ingin kesempatan untuk membentuk komunitas mereka, dan dengan melakukan hal tersebut, dapat menjadi anggota komunitas yang dikenali dan dihargai.

Untuk mencapai status ini, orang-orang dengan disabilitas perlu berpartisipasi secara politik. Pemilu menyediakan kesempatan untuk kekuatan dan pengaruh mereka agar digunakan dan diperkuat. Seperti halnya dengan warga negara lainnya, pemilu adalah cara paling mendasar untuk orang-orang dengan disabilitas menyatakan pilihan dan membentuk hasil politik. Pemilu juga memungkinkan orang-orang dengan disabilitas untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan organisasi, membangun hubungan, mengangkat isu yang penting bagi mereka secara publik, menunjukkan kemampuan mereka, dan menyiapkan panggung bagi partisipasi dan kepemimpinan mereka yang berkelanjutan. Untuk alasan ini, program pemilu yang dijabarkan dalam manual ini dibingkai sebagai cara-cara untuk memposisikan orang-orang dengan disabilitas sebagai warga negara yang setara, aktif, dan terlibat sebelum, selama, dan setelah pemilu.

Ketika bantuan finansial langsung dapat menjadi bagian dari program, ada berbagai cara tambahan untuk melibatkan orang-orang dengan disabilitas dalam pemilu dan proses politik, dimulai dari keterlibatan mereka dalam keputusan-keputusan perencanaan program. Ini berarti orang-orang dengan disabilitas dan DPO harus

selalu memiliki suara dalam program yang mempengaruhi mereka. Prinsip “bukan tentang kita jika tanpa kita” adalah batu tumpuan dari keterlibatan disabilitas.

Orang-orang dengan disabilitas dan organisasi orang-orang dengan disabilitas harus selalu memiliki suara dalam program yang mempengaruhi mereka. Prinsip “bukan tentang kita jika tanpa kita” adalah batu tumpuan dari keterlibatan disabilitas.

Tentang Manual Ini

Manual Akses Setara: Cara Melibatkan Orang-orang dengan Disabilitas dalam Pemilu dan Proses Politik bertujuan untuk menyediakan peralatan dan pengetahuan bagi pemerintah lokal dan nasional, organisasi-organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, profesional dalam pengembangan, dan donatur untuk memperkuat partisipasi politik orang-orang dengan disabilitas dalam pemilu dan program proses politik agar mereka memiliki suara yang lebih besar dalam keputusan-keputusan yang berdampak pada kesejahteraan dan komunitas mereka. Manual ini menarik pengalaman dari International Foundation for Electoral Systems (IFES) dan National Democratic Institute (NDI) dan menekankan kerja sama dengan badan penyelenggara pemilu (BPP) dan organisasi yang dijalankan oleh dan untuk orang-orang dengan disabilitas.

Keuntungan dari Program Pemilu Inklusif bagi Disabilitas

Melibatkan orang-orang bagi disabilitas sangatlah penting bagi demokrasi. Tanpa keterlibatan semua warga negara, sebuah negara bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Melibatkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan politik juga menyediakan dasar untuk mengarusutamakan keterlibatan mereka dalam semua aspek masyarakat. Selama pemilu, konsep kewarganegaraan seringkali ditampilkan pada media Pemerintah dan non-Pemerintah, dan lalu didefinisikan dalam kesadaran publik. Ini adalah kesempatan untuk menembus stigma sosial dengan memastikan bahwa orang-orang dengan disabilitas muncul bersama dengan warga negara lainnya sebagai peserta aktif dalam proses politik. Orang-orang dengan disabilitas dapat memainkan peran yang sama dengan semua warga negara lainnya dalam proses pemilihan, termasuk bekerja sebagai penyelenggara pemilu atau KPPS, memilih, menjadi calon pejabat, mengadvokasikan kebijakan, memantau proses pemungutan dan penghitungan suara, melaporkan, mendidik pemilih, dan berkampanye untuk calon dan partai politik. Keterlibatan dalam berbagai aktivitas berbeda ini tidak hanya memberdayakan orang-orang dengan disabilitas, tetapi juga membantu mengubah proses pemilihan dan persepsi publik. Ini menyiapkan panggung untuk partisipasi dan integrasi yang berjalan dalam masyarakat, memastikan hak-hak setara orang-orang dengan disabilitas.

Dengan memberdayakan orang-orang dengan disabilitas untuk mengambil tempat mereka di sisi warga negara lainnya, hambatan-hambatan dijatuhkan dan kesetaraan didorong. Misalnya, mempekerjakan orang-orang dengan disabilitas untuk bekerja di TPS memberdayakan anggota KPPS perseorangan dan memberikan kesempatan berharga untuk menghilangkan stereotip. Demikian pula dengan memastikan perempuan dengan disabilitas terlibat dalam program untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, tersedia sebuah kesempatan untuk menggeser persepsi mengenai disabilitas dan gender.

Keuntungan-keuntungan tambahan program pemilu inklusif disabilitas antara lain:

Lebih Banyak Kebijakan Pemerintah yang Inklusif

Program pemilu saat membuka jalan untuk kebijakan pemerintah inklusif yang lebih luas. Jika orang-orang dengan disabilitas menunjukkan jumlah dan kepentingan mereka pada kotak suara, politisi akan lebih cenderung untuk mengembangkan kebijakan yang menarik bagi kelompok ini, seperti pendidikan, pekerjaan, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang inklusif. Dengan berpartisipasi di kehidupan politik, orang-orang dengan disabilitas memiliki kesempatan mempengaruhi kebijakan berenteng luas. Misalnya, proses pemilu seringkali melibatkan

peninjauan ulang kerangka kerja hukum pemilu. Ini membuka peluang untuk memasukkan konsep progresif legal mengenai disabilitas ke dalam legislasi nasional tingkat tinggi. Seorang pria menggunakan jalan miring untuk mendorong anak perempuannya ke dalam TPS pada hari pemungutan suara di Guatemala.

DPO Terberdaya sebagai Pemimpin Efektif Masyarakat Sipil

DPO dapat ditempatkan secara strategis untuk aktivisme politik, karena mereka seringkali telah terorganisir melalui berbagai jenis kelompok dan jaringan pendukung dan, dengan bantuan teknis, dapat dimobilisasi sebagai segmen masyarakat yang dinamik dan antusias. DPO telah, dari beberapa aspek, mendahului organisasi masyarakat lainnya yang belum tentu memiliki konstituensi yang jelas atau isu-isu yang terfokus yang dirasakan secara mendalam dan membutuhkan aksi politik. Meski banyak DPO yang masih membutuhkan kapasitas tambahan untuk secara efektif terlibat dalam politik, karakteristik dasar mereka menyediakan dasar yang kuat untuk organisasi dan aktivisme politik.



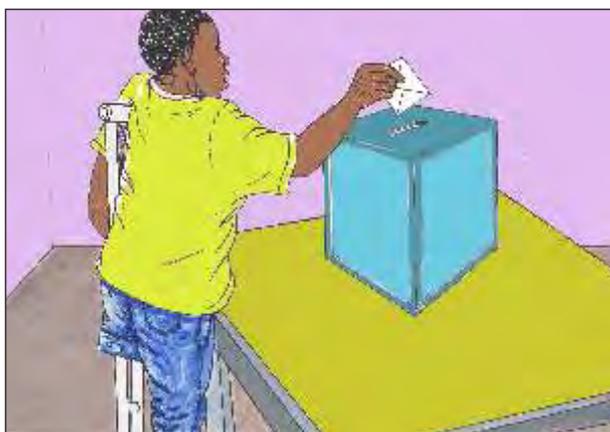
Seorang pria menggunakan jalan miring untuk mendorong anak perempuannya ke dalam TPS pada hari pemungutan suara di Guatemala.

Keterlibatan Lebih Besar bagi Semua Warga Negara

Program pemilu yang inklusif dapat pula membuka proses ke warga negara lainnya. Banyak reformasi yang didasarkan pada orang-orang dengan disabilitas menguntungkan segmen populasi yang lebih luas. Misalnya, menyederhanakan proses pendaftaran pemilih memberi keuntungan bagi orang-orang dengan disabilitas intelektual dan juga orang-orang yang lebih tua, imigran, dan orang-orang dengan kemampuan baca tulis rendah. Memastikan TPS aksesibel memberi keuntungan bagi orang tua dengan dorongan bayi, orang lanjut usia, dan pemilih dengan cedera sementara, seperti kaki patah. Konsep ini – bahwa semua bangunan, bahan, dan proses dirancang untuk aksesibel bagi orang dengan atau tanpa disabilitas – dikenal sebagai rancangan universal.

Kesempatan untuk Menghadapi Hambatan bagi Populasi Luas

Bantuan untuk mitra lokal yang berada di bawah rezim represif dalam melaksanakan advokasi terkadang dapat dimulai dari aktivitas-aktivitas yang tidak akan dianggap sebagai “ancaman” terhadap pemerintah. BPP yang tidak mau membahas reformasi skala besar seringkali mau mendiskusikan isu yang umumnya netral, seperti meningkatkan aksesibilitas pemilu bagi orang-orang dengan disabilitas. Akses ke kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya dapat menjadi kontroversi secara politik, tetapi ini adalah kondisi unik ketika sikap “beramal” pejabat pemerintah terhadap orang-orang dengan disabilitas sering menghasilkan peningkatan hak-hak. Diskusi awal tentang hak-hak disabilitas dapat berlanjut ke kenyamanan yang lebih besar saat membahas HAM secara lebih umum. Mendorong politisi dan lembaga pemerintahan untuk bekerja sama dengan DPO untuk menghadapi isu-isu yang dihadapi komunitas disabilitas



Gambar ini digunakan untuk kampanye pendidikan pemilih di Senegal tahun 2012. Menggambarkan proses memilih dengan gambar dapat membantu orang-orang dengan disabilitas intelektual dan dengan kemampuan baca tulis rendah untuk memahami prosesnya.

dan juga menetapkan preseden untuk melibatkan organisasi masyarakat, yang dapat menghasilkan penerapan praktek ini di daerah lainnya.

Cara Menggunakan Manual Ini

Manual ini mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui orang-orang dengan disabilitas ketika berpartisipasi dalam hidup politik dan menyediakan cara-cara untuk mengurangi hambatan tersebut. Manual ini mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dapat diambil pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam proses pemilu, seperti pejabat pemilu, media, ormas, dan partai-partai politik, untuk mendorong keterlibatan lebih lanjut. Pendekatan dua jalur dibahas; bahwa beberapa ide program disasarkan khususnya bagi komunitas disabilitas, sementara yang lainnya memberikan saran-saran untuk mengarusutamakan pelibatan orang-orang dengan disabilitas dengan kerja terbantu yang disasarkan bagi seluruh populasi.

Langkah-langkah praktis untuk melibatkan orang-orang dengan disabilitas dalam pemilu dan proses politik akan dibahas. Tidak ada solusi mudah untuk semua hambatan, dan dalam beberapa kasus tidak ada praktek terbaik yang jelas. Manual ini merangkum beberapa isu tersebut dan pilihan-pilihan yang dapat diambil untuk menghadapinya, beserta dengan kekurangan potensialnya dari sudut pandang standar pemilu.

Manual ini juga menggarisbawahi sejumlah pelajaran, yang terutama adalah nilai dari menjangkau orang-orang dengan disabilitas untuk memahami kebutuhan, kepentingan, dan harapan mereka, dan untuk membangun hubungan yang dapat membantu memberi konteks pada pendekatan yang diambil. Ketakutan salah berbicara atau menyinggung tidak boleh mencegah komunikasi dan interaksi, selama ditunjukkan rasa hormat satu sama lain dan niat belajar. Manual ini mengusulkan cara-cara untuk memulai proses belajar, mengenali istilah-istilah yang dipilih dan cara-cara berkomunikasi yang bervariasi dari satu situasi ke situasi yang lain.

Bagian pembuka manual ini menyediakan latar belakang dan sudut pandang yang diterima secara luas mengenai disabilitas. Selanjutnya, manual ini akan difokuskan pada keterlibatan dalam pemilu dan proses politik dan disusun sekitar siklus pemilu⁷, dengan bagian dua membahas periode prapemilu, bagian tiga dan empat membahas periode pemilu dan pasca pemilu. Bagian lima menyediakan studi kasus yang menggambarkan beberapa isu dan kesempatan yang dihubungkan dengan pemilu inklusif dan program proses politik..

7 Rujuk ke Gambar 4 pada halaman 35



Pemilih dari Liberia berlatih menggunakan panduan surat suara taktil.



Seorang perempuan memasukkan surat suaranya ke dalam amplop pada Pemilu 2013 di Filipina.

Bagian 1: Pengenalan Disabilitas

Bagian ini menyediakan garis besar konsep disabilitas dan istilah-istilah yang digunakan dalam komunitas hak-hak disabilitas. Penting untuk diingat bahwa ide disabilitas masih berkembang; istilah yang digunakan dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Tidak apa-apa jika anda tidak yakin cara menyebut orang-orang dengan disabilitas – tanyakan saja pada mereka istilah yang mereka pilih.

Bagian 1 juga akan mengenalkan standar-standar internasional inti sehubungan dengan hak-hak pemilu orang-orang dengan disabilitas dan cara badan-badan perkembangan internasional mendukung hak-hak tersebut. Bagian ini akan diakhiri dengan diskusi mengenai kesempatan yang dapat ditawarkan pemilu pada orang-orang dengan disabilitas ketika hambatan telah dilalui.

Apa Itu Disabilitas?

Definisi dari disabilitas berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Manual ini menggunakan definisi yang ditemukan pada Pasal 1 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Orang dengan Disabilitas (*UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*⁸ /CRPD):

Orang-orang dengan disabilitas termasuk orang-orang dengan gangguan fisik, mental, intelektual, atau indrawi yang dengan interaksi dengan berbagai hambatan dapat mengganggu partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.

Ada beberapa pendekatan berbeda untuk menghadapi disabilitas, dimulai dari amal dan pandangan medis yang kuno hingga model-model sosial dan berbasis hak yang lebih kontemporer. Model-model ini membantu mendeskripsikan sikap sosial terhadap disabilitas dan tidak saling eksklusif. Deskripsi singkat dari tiap pendekatan:

Model amal – mengasumsikan bahwa orang-orang dengan disabilitas tidak mampu menjadi peserta penuh dalam masyarakat dan membutuhkan bantuan. Orang-orang dengan disabilitas dikasihani.

Model medis – orang-orang dengan disabilitas diperlakukan seolah-olah disabilitas mereka adalah sebab dari semua hambatan. Dalam model ini, orang-orang dengan disabilitas didorong untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan bukan sebaliknya.

Model sosial – mendeskripsikan disabilitas sebagai hasil dari interaksi seseorang dengan lingkungannya. Pembukaan CRPD berkata, “Disabilitas adalah hasil dari interaksi seseorang dengan orang lain yang memiliki gangguan dan hambatan sikap dan lingkungan yang mencegah partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.”

8 International Foundation for Electoral Systems. “UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.” <[http://www.IFES.org/~media/Files/Publications/Books/2012/CRPD Final.pdf](http://www.IFES.org/~media/Files/Publications/Books/2012/CRPD%20Final.pdf)>.

Model hak-hak – penekanan digeser dari kebergantungan ke pemberdayaan. Orang-orang dengan disabilitas memiliki HAM yang sama dengan warga negara lainnya dan pemerintah harus menjaga hak-hak dan bertanggung jawab akan perlindungan mereka.

Aspek-aspek model sosial dan berbasis hak dapat membantu strategi partisipasi politik inklusif. Model sosial dan berbasis hak saling melengkapi. Model sosial menggarisbawahi bahwa adalah hambatan yang diletakkan oleh masyarakat yang menyingkirkan orang-orang dengan disabilitas, sementara model berbasis hak menekankan HAM setara bagi warga dan peran advokasi untuk orang-orang dengan disabilitas.



Perjanjian yang ditandatangani oleh sebuah partai politik di Makedonia, menjanjikan ratifikasi CRPD dalam 100 hari kerja pertama parlemen baru setelah pemilu tahun 2011.

Bahasa Berbasis Hak

Ada berbagai sudut pandang mengenai kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan disabilitas. Teori model sosial memilih untuk menggunakan istilah “*disabled person*” karena konsisten dengan ide bahwa orang-orang dengan gangguan adalah “*disabled*” oleh kekuatan luar sosial dan bukan dari gangguan mereka. Teori ini menggunakan “*disabilitas*” untuk merujuk pada pengecualian yang merupakan hasil dari tekanan masyarakat dan bukan gangguannya.

Metode lainnya adalah dengan menggunakan bahasa “*people-first*” atau “*orang-dahulu*”. Menurut metode ini, disabilitas seseorang bukanlah sifat yang mendefinisikan dirinya, melainkan hanya satu dari banyak sifat. Istilah “*orang dengan disabilitas*” digunakan (“*persons with disabilities*” atau “*people with disabilities*”). Manual ini akan menggunakan bahasa *people-first* karena ini adalah praktek terbaik yang ditetapkan oleh CRPD and USAID. Pengecualian untuk aturan ini adalah penggunaan “*disabled persons' organization*,” atau “*DPO*” untuk menyebut organisasi-organisasi yang terdiri dari dan dijalankan oleh orang-orang dengan disabilitas. Istilah tersebut tidak sesuai dengan bahasa *people-first*, tetapi telah menjadi sebutan yang secara umum diterima untuk jenis ormas ini. Janganlah terkejut apabila orang-orang dengan disabilitas menyebut diri mereka sendiri dengan istilah yang dianggap negatif oleh orang-orang dengan disabilitas lainnya. Disabilitas adalah konsep yang selalu berkembang. Bagan di bawah membantu memberi contoh-contoh bahasa *people-first*.

Keberagaman Komunitas Disabilitas

Ketika mendukung keterlibatan politik, perbedaan dan kesenjangan antara orang-orang dengan disabilitas haruslah dipertumbangkan. Orang-orang dengan disabilitas diak seragam; mereka adalah anggota berbagai kelompok etnis dan agama. Seringkali, kombinasi berbagai identitas dapat membuat seseorang dua kali atau tiga kali lebih tersingkir.

Orang-orang dengan jenis disabilitas yang berbeda menghadapi tantangan-tantangan yang unik. Orang-orang dengan disabilitas fisik dan visual tertentu dapat berinteraksi dengan orang-orang dengan lebih mudah karena tidak ada hambatan komunikasi. Akan tetapi, orang-orang yang tuna rungu menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak mengetahui bahasa isyarat. Kesenjangan komunikasi ini dapat berakibat pada ketersingkiran yang lebih jauh. Dalam konteks pemilu dan proses politik, ini artinya aktor politik seperti BPP dan partai-partai politik harus menyadari gaya-gaya komunikasi yang berbeda.

Gambar 2: Bahasa *People-first*

Katakan:	dan Bukan:
Orang-orang dengan disabilitas	Kebutuhan khusus, PWD, cacat
Ia menggunakan kursi roda	Ia bergantung pada kursi roda
Pemilih tanpa disabilitas	Orang normal/sehat
Ia memiliki disabilitas fisik	Ia cacat
Ia tuna rungu/sulit pendengaran	Pendengarannya terganggu
Ia memiliki autismela memiliki disabilitas	Ia autisme
intelektual/psikososial disability	Ia terbelakang secara mental
Anak dengan Down syndrome	Anak Down
Individu dengan AIDS	Ia menderita/sakit/korban AIDS

Menampilkan bahasa isyarat atau teks pada video informasi adalah langkah yang inklusif, tetapi aktor harus sadar bahwa setiap negara memiliki bahasa isyaratnya masing-masing dan bahkan di beberapa negara ada perbedaan antardaerah, terutama di antara komunitas tuna rungu pribumi. Bahkan di dalam komunitas disabilitas, orang-orang dengan disabilitas intelektual dan psikososial seringkali tidak dihiraukan dan dikesualikan karena diskriminasi. Ada juga beberapa disabilitas yang tidak langsung tampak, seperti kelainan bipolar atau sakit kronis. Jenis-jenis disabilitas ini disebut sebagai disabilitas tak tampak. Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan orang-orang dengan disabilitas perlu diperlakukan secara beragam dan tidak seragam.

Disabilitas adalah juga unik, karena dapat terjadi pada siapa saja dan dapat terjadi sementara. Cara-cara pemerintah merespon orang-orang dengan disabilitas juga bervariasi. Keinginan pemerintah untuk membantu yang terluka akibat perang terkadang dapat menghasilkan penyediaan layanan yang lebih baik dan pengakuan hak-hak seluruh komunitas disabilitas. Misalnya, di Armenia, yang terluka akibat perang diperlakukan dengan hormat, dan berujung pada kemauan negara untuk meningkatkan aksesibilitas. Bencana alam juga dapat membuat pemerintah berfokus pada keterlibatan disabilitas. Hanya setelah angin siklon tahun 2008 saja pemerintah Myanmar mulai



Brosur ini ditargetkan untuk perempuan Myanmar sebelum pemilu tahun 2012, juga melibatkan perempuan dengan disabilitasPerempuan dengan Disabilitas.

mengembangkan kebijakan-kebijakan orang-orang dengan disabilitas. Akan tetapi, di kebanyakan situasi, keterlibatan lebih jauh membutuhkan advokasi dari komunitas disabilitas lokal, dan juga penjuang-pejuang progresif dalam pemerintahan.

Perempuan dengan Disabilitas

Perempuan dengan disabilitas sering menghadapi diskriminasi ganda akibat disabilitas dan status gender mereka. Perempuan dengan disabilitas memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mendapatkan akses ke pendidikan atau pelatihan, layanan kesehatan dan rehabilitasi, atau kesempatan bekerja yang setara dibandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas. Akhirnya, mereka lebih mungkin hidup dalam kemiskinan dan isolasi, terpisah dari kehidupan politik dan sosial komunitas mereka.

Menurut USAID⁹, perempuan dengan disabilitas membentuk hampir tiga perempat dari keseluruhan orang-orang dengan disabilitas di negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Dengan persentase besar orang-orang dengan disabilitas menghadapi hambatan tambahan sebagai perempuan, penting untuk memahami tantangan-tantangan terkait gender bagi partisipasi politik penuh. Partisipasi politik perempuan terhalang oleh berbagai hambatan institusional dan sosial/budaya yang diperparah oleh disabilitas.

Pada tingkat institusional, syarat-syarat kewarganegaraan atau dokumentasi untuk pendaftaran pemilih lebih sulit didapatkan untuk perempuan dibandingkan dengan lelaki akibat dari hukum-hukum kewarganegaraan yang diskriminatif di banyak negara. Mendaftar sebagai pemilih dan memasukkan suara biasanya disertai dengan waktu menunggu yang lama atau jarak bepergian yang signifikan dan bertentangan dengan tanggung jawab domestik, daftar kerja, mengurus anak, atau kekurangan dana dan kebebasan bergerak yang dialami perempuan. Di negara-negara dengan pendapatan rendah atau menengah, 65-70 persen perempuan dengan disabilitas tinggal di daerah pedesaan, membuat akses ke TPS semakin sulit.¹⁰

Masalah keamanan tentang kekerasan pemilu berdasar gender adalah juga hambatan lain bagi partisipasi politik perempuan. Perempuan dengan disabilitas memiliki tiga kali lebih besar kemungkinan mengalami kekerasan fisik ataupun seksual dibandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas¹¹.

Hambatan sosial dan budaya untuk partisipasi perempuan termasuk kurangnya kesadaran kewarganegaraan dan politik, seringkali akibat dari rendahnya kemampuan baca tulis dan pendidikan di antara perempuan. Tingkat pendidikan rendah yang dihadapi oleh orang-orang dengan disabilitas lebih besar dibandingkan perempuan, dan *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkirakan bahwa meskipun tingkat baca tulis bagi orang-orang dengan disabilitas di dunia adalah 3 persen, bagi perempuan dengan disabilitas tingkat itu 1 persen saja¹².

Tradisi-tradisi budaya yang mengekang kebebasan perempuan atau mengintimidasi perempuan dari mengerahkan pilihan pribadi mereka dapat berakibat dalam *proxy voting*¹³. Bagi perempuan dengan disabilitas yang lebih bergantung pada dukungan keluarga, resiko ini bahkan lebih tinggi lagi.

Praktek Baik

Di Myanmar, IFES memperkuat keterampilan perempuan dengan dan tanpa disabilitas yang adalah pemimpin akar rumput untuk membantu mereka merasa nyaman dan terberdaya untuk mengambil bagian dalam proses transisional dan mengadvokasikan prioritas khusus mereka.

9 Women with Disabilities. United States Agency for International Development. <<http://www.usaid.gov/what-w-do/gender-equality-and-womens-empowerment/w>>

10 "Factsheet: Violence against Women and Girls with Disabilities." Women Watch. United Nations. <[http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/side_events/Fact sheet VAWG with disabilities FINAL .pdf](http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/side_events/Fact%20sheet%20VAWG%20with%20disabilities%20FINAL.pdf)>.

11 The World Bank/Yale University. "HIV/AIDS & Disability: Capturing Hidden Voices." April 2004: 10. <siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Health-and-Wellness/HIV>

12 UN Enable. "UN Enable Factsheet on Persons with Disabilities." United Nations. <<http://www.un.org/disability/>>

13 Proxy voting adalah ketika seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikannya memilih.

Meskipun hak-hak perempuan hampir diakui secara universal dalam hukum, kemajuan partisipasi politik perempuan biasanya tertinggal dibandingkan dengan indikator kemajuan lainnya. Data dan fakta membuktikan bahwa hak politik perempuan belum sepenuhnya dipenuhi. Hukum nasional dan instrumen hukum internasional menjamin hak politik perempuan dan menegaskan kewajiban negara, terutama pemerintah untuk memenuhi hak tersebut. Banyaknya anggota legislatif, penyelenggara pemilu, dan pimpinan partai politik perempuan di seluruh dunia masih sangat kecil, dengan representasi perempuan dengan disabilitas bahkan lebih rendah lagi. Keberadaan perempuan dalam posisi-posisi kepemimpinan bersama dengan rekan-rekan lelaki yang sensitif gender dapat memainkan peran penting dalam memutarbalikkan tren ini. Meskipun sistemnya tidak sempurna, beberapa negara seperti Irak dan Rwanda telah membuat kemajuan signifikan melalui kuota gender dalam badan legislatif. Partisipasi penuh perempuan di kehidupan politik, sosial, dan ekonomi menguntungkan bukan hanya mereka sendiri, tetapi juga keluarga, komunitas, dan negara.

Organisasi Orang-Orang dengan Disabilitas

Pergerakan hak-hak disabilitas dunia didorong umumnya oleh orang-orang dengan disabilitas melalui advokasi dan organisasi. DPO merujuk pada organisasi-organisasi yang dijalankan *oleh* dan *untuk* orang-orang dengan disabilitas. Orang-orang tanpa disabilitas terkadang adalah anggota DPO, tetapi mayoritas keanggotaan dan kepemimpinannya harus memiliki disabilitas agar organisasi tersebut termasuk DPO. DPO ada di hampir semua negara dan seringkali berhimpun sekeliling slogan “bukan tentang kami jika tanpa kami”.

Melibatkan DPO adalah langkah pertama yang teramat penting untuk program inklusif. Mereka membawa pengalaman disabilitas ke dalam rancangan, penerapan, pemantauan, dan evaluasi dari program inklusif dan dapat meningkatkan partisipasi orang-orang dengan disabilitas melalui jaringan mereka. Ada DPO yang spesifik pada disabilitas dan kelompok-kelompok yang memayungi anggota-anggota dari seluruh negara dengan berbagai jenis disabilitas. Ada pula beberapa pengelompokan regional dan internasional seperti *African Youth with Disabilities Network*,¹⁴ *European Disability Forum*¹⁵, dan *International Disability Alliance*¹⁶.



Perempuan-perempuan mencatat dengan Braille selama pelatihan hak kewarganegaraan dan hak pemilu di Myanmar.

Organisasi-organisasi yang bekerja untuk orang-orang dengan disabilitas, tetapi tidak juga melibatkan mereka dalam tingkat keanggotaan, dapat menjadi rekan ormas yang berguna juga. Akan tetapi, lebih baik bekerja dengan DPO untuk memastikan sudut pandang orang-orang dengan disabilitas diikuti dalam rancangan dan penerapan program.

Memetakan Komunitas DPO

Sebelum melibatkan mitra lokal, bertemu kelompok-kelompok tertentu dapat membantu proses. Ini termasuk organisasi-organisasi yang mewakili jenis-jenis disabilitas tertentu, dan juga organisasi-organisasi lintas disabilitas yang mewakili orang-orang dengan semua jenis disabilitas. Kelompok-kelompok berbasis daerah pedesaan seringkali memiliki prioritas dan masalah yang berbeda, dan maka dari itu mereka harus dilibatkan dalam program bersama

14 African Youth with Disabilities Network. <<http://aywdn.wordpress.com>>

15 European Disability Forum [www.edf-feph.org]

16 International Disability Alliance. <<http://www.internationaldisabilityalliance.org/>>

dengan kelompok-kelompok yang berlokasi di perkotaan. Ketika bekerja sama dengan sebuah DPO, ada beberapa faktor yang membutuhkan pertimbangan lebih dan dapat membutuhkan alokasi waktu tambahan untuk memetakan komunitas DPO tersebut.

Bisa jadi masih ada pembagian di dalam komunitas disabilitas berdasarkan dengan pendapat kelompok-kelompok tersebut terkait berbagai isu dan kepentingan mereka dalam aktivisme politik. Seringkali sulit melakukan manuver dalam bentangan DPO. Kelompok-kelompok tertentu dapat merasa lebih baik menghindari tindak politik terang-terangan, karena mereka bergantung pada sumber daya pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan utama mereka. Beberapa DPO bisa jadi memiliki status baik dari ikatan ke partai politik tertentu atau sejarah mereka sebagai penerima utama sumber daya pemerintah. Bisa juga ada ketidaksukaan antara berbagai kelompok yang bersaing untuk sejumlah terbatas sumber daya. Beberapa DPO bergantung pada pendanaan dari donatur atau penyedia bantuan yang stafnya dapat mempengaruhi tindakan dan kerja sama DPO tersebut.

Dalam beberapa kasus, organisasi-organisasi lintas organisasi bisa jadi lebih terbuka untuk ikut serta dalam aktivisme politik dibandingkan dengan SPO yang mewakili konstituensi tunggal. Kelompok-kelompok yang mewakili satu disabilitas seringkali lebih terikat kepada status quo dan tidak melihat keuntungan dari memperkuat suara mereka atau bekerja sama dengan DPO lainnya yang mereka anggap mengambil fokus dan sumber daya dari komunitas mereka. Akan tetapi, ini tidak berarti hanya kelompok lintas disabilitas sajalah yang dapat menjadi rekan yang sesuai dalam program bantuan demokrasi. Ini hanya berarti DPO dapat tidak memiliki insentif dan isu yang sama dalam semua kasus. Dalam berbagai situasi, bisa jadi menguntungkan untuk menyediakan bantuan kepada berbagai kelompok di awal dan kemudian mencari kesempatan-kesempatan tempat kebutuhan dan kepentingan bertemu, dan keuntungan tindakan bersama lebih tampak.

Bisa ada perbedaan antara generasi yang lebih muda dan lebih tua di tingkat niatan mereka untuk ikut serta dalam politik. Ini relevan bagi komunitas disabilitas di konteks-konteks negara tertentu, karena generasi tua lebih berhati-hati meresikokan ikatan politik dan dukungan pemerintah yang ada, dan tidak terlalu mau terlibat dalam organisasi dan usaha lintas disabilitas.

Dasar Hukum untuk Hak-hak Politik Orang-orang dengan Disabilitas¹⁷

Konsep “satu orang, satu suara” adalah salah satu konsep paling mendasar dalam demokrasi. Hak memilih dan hak dipilih menyediakan kesempatan bagi semua orang untuk mempengaruhi keputusan-keputusan dan mempengaruhi hak dasar untuk hidup mereka. Akan tetapi, orang-orang dengan disabilitas telah sering didiskriminasi dalam hal ini.

Dalam pembukaan CRPD pada huruf (h) *Mengakui* bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Upaya untuk meminimalisir terjadinya diskriminasi, penting adanya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan – penyusunan kebijakan yang mengatur tentang pemilihan.

Praktek Baik

Ketika mengidentifikasi rekan untuk program bantuan yang ditargetkan pada komunitas disabilitas di Serbia, NDI menghubungi LSM internasional lainnya yang bekerja dalam isu disabilitas di negara tersebut, termasuk *Handicap International*. Setelah mengidentifikasi sejumlah DPO yang menonjol, DPI menilai yang paling baik posisinya untuk bantuan dalam pembangunan keterampilan politik, dan pada akhirnya bekerja sama dengan organisasi-organisasi lintas disabilitas yang menunjukkan niat dan ketertarikan paling tinggi dalam berhubungan secara politik. Pemetaan awal sebelum memulai program bantuan ini membantu menghindari situasi yang menunjukkan seolah-olah NDI terikat dengan DPO tertentu yang mungkin memiliki reputasi bias politik atau tidak tertarik dengan reformasi.

17 Cuplikan dari standar-standar tersebut ada di Lampiran.

Untuk membuat semua proses pemilu aksesibel, harus ada kerangka hukum yang memastikan bahwa setiap aspek aksesibilitas dalam pemilu terpenuhi. Hukum tersebut mengatur sejak pendataan pemilih disabilitas sampai dengan pengadaan fasilitas untuk menciptakan pemilu yang aksesibel dan bentuk sanksinya jika terjadi pelanggaran.

CRPD adalah standar internasional yang membimbing inklusi disabilitas yang telah ditandatangani oleh 82 persen negara anggota PBB dan diratifikasi oleh 72 persen negara-negara tersebut.¹⁸ Pasal 29 dari traktat tersebut difokuskan pada partisipasi dalam kehidupan politik dan publik. Pasal tersebut menghimbau negara-negara untuk “memastikan bahwa orang-orang dengan disabilitas dapat dengan efektif dan penuh berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik secara setara dengan orang lain, secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih, termasuk hak dan kesempatan orang-orang dengan disabilitas untuk memilih dan dipilih.”

Pasal 12 difokuskan pada kapasitas legal, isu yang seringkali mempengaruhi hak memilih orang-orang dengan disabilitas intelektual ataupun psikososial. Artikel ini meminta pemerintah untuk memastikan bahwa “orang-orang dengan disabilitas berhak diakui di manapun sebagai subjek hukum,” mereka “memiliki kapasitas hukum yang setara dengan orang lain” dan mereka dibolehkan memiliki dukungan dalam menjalankan hak-hak tersebut. Dalam konteks pemilu dan proses politik, ini berarti hak-hak pemilu tidak boleh memiliki ketentuan yang membatasi hak memilih orang-orang yang di bawah perwalian, dan jika seorang pemilih membutuhkan dukungan, ia harus diberi bantuan.

CRPD telah menghasilkan peningkatan fokus pada disabilitas di seluruh dunia. Mereka telah menyediakan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran publik akan hak-hak disabilitas dan, di negara-negara yang telah menandatangani traktat, mendorong BPP dan badan pemerintahan lainnya untuk memenuhi komitmen internasional mereka. CRPD menyediakan ruang politik baru tempat orang-orang dengan disabilitas dapat menuntut akuntabilitas pemerintah dalam isu-isu yang penting bagi mereka. Keberadaan dari dokumen yang diakui secara internasional ini memberi kesempatan bagi DPO untuk mengadvokasikan kepada negara-negara untuk menandatangani, meratifikasi, dan menerapkan secara penuh ketentuan-ketentuan yang dipaparkan dalam konvensi tersebut. Memantau implementasi CRPD dapat juga berujung pada pembicaraan yang lebih luas antara para pengambil keputusan mengenai hambatan-hambatan partisipasi yang dihadapi oleh orang-orang dengan disabilitas di setiap negara dan pengembangan kebijakan umum yang lebih inklusif.

Praktek Baik

DPO pelayang di Zimbabwe menyebarkan salinan CPRD ke semua pejabat BPP tingkat daerah sebagai bagian dari inisiatif untuk mendidik para karyawan mengenai hak-hak orang-orang dengan disabilitas.

CRPD dapat pula membuka ruang untuk keterlibatan politik orang-orang dengan disabilitas selama pemilu. Selain ketentuan-ketentuan yang menjamin hak partisipasi, masyarakat dapat menggunakan standar yang dipaparkan dalam traktat tersebut sebagai titik mulai untuk keikutsertaan substantif dan dasar advokasi seputar isu-isu tertentu. Dengan demikian, CRPD menciptakan lingkungan yang kondusif bagi diskusi politik tentang isu-isu disabilitas yang belum tentu terjadi tanpanya. CRPD memungkinkan masyarakat mbingkai diskusi dalam standar- dan persyaratan internasional yang diterima di bawah kewajiban traktat dan mempersempit kekhususan diskusi. Traktat tersebut menyediakan titik awal untuk interaksi yang substantif dan tidak dangkal.

18 UN Enable. “Convention and Optional Protocol Signatures and Ratifications.” Perserikatan Bangsa-Bangsa. <<http://www.un.org/disabilities/countries.asp?navid=12&pid=166>>. 2013.

Traktat-traktat internasional lainnya – seperti Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights*¹⁹ (ICCPR) dan Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights*²⁰ – juga melindungi hak-hak orang-orang dengan disabilitas untuk memilih dan dipilih.



DPO Meksiko mempresentasikan kepada National Council for Inclusion and Development of Person's with Disability sebelum pemilu 2012.

Akan tetapi, Catatan Umum 25(4) untuk ICCPR mengizinkan negara-negara untuk menolak hak memilih atau menjabat berdasarkan dengan “ketidakmampuan mental”²¹. ICCPR menerima tanda tangan mulai tahun 1966. Tren modern dalam hukum internasional seperti CRPD dan yurisprudensi yang relevan, seperti kasus Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights/ECHR*)– *Kiss v. Hungary*, adalah bukti bahwa hak-hak telah berevolusi, dan norma-norma modern menunjukkan tren yang berlawanan dengan Catatan Umum tersebut. Dalam keputusannya bagi *Kiss v. Hungary*, ECHR merujuk pada hukum kasus yang menyatakan bahwa “Hak memilih

bukanlah hak istimewa. Di abad kedua puluh satu, anggapan dalam negara demokratis haruslah mendukung inklusi...Hak Pilih Universal telah menjadi prinsip dasar.”²²

“ Menurut saya untuk orang-orang dengan disabilitas mampu memilih dan menjadi bagian proses tersebut sangat menghubungkan kami dengan masyarakat, dan kepada kewarganegaraan yang lebih luas dalam negara tempat kami tinggal, dan dengan demikian adalah isu yang sangat serius.”

Charlotte McClain-Nhlapo
Koordinator *Disability Inclusive Development*, USAID

Ada juga standar-standar regional, seperti Deklarasi Bali tentang Peningkatan Peran dan Partisipasi Orang-orang dengan Disabilitas dalam Komunitas ASEAN²³ dan *Venice Commission's Revised Interpretative Declaration to the Code of Good Practice in Electoral Matters on the Participation of People with Disabilities*²⁴.

19 “International Covenant on Civil and Political Rights.” Perserikatan Bangsa-Bangsa. <<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>>.

20 “The Universal Declaration of Human Rights.” Perserikatan Bangsa-Bangsa. <<http://www.un.org/en/documen>

21 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kantor Komisioner Agung Hak Asasi Manusia. General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service (Art. 25). 1996. <[http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb?Opendocument](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb?Opendocument)

22 Alajos Kiss v. Hungary. European Court of Human Rights. 20 Mei 2010. Case of Alajos Kiss v. Hungary. European Court of Human Rights. <<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.asp>

Kebijakan Disabilitas antara Lembaga-Lembaga Bantuan Pembangunan

Banyak lembaga-lembaga bantuan pembangunan telah mengadopsi kebijakan keterlibatan disabilitas lintas sektoral untuk memastikan orang-orang dengan disabilitas terlibat dan terkena dampak positif dari program pembangunan²⁵. Kebijakan-kebijakan tersebut membantu memprioritaskan keterlibatan disabilitas dan menyediakan kerangka kerja untuk memandu tindakan-tindakan dari pelaku pembangunan.

Australian Agency for International Development (AusAID) mengajukan salah satu kebijakan keterlibatan disabilitas yang paling komprehensif tahun 2008 berjudul “Pembangunan untuk Semua”²⁶. Ditulis dengan konsultasi dengan berbagai DPO dan lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di 20 negara penerima bantuan, hasil utama strategi ini adalah untuk “mendukung orang-orang dengan disabilitas untuk memperbaiki kualitas hidup mereka melalui akses yang lebih baik bagi kesempatan-kesempatan untuk partisipasi, kontribusi, pembuatan keputusan, dan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang sama dengan orang lain.” Sebagai bagian dari strategi ini, AusAID juga mengarahkan sumber daya untuk mengurangi halangan yang dapat dicegah dengan program-program yang difokuskan pada area-area seperti keamanan jalan dan kebutaan yang dapat dihindari. Selain kebijakan bertarget ini, AusAID memasukkan “mengembangkan hidup orang-orang dengan disabilitas” sebagai satu dari 10 tujuan pembangunan di kebijakan bantuan Australia. Evaluasi dari *Pembangunan untuk Semua* yang dilakukan tahun 2012 mengungkapkan bahwa pendanaan yang didedikasikan, panduan eksplisit, dan staf yang berdedikasi di Canberra dan berbagai pos di seluruh dunia berujung pada perkembangan yang signifikan dalam hidup orang-orang dengan disabilitas di negara-negara resipien.²⁷

USAID telah memiliki kebijakan disabilitas sejak 1997, menghimbau rekan-rekan dan staf mereka “untuk menghindari diskriminasi akan orang-orang dengan disabilitas dalam program-program yang didanai oleh USAID dan untuk merangsang keterlibatan pihak-pihak dalam negeri, pemerintahan, organisasi pelaksana, dan donor-donor lainnya dalam mempromosikan iklim nondiskriminasi akan dan kesempatan setara bagi orang-orang dengan disabilitas.”²⁸ Kebijakan ini menekankan bahwa: isu-isu yang berhubungan dengan disabilitas adalah integral bagi perkembangan internasional; konsultasi dengan anggota-anggota komunitas disabilitas adalah kritis; dan berinvestasi dalam memperkuat DPO adalah langkah-langkah vital untuk memajukan hak-hak asasi manusia orang-orang dengan disabilitas.

Untuk lebih jauh melembagakan komitmennya untuk pembangunan inklusif, USAID mengeluarkan dua arahan kebijakan:

- Arahan Kebijakan Akuisisi Bantuan (*Acquisition Assistance Policy Directive /AAPD*) 04-17 Mendukung Kebijakan Disabilitas USAID dalam Kontrak, Hibah, dan Perjanjian Kerja Sama: arahan ini dibuat untuk memastikan kontraktor dan penerima hibah menaati, sejauh mungkin dan dalam lingkup penghargaan, Kebijakan Disabilitas US-AID. Ini mengandung bahasa yang harus dimasukkan dalam permintaan dan penghargaan hasil bagi kontrak, hibah, dan persetujuan kerja sama.

23 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. “Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community.” <http://www.asean.org/archive/documents/19th_summit/Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf>.

24 Council of Europe and Venice Commission. “Revised Interpretative Declaration to the Code of Good Practice in Electoral Matters on the Participation of People with Disabilities in Elections.” <[http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD\(2011\)045.asp](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2011)045.asp)>

25 Kompilasi kebijakan-kebijakan keterlibatan disabilitas yang disusun oleh Mobility International tersedia di: http://www.miusa.org/idd/resources/dispolicies/index_h

26 Australian Agency for International Development. “Development for All: Towards a disability-inclusive Australian aid program 2009-2014.” <http://aid.dfat.gov.au/Publications/Pages/8131_1629_9578_8310_297.asp>

27 Linda Kelly dan Lorraine Wapling. Australia. Australian Agency for International Development. AusAID Development for All Strategy: Mid-Term Review. 2012. <<http://aid.dfat.gov.au/aidissues/did/Documents/dfa-mtr>>

- AAPD 05-07 Mendukung Standar Aksesibilitas USAID bagi Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Kontrak, Hibah, dan Persetujuan Kerja Sama: Arahan ini menyaratkan ketentuan dalam tiap kontrak, hibah, dan persetujuan kerja sama yang mewajibkan ketaatan akan standar-standar aksesibilitas bagi orang-orang dengan disabilitas dalam semua struktur, bangunan, atau fasilitas yang dihasilkan dari konstruksi atau perubahan maupun konstruksi baru atau renovasi.

USAID juga memiliki *Listserv* Juara Disabilitas, yang mendorong staf di kantor pusat dan level misi untuk berbagi pelajaran dan meminta panduan untuk praktek inklusif disabilitas.

Kantor-kantor pemerintahan AS lainnya juga menggarisbawahi pentingnya melibatkan orang-orang dengan disabilitas dalam aktivitas mereka. Biro Demokrasi, HAM, dan Buruh Departemen Negara AS (*U.S. Department of State's Bureau of Democracy, Human Rights and Labor /DRL*) secara khusus menyebut keterlibatan disabilitas dalam kriteria tinjauan proposalnya. Bagian "Pemantauan dan Evaluasi Program" menganjurkan memilah data dengan disabilitas. "Kualitas Ide Program" menyatakan bahwa program-program harus memajukan hak-hak "populasi yang paling beresiko dan rawan, termasuk perempuan, orang-orang dengan disabilitas..." DRL adalah contoh donor yang baik yang menggarisbawahi kepentingan keterlibatan disabilitas dalam aktivitas, tujuan, dan target, dan mengerahkan kebijakan ini dengan memberi penghargaan poin tambahan bagi proposal yang inklusif.

Serupa dengan itu, di Kantor Kerja Sama Pembangunan Internasional Swedia (*Swedish International Development Cooperation Agency/SIDA*) melembagakan kebijakan inklusi tahun 2009 berjudul *HAM bagi Orang-Orang dengan Disabilitas*²⁹. Tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan ini adalah untuk menghormati hak-hak asasi manusia bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dengan disabilitas dan untuk menyediakan kesempatan lebih baik dan cakupan untuk meningkatkan kondisi hidup mereka dalam negara-negara yang melaksanakan kerja sama pembangunan dengan Swedia. Kebijakan ini menghimbau pertimbangan orang-orang dengan disabilitas di dalam pekerjaan dan proses pengambilan keputusan SIDA. Ini juga termasuk bahasa untuk memastikan personel dan pelaksana SIDA memiliki pemahaman dan pengetahuan lebih jauh akan situasi HAM dan kondisi hidup orang-orang dengan disabilitas. Kebijakan ini melambungkan usaha untuk mengoperasikan pernyataan dalam kebijakan umum berbasis hak Swedia mengenai pembangunan global bahwa "sudut pandang hak-hak melibatkan fokus bagi yang didiskriminasi, termasuk individu dan kelompok terpinggir. Orang-orang, tanpa memandang gender, usia, etnisitas, maupun orientasi seksual, harus dapat menikmati hak-hak mereka." Penting diingat bahwa kebijakan ini dikembangkan sebagai tindak lanjut dari analisis bahwa *position paper* SIDA tahun 2005, *Anak-anak dan Orang Dewasa dengan Disabilitas* belum menghasilkan dampak yang cukup dalam memastikan keterlibatan disabilitas dalam kerja kantor ini. Evaluasi berkala dari dampak kebijakan dan peningkatan yang mengikutinya adalah aspek kunci lainnya dari kebijakan SIDA.

Dana Hak-Hak Disabilitas (*Disability Rights Fund*), sebuah kolaborasi dari donor dan komunitas disabilitas, telah mengembangkan *Lebih dari Amal: Panduan Inklusi bagi Donor*³⁰. Buku ini menjabarkan cara memaksimalkan CRPD dan cara donor dapat menggunakan pendekatan berbasis hak-hak untuk menghadapi disabilitas dalam program-program pembangunan internasional.

Menembus Hambatan

Seperti telah dinyatakan sebelum-nya, orang-orang dengan disabilitas memiliki keinginan dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Meski demikian, mereka

28 United States Agency for International Development. Bureau for Policy and Program Coordination. USAID Disability Policy Paper. Washington, D.C. 1997. <http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PD

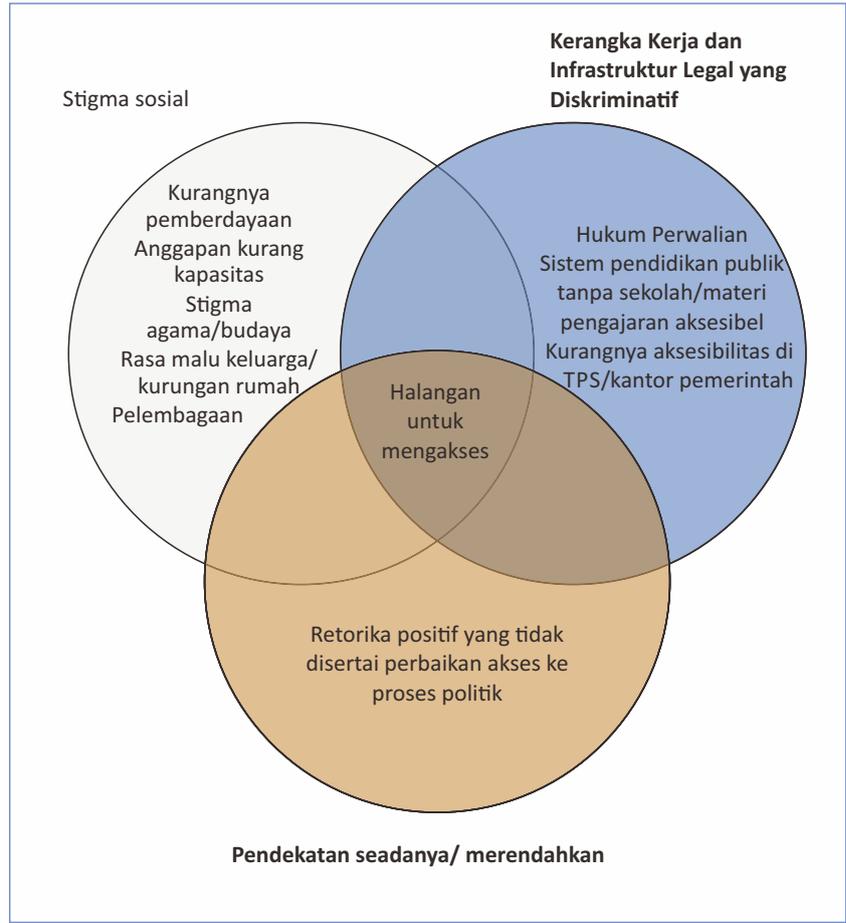
29 Anette Dahlström, Charlotta Bredberg, Lina Lindblom, Christine Lundberg, Johan Norqvist dan Camilla Ottosson. Sida. Human Rights for Persons with Disabilities. Sida, 2009. <http://sidapublications.citat.se/interface/str_mabstream.asp?filetype=1&orderlistmainid=294&printfileid=294&file

seringkali menghadapi hambatan-hambatan yang membatasi atau mencegah akses mereka. Gambar 3 menyebutkan hambatan-hambatan umum yang dihadapi banyak orang dengan disabilitas, dikelompokkan dalam stigma masyarakat, kerangka kerja/ infrastruktur hukum diskriminatif, dan pendekatan-pendekatan merendahkan oleh pengambil keputusan. Beberapa hambatan adalah unik bagi daerah-daerah tertentu. Misalnya, dalam beberapa konteks Afrika, disabilitas terkadang dianggap sebagai kutukan akibat kesalahan masa lalu.

Selain hambatan-hambatan unik tersebut, orang-orang dengan disabilitas juga menghadapi tantangan-tantangan yang sama yang dihadapi warga negara lainnya. Dalam banyak demokrasi yang baru dan sedang naik, sebagian besar populasi kurang berpengalaman dalam memilih dan bentuk-bentuk lain partisipasi politik.

Serupa dengan itu, legislatif dan partai-partai politik mungkin tidak menjangkau masyarakat dalam pengembangan kebijakan atau menghargai peran masyarakat sipil dalam memantau lembaga pemerintahan. Dalam situasi-situasi seperti ini, ruang politik terbatas dan kurangnya akuntabilitas pemerintah berdampak negatif bagi semua warga negara, tanpa memandang disabilitas. Program demokratisasi yang didasarkan pada inklusi lebih baik orang-orang dengan disabilitas harus dilibatkan, dengan demikian, mempertimbangkan tantangan lingkungan secara umum dan mempertimbangkan peran yang dapat dimainkan oleh orang-orang dengan disabilitas dalam membantu demokrasi berkembang dan bertambah dalam.

Gambar 3: Hambatan yang Dihadapi Orang-Orang dengan Disabilitas



“ Yang sangat penting adalah orang-orang dengan disabilitas dilihat sebagai bagian dari sebuah keseluruhan, dan pemerintah dan masyarakat sipil mengenali kebutuhan untuk memiliki sebanyak mungkin orang untuk berpartisipasi dalam pemilu, untuk bisa benar-benar memilih. [Ini] adalah yang sesungguhnya anda kejar. ”

Judith Heumann
 Penasihat Khusus untuk Hak-Hak Disabilitas Internasional, Departemen Negara AS

30 Bruce Downie and Lorraine Wapling. “Beyond Charity: A Donor’s Guide to Inclusion.” Disability Rights Fund.<http://www.disabilityrightsfund.org/files/beyond_charity._a_donors_guide_to_inclusion.pdf>.

Strategi-strategi untuk Mendukung Proses Pemilu dan Politik Inklusif

Bagian dua sampai empat dari manual ini membahas siklus pemilu. Tiap bagian mewakili tahapan berbeda dari siklus pemilu dan membahas tantangan-tantangan khusus yang dihadapi orang-orang dengan disabilitas pada saat itu. Usulan-usulan diberikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan memperkuat keterlibatan politik.

Sebagian besar intervensi ini difokuskan pada empat strategi yang saling mendukung.

1. Memberdayakan Orang-Orang dengan Disabilitas

Orang-orang dengan disabilitas dan DPO adalah rekan-rekan yang vital dalam program berfokus pemilu dan proses politik. DPO menyediakan landasan untuk memobilisasi orang-orang dengan disabilitas dan mewakili kepentingan orang-orang dengan disabilitas. Mereka harus dilibatkan selama siklus program, termasuk rancangan, penerapan, dan tahapan pemantauan dan evaluasi. Agar efektif, banyak DPO dapat mendapatkan untung dari berlatih dalam berbagai aspek sistem pemilu dan struktur pemerintah. Pambangunan kapasitas untuk mengembangkan keterampilan organisasi dasar, seperti manajemen dan hubungan publik, juga keterampilan advokasi yang membantu DPO berinteraksi dengan pejabat pemerintah, media, organisasi internasional, dan kelompok-kelompok lainnya adalah berguna. Pelatihan ini dapat termasuk cara membangun aliansi dan menggalang dukungan finansial. Bantuan ini dapat membangun profil politik DPO dan membantu mereka memasukkan isu mereka ke dalam agenda politik. Proses pemilu dan politik juga akan diperkuat jika donor internasional dan rekan penerapan mempekerjakan orang-orang dengan disabilitas sebagai pegawai, khususnya di posisi kepemimpinan.

2. Mendukung Lembaga-Lembaga Pemerintah

Program-program yang menyediakan dukungan bagi lembaga-lembaga pemerintah seperti legislatif dan BPP menyediakan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi politik orang-orang dengan disabilitas. Dalam menyediakan bantuan teknis untuk badan-badan pemerintah yang membuat kerangka kerja legal, program pengembangan demokrasi dapat membangun keterampilan institusi-institusi tersebut untuk melaksanakan penilaian akan hak-hak komunitas disabilitas atau dampak dari kebijakan yang diusulkan bagi komunitas tersebut. Program-program dapat juga mendorong badan-badan pemerintah untuk bekerja sama dengan DPO sebagai bagian dari usaha mereka, mempromosikan pandangan dari orang-orang dengan disabilitas sebagai warga negara berdaya yang harus dilibatkan dalam masalah yang mempengaruhi hidup mereka. DPO juga harus didukung dengan langsung menjangkau pemangku kepentingan pemerintah. Membangun kesadaran ini di antara pembuat keputusan adalah langkah kunci dalam memungkinkan partisipasi penuh orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan politik dengan mengubah hukum dan kebijakan yang meminggirkan.

Tidak kalah pentingnya adanya induksi tentang isu disabilitas kepada penyelenggara pemilu (KPU - KPPS), sejak dini, sehingga ketika dimulainya tahapan pemilu pendataan pemilih, sosialisasi, pendidikan pemilih sampai dengan pemungutan suara, sebagai upaya untuk memastikan penyelenggara pemilu sudah memasukkan orang-orang dengan disabilitas dalam setiap tahapan pemilu. Pemerintah sebagai penyedia budget dalam proses penyelenggaraan demokrasi dapat memastikan akses informasi yang seluas-luasnya dalam rangka mendorong partisipasi kelompok orang-orang dengan disabilitas sebagai pemilih cerdas yang dapat menggunakan hak pilih mereka secara cerdas. Sistem yang selama ini belum berpihak, infrastruktur yang kurang aksesibel, kurangnya informasi, hingga partisipasi politik yang belum setara bagi orang-orang dengan disabilitas masih menjadi potret buram penyelenggaraan pemilu periode-periode sebelumnya.

3. Melibatkan Rekan-Rekan DPO dalam Koalisi ORMAS

Program-program pelurusan demokrasi sekitar pemilu sering melibatkan dukungan teknis dan finansial bagi jaringan dan koalisi yang melakukan aktivitas, seperti pengawasan pemilu domestik atau pendidikan pemilih. Usaha-usaha ini penting dalam membantu warga negara memiliki suara yang lebih berilmu dan dalam mempromosikan proses pemilu kredibel. Melibatkan DPO dalam jaringan dan koalisi ini memiliki beberapa fungsi. Satu, ini memungkinkan DPO untuk mendapatkan pengalaman dan belajar praktek terbaik dari ORMAS

sementaranya. Anggota DPO mendapatkan keterampilan dalam mengenali isu dan membuat kampanye, dan sering menjadi lebih percaya diri karena telah bekerja dengan organisasi setaranya. Rasa harga diri yang lebih baik ini sangatlah penting dalam menginspirasi DPO untuk melanjutkan kerja sama politik dan bergerak ke dalam peran-peran kepemimpinan. Dua, interaksi ini mendorong rekan koalisi lainnya untuk mengambil pendekatan yang lebih aktif untuk mendukung komunitas disabilitas dan mengambil sudut pandang introspektif akan usaha inklusi internal mereka sendiri. Misalnya, ORMAS yang berfokus pada pemuda dapat menemukan kekurangan dalam pemahamannya akan pemuda dengan disabilitas, atau DPO dapat mengenali kebutuhannya untuk memperluas kepemimpinannya untuk menaruh lebih banyak perempuan di posisi kepemimpinan. Pada akhirnya, inklusi DPO dalam koalisi-koalisi ini memperkuat praktek mencari masukan dari komunitas disabilitas dan mempromosikan citra orang-orang dengan disabilitas sebagai warga negara yang mampu dan berdaya.

Praktek Baik

The General Election Network for Disability Access in Southeast Asia (AGENDA) menyatukan DPO dan organisasi pengawas pemilu dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Thailand untuk melakukan penelitian, pengawasan pemilu yang difokuskan pada aksesibilitas, dan advokasi dengan pejabat nasional dan ASEAN. Rekan-rekan AGENDA bertemu langsung secara tahunan, dan berbagi praktek terbaik melalui edaran dan peralatan multimedia sepanjang tahun.

4. Membantu Partai Politik dalam Melaksanakan Jangkauan ke Orang-orang dengan Disabilitas

Bantuan pengembangan yang diarahkan ke partai politik juga menyediakan bukan untuk memajukan inklusi orang-orang dengan disabilitas. Dalam program-program yang dirancang untuk membantu partai-partai politik dalam aktivitas seperti visi misi pengembangan, pelatihan anggota partai/calon pejabat, atau membuat strategi kampanye pemilu, organisasi bantuan demokrasi dapat menghubungkan partai dengan DPO untuk mempromosikan usaha jangkauan ke orang-orang dengan disabilitas dalam isu-isu yang mempengaruhi mereka. Mendukung partai dalam usaha-usaha jangkauan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran mereka akan hak-hak disabilitas, tetapi juga mendorong mereka untuk memasukkan input dari masyarakat selama periode kampanye dengan lebih luas, dan dengan demikian meningkatkan ruang untuk partisipasi politik setiap warga negara. Partai politik harus juga didorong untuk melibatkan orang-orang dengan disabilitas sebagai calon dan dalam posisi kepemimpinan dalam partai.

Partai politik yang menjadi peserta pemilu merupakan wadah untuk berpolitik. Strategi yang harus dimanfaatkan bahwa orang-orang dengan disabilitas harus mengambil peluang/ kesempatan dalam menyampaikan aspirasi maupun menyampaikan hak asasi manusia orang dengan disabilitas melalui partai politik.

Diantara partai politik dengan orang-orang dengan disabilitas, diharapkan dapat saling memberikan kontribusi dan saling membutuhkan. Partai politik membutuhkan konstotuen dan orang-orang dengan disabilitas membutuhkan wadah untuk menyampaikan aspirasi.

Siklus Pemilu

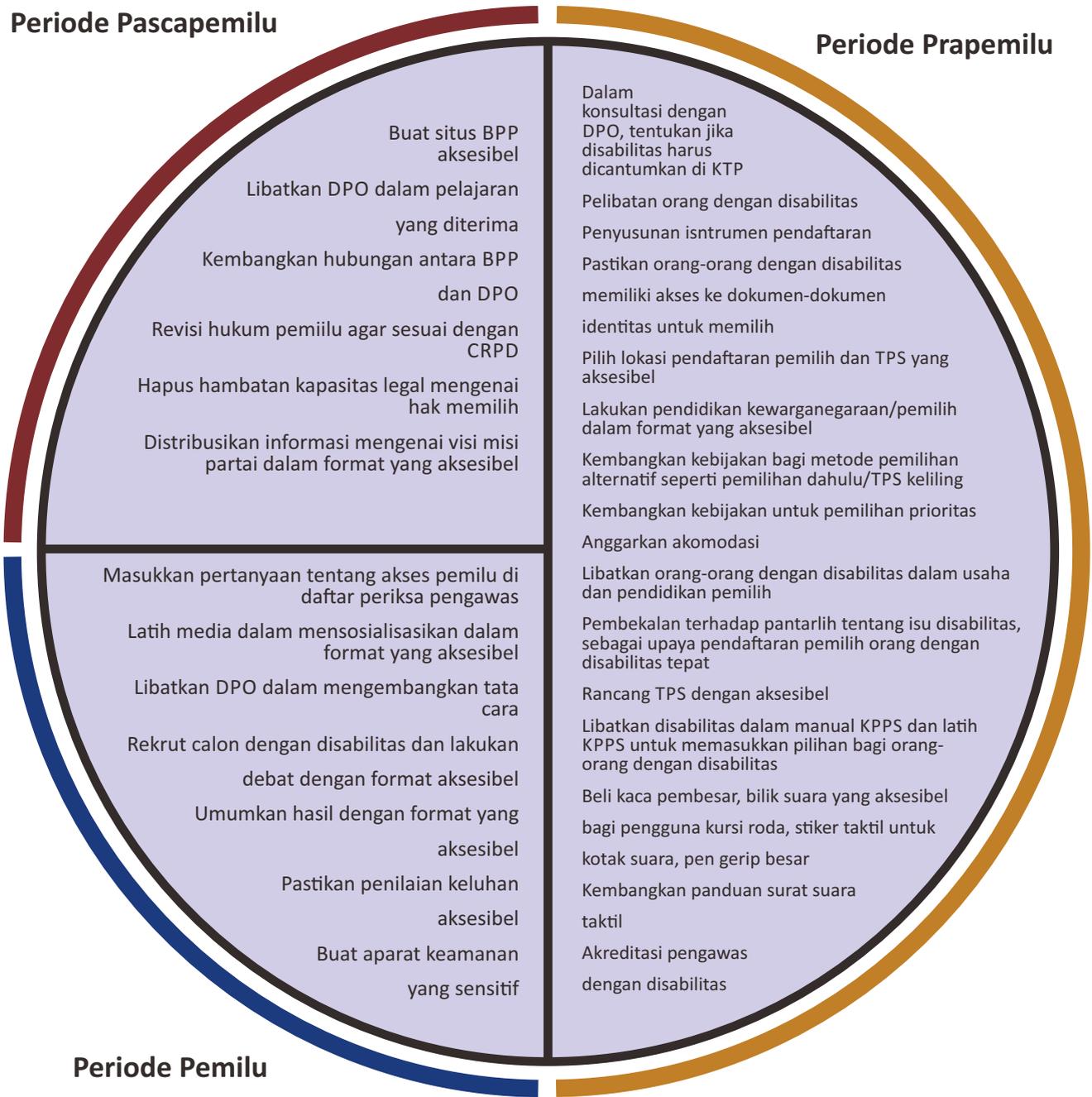
Untuk dapat membayangkan lebih baik komponen-komponen yang saling berkaitan dari proses pemilu, dan juga kebutuhan dari pembangunan dan kesempatan untuk inklusi, manual ini akan disusun sekeliling siklus pemilu. Siklus pemilu memberikan kerangka kerja untuk analisis dan mengembangkan strategi bantuan yang mendukung proses pemilu yang lebih terbuka, inklusif, dan kredibel. Ini dapat dibagi secara kasar menjadi tiga periode yang saling tumpang tindih: prapemilu, pemilu, dan pascapemilu.

Seperti digambarkan pada diagram berikut, titik awal dan akhir siklus tidak tetap dan setiap periode disusun sekeliling aspek-aspek dasar yang berbeda yang membantu memastikan proses pemilu yang lebih berkelanjutan.

Misalnya, periode prapemilu adalah waktu untuk perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelatihan, dan pendaftaran. Periode pemilu adalah waktu untuk kampanye, pemilihan, penghitungan, dan keluhan. Periode pascapemilu adalah waktu untuk tinjauan, reformasi, dan strategi. Diagram ini menyediakan contoh yang menggambarkan pemangku kepentingan tertentu dan tindakan yang dapat didukung selama tiap periode, sembari mengakui beberapa elemen yang melintas seluruh siklus, seperti pendidikan kewarganegaraan dan keterlibatan masyarakat.

Program-program yang meningkatkan partisipasi politik orang-orang dengan disabilitas selama pemilu dapat membahas baik hambatan aksesibilitas selama dan kekurangan kemampuan DPO mengerahkan kekuatan dan pengaruh. Aksesibilitas adalah langkah pertama yang kritis untuk mengurusutamakan orang-orang dengan disabilitas ke dalam kehidupan politik. Pemilu juga menyediakan berbagai kesempatan bagi DPO untuk mengangkat profil politik mereka dengan meningkatkan diskusi antara calon dari isu-isu yang penting bagi orang-orang dengan disabilitas, meningkatkan hubungan dengan pembuat kebijakan, dan memperkuat kapasitas DPO untuk melaksanakan kampanye advokasi dengan aktor-aktor lain. Pendekatan ganda ini dapat menjadi dasar untuk keterlibatan politik yang lebih substantif mengikuti pemilu.

Gambar 4: Siklus Pemilu





Seorang fasilitator komunitas memimpin sesi pendidikan pemilih untuk pemilih dengan disabilitas di Nepal.

Bagian 2: Periode Prapemilu

Hambatan Potensial

- Penilaian teknis pra-pemilu tidak menyinggung masalah akses
- Hukum Pemilu yang diskriminatif
- Anggaran BPP tidak dialokasikan untuk akomodasi selayaknya
- Pemilihan TPS yang tidak aksesibel
- KPPS tidak dilatih untuk melakukan pemberian suara untuk orang-orang dengan disabilitas
- Kesulitan dalam mendapatkan KTP nasional
- Pendaftaran pemilih dilakukan pada lokasi yang tidak aksesibel,
- Data pemilih yang tidak ada pemilih disabilitas
- Pendidikan pemilih dan informasi tentang visi/misi partai politik/kandidat tidak didistribusi dalam format yang aksesibel
- Orang-orang dengan disabilitas tidak dilibatkan sebagai pengamat
- DPO kurang berpengalaman dalam advokasi hak-hak politik

Periode pra pemilu berfokus pada persiapan pemilu. Dalam membantu perencanaan pemilu yang aksesibel. Program bantuan tidak bisa menunggu sampai dekat hari pemilu dan semua kerangka siap terpasang. Tokoh-tokoh pemangku kepentingan harus memanfaatkan periode pra pemilu untuk membuat persiapan yang akan meningkatkan proses dalam periode pemilu. Beberapa provisi akan perlu sumber pendanaan, dan yang lain lagi tidak perlu tambahan biaya asalkan direncanakan di muka dan beberapa aktifitas tidak berpengaruh pada biaya.

Bagian ini akan menyoroti peran dan tanggung jawab BPP dan LSM selama masa kritis pra pemilu, dengan berfokus pada kegiatan berikut ini:

- Melakukan penilaian teknis pra pemilu
- Mendisain dan merancang hukum dan peraturan pemilu
- Perencanaan finansial dan administratif
- Merekrut dan melatih staf pemilu
- Perencanaan dan perolehan keperluan pemilu
- Melakukan pendaftaran pemilih dan pendaftaran partai politik dan kandidat
- Implementasi kampanye pendidikan pemilih
- Akreditasi pengawas pemilu

Praktek Baik

Tahun 2003, Badan Konstitusi Slovenia meninjau kembali Hukum Pemilu untuk Parlemen Slovenia, Hukum Pemilihan Presiden dan Hukum Pemilihan Daerah. Hukum tersebut yang hanya mendaftarkan orang yang berkapasitas legal penuh ditinjau apakah sejalan dengan undang-undang. Badan Konstitusi memutuskan bahwa hukum pemilu tersebut tidak konstitusional, menetapkan: “kapasitas memberikan suara tidak mungkin disamakan dengan kapasitas legal³¹.”

31 *Official Journal of the Republic of Slovenia*. 73.29 (2003): 11212-11216.

Penilaian melalui Lensa Disabilitas

Langkah pertama dalam menetapkan hambatan dan kemungkinan intervensi adalah dengan melakukan penilaian. Penilaian teknis pra pemilu yang meninjau semua aspek proses pemilihan harus juga menganalisa setiap area melalui lensa disabilitas. Selain memasukkan analisa disabilitas dalam penilaian umum, dengan melakukan penilaian terpisah yang semata-mata berfokus pada inklusi disabilitas, donatur dan pelaku implementasi akan terbantu dalam menghadapi hambatan spesifik yang menghadang komunitas ini. Regu penilai harus bertemu dengan DPO untuk mendapatkan perspektif mereka akan hambatan-hambatan ini dan rekomendasinya untuk mengatasinya. Bahkan jika suatu negara belum meratifikasi CRPD, rekomendasi perbaikan yang bagaimanapun akan sejalan dengan Pasal 29 dari traktat itu. Pertemuan dengan DPO juga akan memberi kesempatan pada penyedia bantuan dan donatur dalam menilai kapasitas mereka dan mengidentifikasi area dukungan yang dibidik. DPO dapat sebagai mesin penggerak orang-orang dengan disabilitas dalam memperoleh hak nya, mendesak kebijakan dan menyampaikan usulan afirmatif action.

Reformasi Hukum Pemilu

Kerangka hukum dan peraturan adalah salah satu elemen terpenting dalam proses pemilu, karena menetapkan parameter partisipasi pemilu, dan mendefinisikan kebijakan yang mengatur partisipasi tersebut.

Meski telah banyak perkembangan positif di seluruh dunia dalam meningkatnya akses pada proses pemilu bagi orang-orang dengan disabilitas secara umum, namun orang dengan disabilitas intelektual atau psikososial masih sering distigmatisasi. Mereka sering menghadapi pembatasan pada haknya memilih hanya karena disabilitasnya atau fakta bahwa mereka masuk dalam kategori dibawah pengampuan/ perwalian/ pengasuhan. Hal-hal ini sedang diperdebatkan di Amerika Serikat misalnya, ada 12 negara bagian yang mengizinkan warga yang dalam pengasuhan untuk memberikan suara. Pasal 12 CRPD mensyaratkan bangsa-bangsa mengakui bahwa “orang-orang dengan disabilitas memiliki kapasitas legal setara dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan,” termasuk hukum Pemilu³².

Dalam Desember 2011, kantor United Nations High Commissioner for Human Rights mengeluarkan laporan partisipasi orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan politik dan kehidupan publik³³. Laporan itu mendapati bahwa dalam



Poster di Armenia dengan slogan: “Masyarakat setara adalah masyarakat sehat.”

32 United Nations. “Article 12 - Equal recognition before the law.” Convention on the Rights of Persons with Disabilities. <<http://www.un.org/disabilities/def>

33 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. “Thematic study by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on participation in political and public life by persons with disabilities.” United Nations, Desember 21, 2011. <<http://www.ohchr.org/DocumenSubmissionThematicStudy/A.HR>

banyak negara yang ditelaah, kebanyakan orang dengan disabilitas intelektual atau psikososial diambil haknya untuk memilih dan dipilih berdasarkan provisi undang-undang atau hukum yang mengikatkan hak-hak ini pada kapasitas legal. Laporan ini menyimpulkan bahwa restriksi tersebut “tidak konsisten dengan kewajiban bahwa Negara-negara Bagian telah lakukan dalam Pasal 2, 12 dan 29 dari Konvensi, dan harus dilenyapkan secepatnya dari perundangan nasional dan dari prakteknya.”³⁴

Bahkan di negara-negara yang telah mengambil langkah-langkah untuk menyejajarkan hukum mereka dengan CRPD, seperti Ghana, masih banyak yang harus dikerjakan. Tahun 2012, pemerintah Ghana meloloskan Kebijakan Kesehatan Mental yang melindungi hak-hak sipil dan politik orang-orang dengan disabilitas psikososial. Meski hukum baru ini memungkinkan pasien rumah sakit psikiatri untuk memilih presiden, kebijakan pendaftaran pemilih mencegah sebagian pemilih untuk memilih calon daerah, seperti anggota parlemen, jika terdaftar di konstituensi yang berbeda dengan lokasi rumah sakit.

Hukum pemilu dapat juga mempengaruhi kebijakan terkait memilih dengan asisten. Dalam beberapa kasus, pemilih dengan disabilitas dapat meminta bantuan ketika memilih. Pilihan asisten dapat berdampak pada kerahasiaan dan keamanan pilihan, karena asisten dapat melakukan intimidasi atau memanipulasi pemilih. Untuk memitigasi resiko ini, DPO yang berpartisipasi dalam proses perancangan CRPD menegosiasikan syarat bahwa pemilih dengan disabilitas diberi izin dibantu oleh “asisten yang mereka pilih sendiri” di Pasal 29 CRPD. Akan tetapi, banyak negara yang melanggar arahan ini dan hanya mengizinkan KPPS untuk membantu pemilihan.

Hukum pemilu dapat juga menentukan tindakan sementara untuk TPS yang tidak aksesibel ketika tidak memungkinkan membuat semua TPS aksesibel tepat waktu untuk pemilu. Meski tujuan akhirnya haruslah untuk membuat semua TPS aksesibel, jika sebuah TPS belum aksesibel, prosedur seperti pemilihan terdahulu dan kotak suara keliling dapat menyediakan akses yang lebih besar. Kedua ketentuan ini terkadang mengangkat kekhawatiran akan kecurangan dan/atau keamanan, maka menyediakan bilik suara terpisah di lantai dasar dapat membantu mengurangi kekhawatiran ini. Meski ketentuan-ketentuan tersebut dapat membantu sebagai solusi jangka pendek atau transisional, tidak dapat digunakan sebagai alternatif permanen untuk membuat semua TPS aksesibel.

Beberapa hukum pemilu menetapkan bahwa hanya orang-orang yang dapat berbicara dengan bahasa ibu negara dapat mencalonkan diri. Ketentuan seperti ini dapat menyisihkan calon yang tuna rungu dan tidak menggunakan bahasa lisan.

Untuk memitigasi hambatan yang disebabkan oleh hukum-hukum pemilu yang diskriminatif, donor internasional dan organisasi pelaksana dapat mendukung tinjauan hukum-hukum pemilu, menyediakan contoh regional, dan membantu dalam merancang hukum yang lebih inklusif. Misalnya di Mesir, IFES melaksanakan tinjauan hukum pemilu dan menyediakan komentar untuk BPP terkait cara hukum tersebut membatasi hak-hak pemilih dengan disabilitas. Sebuah kelompok organisasi-organisasi lokal lalu mengusung kampanye kesadaran yang membuat *Egyptian Human Rights Council* berkomitmen untuk menetapkan panitia disabilitas, menyediakan kesempatan untuk mengamankan hak-hak orang-orang dengan disabilitas.

Praktek Baik

Di Guatemala, BPP merekrut sukarelawan dengan Down Syndrome untuk membungkus bahan pemilu. BPP menampilkan sukarelawan ini dalam materi promosi dan iklan layanan masyarakat, sehingga membiasakan masyarakat umum akan kemampuan orang-orang dengan disabilitas.

34 Ibid

Hukum-hukum pemilu inklusif harus memiliki sifat-sifat berikut:

- Hak pilih universal, termasuk orang di bawah perwalian
- Tidak ada syarat medis atau bahasa bagi calon maupun pemilih
- Fleksibilitas untuk mencari solusi kreatif untuk TPS yang tidak aksesibel, dengan tujuan akhir aksesibilitas permanen
- Hak untuk memilih rahasia, dan, jika diinginkan, untuk dibantu oleh orang yang dipilih oleh pemilih
- Penyediaan akomodasi yang wajar, seperti panduan surat suara taktil.

Administrasi Pemilu Inklusif

BPP harus didukung dalam periode prapemilu untuk membuat prosedur mereka aksesibel ketika lebih mudah dan hemat biaya untuk membuat “akomodasi wajar”. Pasal 2 CRPD mendeskripsikan akomodasi wajar sebagai modifikasi dan penyesuaian yang pantas dan dibutuhkan yang tidak menyebabkan beban yang tidak proporsional atau berlebihan. Ini untuk memastikan orang-orang dengan disabilitas dapat mengerahkan hak asasi dan kebebasan fundamental mereka pada dasar yang sama dengan lainnya. Misalnya, merancang surat suara dengan gambar calon dan/atau simbol partai membuat lebih mudah untuk pemilih dengan disabilitas intelektual untuk mengenali pilihan-pilihan berbeda. Akan tetapi, keputusan untuk memasukkan gambar harus ditimbang akan diskriminasi potensial yang dapat terjadi karena etnisitas atau gender.

Proses penganggaran dan pengembangan rencana strategis BPP harus mempertimbangkan inklusi disabilitas. Cara mudah untuk memastikan sudut pandang disabilitas dilibatkan dalam tahap krusial ini adalah untuk mempekerjakan orang-orang dengan disabilitas sebagai pejabat BPP. Semua pejabat BPP harus menerima pelatihan untuk standar internasional, seperti yang tercantum di CRPD, dan pelatihan tentang cara untuk melibatkan orang-orang dengan disabilitas dalam proses pemilihan. Dalam pelatihan-pelatihan selalu diikuti dengan simulasi penggunaan alat bantu mobilitas orang dengan disabilitas.

Mendorong pemerintah untuk menghitung banyaknya orang-orang dengan disabilitas dalam sensus mereka menyediakan data yang relevan bagi penyelenggara pemilu. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan standar, seperti yang ada di *Washington Group*, dapat membantu membentuk sistem pengumpulan data. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu karena menanyakan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi orang-orang dengan disabilitas dan bukan pertanyaan tentang jenis disabilitas tertentu. Metode ini lebih efektif karena beberapa orang bisa jadi tidak ingin mengungkapkan disabilitas tertentu mereka dan definisi disabilitas dapat berbeda sesuai dengan konteks negara. Dari sudut pandang BPP, pertanyaan-pertanyaan ini menyederhanakan proses mengenali jenis akomodasi yang dibutuhkan seorang

Praktek Baik

Di bawah ini adalah contoh pertanyaan sensus mengenai disabilitas yang didukung oleh *Washington Group*:

1. Apakah anda kesulitan melihat bahkan ketika memakai kaca mata?
 - a. Tidak – tidak kesulitan
 - b. Ya – sedikit kesulitan
 - c. Ya – sangat kesulitan
 - d. Tidak bisa sama sekali



BPP dan DPO melaksanakan diskusi meja bundar bersama mengenai mengintegrasikan orang-orang dengan disabilitas ke dalam proses pemilu di Libya.

pemilih. Contohnya, mereka tidak perlu tahu bahwa pemilih memiliki cedera sumsum tulang belakang; mereka hanya perlu tahu bahwa TPS pemilih harus aksesibel.

Tempat Pemungutan Suara

Kebanyakan pemungutan suara dilakukan di bangunan umum, seperti sekolah dan pusat komunitas. Bangunan-bangunan ini seharusnya sudah aksesibel bagi orang-orang dengan disabilitas. Akan tetapi, di banyak negara tidaklah demikian. BPP dan DPO dapat mendapatkan manfaat dari pelatihan cara mengenali hambatan di TPS dan membuat perbaikan untuk memastikan bangunan lebih aksesibel. Hambatan dapat ditemukan di dalam (seperti penerangan redup) ataupun di luar (seperti tangga yang menjadi satu-satunya cara masuk). Hambatan yang lain bahwa lokasi TPS yang sering berpindah tempat, setiap ada penyelenggaraan pemilu, bisa jadi lebih dekat atau lebih jauh dari tempat tinggal dan belum menjamin aksesibilitasnya.

Banyak DPO di seluruh dunia telah merancang solusi kreatif untuk memperbaiki aksesibilitas TPS. Tahun 2012, *Georgian Coalition for Independent Living* melaksanakan survei *door-to-door* untuk menentukan tempat orang-orang dengan disabilitas tinggal di negara tersebut. Mereka lalu mengumpulkan informasi ini ke BPP dengan pilihan TPS dan distribusi alat bantu.



Pemilih diwawancarai oleh media di luar sebuah TPS Georgia

Tahun 2009, *Lebanese Physical Handicap Union* dan IFES bekerja sama dengan firma *geographic information system (GIS)* untuk melaksanakan aktivitas pemetaan untuk menentukan lokasi-lokasi TPS yang tidak aksesibel dan memasukkan informasi ini ke dalam basis data yang dibagi dengan pemerintah dan diunggah keinternet. Proyek ini menilai TPS sesuai enam standar aksesibilitas, termasuk parkir, pintu masuk, dan ketersediaan ruang kecil. Akibat usaha ini, pemerintah menyediakan dana untuk membuat 18 bangunan aksesibel sebelum pemilu.

Di Armenia, kampanye tahun 2007 untuk membangun jalan miring untuk TPS disertai oleh kampanye pendidikan pemilih yang menargetkan pemilih dengan dan tanpa disabilitas. Paros, sebuah DPO lokal, membuat sebuah video³⁶ yang menggarisbawahi perkembangan yang dibuat dan kebutuhan akan jalan miring tambahan. Akibat kampanye ini, sebuah partai politik mendanai konstruksi jalan miring tambahan. Lokasi dipilih oleh DPO untuk memastikan bahwa konstruksi tidak hanya di daerah tempat partai tersebut memiliki dukungan kuat.

Praktek Baik

Kementerian Buruh dan Inklusi Sosial Norwegia menerbitkan panduan untuk kota-kota tentang cara membuat pemilu aksesibel. Ini termasuk daftar periksa yang merincikan aspek informasi dan infrastruktur aksesibel³⁷.

Departemen Keadilan AS telah mengembangkan daftar periksa untuk TPS yang menyediakan panduan untuk memastikan semua aspek TPS aksesibel, termasuk parkir, trotoar, pintu masuk, lorong, dan ruang memilih sendiri.³⁸

36 International Foundation for Electoral Systems. Armenia: Voters with Disabilities PSA. YouTube. 2010. <www.youtube.com/watch?v=eXvLtnAHaOI&noredir

37 "Accessibility to Elections: Guide for the Municipalities." Helsedirektoratet. The Norwegian Directorate of Health. <<http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/accessibility-to-elections-guide-for>

38 United States Department of Justice. ADA Checklist for Polling Places. 2004. <<http://www.ada.gov/votingck.h>

Alat Bantu

Alat bantu membantu orang-orang dengan disabilitas menyelesaikan tugas atau fungsi harian lainnya. Ada beberapa jenis alat bantu yang dapat membuat proses pemilu lebih aksesibel. BPP seringkali membutuhkan dukungan dalam mengembangkan peralatan ini. Panduan kertas suara taktil adalah map tempat meletakkan surat suara, dan menggunakan braille atau simbol taktil untuk mengenali calon, memastikan kerahasiaan suara orang-orang yang tuna netra. Panduan perlu dirancang jauh hari sebelum pemilihan, karena rancangan surat suara dapat dipengaruhi rancangan panduan dan sebaliknya. Daftar calon tertulis dalam huruf braille, sehingga tuna netra dapat mempelajari sebelum pemungutan suara. Alat bantu coblos/ contreng berupa Lubang-lubang di map sejajar dengan kotak di surat suara sehingga pemilih dapat membaca Braille/symbol dan menandai surat suara dengan cara yang sama dengan pemilih yang tidak menggunakan panduan.

Beberapa BPP telah mengembangkan surat suara Braille, tetapi panduan adalah solusi yang lebih baik dengan dua alasan. Pertama, seringkali hanya ada beberapa pemilih per kotak suara yang menggunakan surat suara Braille, sehingga mudah menentukan cara memilih dari pemilih yang menggunakan surat suara Braille. Akan tetapi, jika pemilih menggunakan panduan, surat suara mereka akan tampak sama dengan surat suara lainnya, dan menjaga kerahasiaan pilihan. Kedua, panduan surat suara taktil biasanya adalah pilihan yang lebih hemat. BPP hanya perlu menyediakan beberapa panduan untuk tiap TPS, sementara menyediakan surat suara Braille membutuhkan logistik lebih untuk memastikan ada cukup surat suara Braille di tiap TPS.

Panduan alat coblos/ alat contreng yang ada huruf braille lebih efektif, karena merupakan alat kelengkapan TPS maka memang harus disediakan setiap TPS ada satu alat tersebut. Jadi ada berapapun pemilih tuna netra dapat menggunakan alat tersebut.

Bilik suara yang aksesibel yang disesuaikan dengan ketinggian bagi pengguna kursi roda membantu memastikan kerahasiaan suara. Stiker taktil atau tutup kotak menunjukkan surat suara yang perlu masuk ke kotak itu untuk pemilih tuna netra jika mereka memasukkan surat suara ke lebih dari satu kotak pada hari pemungutan suara. Kaca pembesar, lampu portabel, dan pen gerip besar adalah alat yang dapat membantu pemilih dengan dan tanpa disabilitas.

BPP harus mengembangkan sebuah rencana untuk mendapatkan dan menyebarkan alat bantu pada fasa prapemilu. Selama proses penganggaran, BPP harus



Panduan surat suara taktil yang digunakan di Sierra Leone tahun 2002.



Manual KPPS Guatemala ini mengikutkan bagian mengenai memasukkan suara untuk orang-orang dengan disabilitas.

mengalokasikan dana untuk akomodasi wajar. Mengembangkan alat bantu pada detik-detik terakhir tidak memberikan cukup waktu untuk merencanakan logistik distribusinya. Ini akan menghasilkan alat-alat bantu yang tertinggal di gudang-gudang pada hari pemilihan. Orang-orang dengan disabilitas harus secara rutin dilibatkan dalam diskusi ketika mengembangkan alat bantu agar alatnya memenuhi kebutuhan pemilih.

Pelatihan

Seringkali ada kekurangan kesadaran di dalam BPP akan hambatan-hambatan yang dihadapi orang-orang dengan disabilitas ketika berusaha memilih dan cara-cara memitigasinya. Harus ada peningkatan pelatihan bagi pengambil keputusan dan pejabat BPP tingkat menengah, khususnya pada komitmen yang dijabarkan di Pasal 29 CRPD. Selain itu, harus juga ada pelatihan disabilitas yang ditargetkan pada KPPS, yang adalah wajah BPP pada hari pemilihan. Meskipun sebuah negara memiliki hukum pemilu yang inklusif, pelatihan yang kurang memadai akan KPPS dapat menghasilkan pengesampingan pemilih dengan disabilitas. Misalnya, CRPD menyatakan bahwa jika seorang pemilih membutuhkan bantuan ketika memasukkan suara, maka ia dapat memilih seorang asisten.



Seorang perempuan Nepal membaca informasi pendaftaran dalam Braille

Akan tetapi, beberapa KPPS tidak terlatih untuk ini dan bersikukuh hanya mengizinkan petugas KPPS untuk membantu pemilih. Dalam pelatihan ini disertakan adanya simulasi, sehingga ada peragaan bagaimana menggunakan alat bantu mobilitas dan dapat merasakan ketika orang dengan disabilitas akan menggunakan hak pilih di TPS. Peragaan ini sangat penting dan peserta yang ditargetkan pada KPPS dapat memahami rasanya menjadi orang dengan disabilitas

KPPS harus juga dilatih untuk memasang panduan surat suara taktil. BPP dari Sierra Leone hingga Kosovo telah mengembangkan panduan surat suara taktil, tetapi pengawas telah menyaksikan KPPS yang tidak menawarkan alat tersebut ke pemilih yang tuna netra/rendah penglihatan atau salah menjelaskan cara penggunaan alat pada hari pemilu. Untuk memperbaiki ini, beberapa BPP telah menyediakan bab suplemen dalam manual pelatihan KPPS mereka menjelaskan cara memasukkan suara bagi orang-orang dengan disabilitas.

Pelatihan harus juga mencakup kebijakan BPP pada hari pemilihan mengenai antrian. Apakah orang-orang dengan disabilitas, orang lanjut usia, dan wanita hamil diberikan prioritas, atau haruskah mereka mengantri? Apakah pemilih harus meminta untuk didahulukan atau apakah itu tanggung jawab KPPS untuk mengenali pemilih yang dapat diberi prioritas? Apakah disediakan kursi? Jawaban pertanyaan-pertanyaan ini dapat berbeda dari negara ke negara, tetapi BPP harus memiliki rencana yang relevan.

Praktek Baik

Di Filipina, IFES mendukung BPP dalam membentuk Jaringan Antar-Agensi dan LSM untuk Memberdayakan Orang-orang dengan Disabilitas. Kelompok kerja ini mengembangkan rekomendasi kebijakan inklusif, seperti kampanye nasional untuk mendaftarkan orang-orang dengan disabilitas untuk memilih.

BPP tersebut menyelenggarakan “Minggu Orang-orang dengan Disabilitas” waktu orang-orang dengan disabilitas didorong untuk mendaftar sebagai pemilih. Selain kampanye media yang mengelilingi minggu ini, BPP juga menggunakan bangunan-bangunan paling aksesibel di negara itu—*shopping malls*—sebagai lokasi pusat pendaftaran dan telah mengembangkan situs web yang aksesibel.

Pendaftaran Pemilih

Dukungan teknis bagi pendaftaran pemilih adalah salah satu cara terpenting untuk memastikan orang-orang dengan disabilitas dapat berpartisipasi dalam pemilu. Jika para pemilih dengan disabilitas tidak terdaftar, mereka tidak dapat menggunakan ketentuan akses apapun di hari pemilu. Selain isu-isu yang mempengaruhi seluruh proses pemilu, seperti informasi dan lokasi yang tidak aksesibel, mendapatkan KTP atau akta lahir dapat menjadi hambatan tambahan saat pendaftaran.

KTP atau akta lahir biasanya dibutuhkan untuk mendaftar sebagai pemilih. Di beberapa negara, anak-anak dengan disabilitas tidak diberi identifikasi ini ketika mereka lahir, karena diasumsikan mereka tidak akan menjadi warga negara aktif. Rincian hak-hak yang didapatkan dari kepemilikan KTP juga biasanya tidak disebarluaskan dengan format yang aksesibel, sehingga orang-orang dengan disabilitas tidak tahu mereka memiliki kartu ini untuk mendaftar sebagai pemilih.

Di beberapa negara, informasi tentang disabilitas dikumpulkan sebagai bagian dari proses pendaftaran. Informasi ini terkadang dicantumkan di KTP dan terkadang disimpan untuk kegunaan internal oleh BPP. Memiliki data ini memungkinkan BPP untuk merencanakan lebih baik distribusi akomodasi, seperti panduan surat suara taktil, tetapi juga ada sisi buruknya. Ada resiko bahwa mencantumkan status disabilitas akan menyebabkan diskriminasi di area lain kehidupan, seperti pekerjaan. Resikoini dapat dimitigasi jika BPP mengumpulkan informasi, tetapi tidak mencantulkannya di KTP. Keputusan untuk mengumpulkan informasi disabilitas dan mencantulkannya di KTP harus dibuat dengan berkonsultasi dengan komunitas disabilitas lokal. BPP harus dengan jelas mendefinisikan kegunaan informasi ini bagi mereka. Pendidikan akan keuntungan identifikasi diri dapat menghasilkan ketentuan layanan yang lebih baik secara meluas, tidak hanya pada hari pemilu. Akan tetapi, hak komunitas disabilitas untuk privasi harus selalu menjadi pertimbangan utama.

Proses pendaftaran pemilih yang inklusif harus memiliki sifat-sifat berikut:

- Petugas pendaftaran pemilih memiliki perspektif disabilitas
- Prosedur akta kelahiran dan KTP yang aksesibel dan inklusif
- Lokasi pendaftaran yang secara fisik aksesibel, dan memastikan orang dengan disabilitas masuk dalam daftar pemilih
- Informasi yang mudah dimengerti didistribusikan dalam format yang aksesibel
- Keuntungan dan kekurangan pengumpulan informasi spesifik disabilitas didefinisikan dan dinilai secara jelas
- Keputusan untuk mengumpulkan informasi spesifik disabilitas dibuat secara kolaboratif

Bago para sa mga PWD voters at new registrants!

Meron na tayong "Supplementary Data" kung saan ilalagay ang uri ng kapansanan at "assistance" na kakailanganin mo sa araw ng halalan

SUPPLEMENTARY DATA
(Persons with disabilities/Senior Citizens with disabilities)

Please check the box indicating the disability:

DISABILITY	
Physical	<input type="checkbox"/>
Hearing	<input type="checkbox"/>
Speech	<input type="checkbox"/>
Visual	<input type="checkbox"/>
Non-Manifest	<input type="checkbox"/>
Multiple Disabilities	<input type="checkbox"/>

Please check what type(s) of assistance needed on election day:

TYPE OF ASSISTANCE	
Assistant	<input type="checkbox"/>
Communication Assistance	<input type="checkbox"/>
Accessible Precinct	<input type="checkbox"/>
Visual Assistance	<input type="checkbox"/>
None	<input type="checkbox"/>

Left Thumbprint Right Thumbprint

Proses pendaftaran pemilih di Filipina mencatat informasi akomodasi yang dibutuhkan pada hari pemilu.

Pendidikan Pemilih

Pendekatan dua jalur harus digunakan untuk pendidikan pemilu; yakni, harus ada pendidikan pemilu yang khusus ditargetkan untuk orang-orang dengan disabilitas, dan juga inklusi orang-orang dengan disabilitas dalam usaha pendidikan pemilih arus utama. Pengarusutamaan keterlibatan orang-orang dengan disabilitas dalam pendidikan pemilih tidak langsung berarti aktivitas menjadi lebih mahal. Misalnya, BPP dan partai politik dapat mempekerjakan aktor dengan disabilitas di iklan TV mereka tanpa pengeluaran tambahan

Selain BPP dan partai-partai politik melaksanakan pendidikan pemilih, donor harus mendukung DPO dan ormas-ormas untuk melaksanakan kampanye pendidikan pemilih yang menargetkan orang-orang dengan disabilitas. Ini terutama relevan jika pelatihan khusus dibutuhkan, seperti cara menggunakan panduan surat suara taktil. Pengalaman membuktikan bahwa pemilih lebih mungkin sadar akan panduan dan mengetahui cara penggunaannya jika BPP dan DPO mendidik baik KPPS dan pemilih.

Orang-orang dengan disabilitas intelektual atau yang memiliki kemampuan baca rendah dapat dibantu dengan materi pendidikan pemilih dalam format mudah dibaca dengan gambar atau dari kampanye pendidikan *door-to-door*, tempat mereka dapat

.Berbicara dengan pendidik secara langsung. Kotak gambar adalah alat lain yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan kewarganegaraan dan pemilih di akar rumput. Selama sesi kotak gambar, fasilitator terlatih menampilkan serangkaian gambar-gambar yang dirancang untuk memancing diskusi antara peserta di topik-topik terkait pemilu.

Praktek Baik

Jaringan Sudan untuk Pemilu Demokratis, sebuah jaringan yang terdiri dari 70 ORMAS dan kelompok berbasis agama, melibatkan DPO sebagai mitra. Menjelang pemilu Sudan Selatan yang pertama, jangkauan ditargetkan ke masyarakat umum dengan informasi akan ketentuan kesejahteraan untuk kelompok-kelompok dalam konstitusi interim di Sudan Selatan. Pendidikan pemilih dengan jangkauan khusus ke orang-orang dengan disabilitas menghasilkan peningkatan mobilisasi pemilih dengan disabilitas. Hasil lainnya adalah adaptabilitas program jangkauan pendidikan pemilih ke bentuk-bentuk partisipasi lainnya seperti populasi terpinggir Sudan Selatan.

Gambar 5: Contoh-contoh Format Aksesibel

Format Aksesibel	Membantu Mereka Yang
Audio	Tuna netra atau kesulitan melihat dan orang-orang dengan kesulitan membaca
Braille	Tuna netra atau kesulitan melihat
Teks	Tuna rungu atau kesulitan mendengar
Mudah Baca	Memiliki disabilitas intelektual, kesulitan baca, atau bukan pengguna bahasa negara sebagai bahasa ibu
Teks elektronik dengan perangkat lunak pembaca layar	Tuna netra atau kesulitan melihat; memiliki disabilitas intelektual atau pembelajaran atau kesulitan baca
Cetak besar (ukuran huruf 16-20)	Memiliki penglihatan rendah
Gambar	Memiliki disabilitas intelektual, kesulitan membaca atau bukan pengguna bahasa negara sebagai bahasa ibu
Bahasa Isyarat	Tuna rungu atau kesulitan mendengar
Taktil	Tuna netra atau rendah penglihatan tetapi tidak mengenal Braille dan orang-orang yang tuna rungu dan tuna netra



Gambar ini adalah sebagian dari rangkaian yang digunakan di Republik Congo.

Informasi yang disebarakan di situs BPP haruslah dapat diakses orang-orang dengan disabilitas. Bagian 508 dari Kebijakan Rehabilitasi AS menyediakan panduan yang dapat digunakan untuk memastikan situs web aksesibel.³⁹

Ada pula panduan aksesibilitas lainnya seperti *Daisy Consortium*⁴⁰, *Bobby Approved*⁴¹, dan *World Wide Web Consortium*⁴².

Selain mengetahui tempat memilih dan cara kerja prosesnya, orang-orang dengan disabilitas membutuhkan informasi mengenai visi misi partai politik dan calon dalam format yang aksesibel untuk membuat pilihan yang matang. Gambar 5 adalah contoh dari format yang paling aksesibel dan menjelaskan yang mendapatkan manfaat dari informasi jenis ini.

BPP, partai politik, dan ORMAS haruslah memastikan anggaran untuk materi pendidikan pemilih dan pendidikan/ sosialisasi isu disabilitas bagi penyelenggara pemilu, untuk mencakup biaya distribusi di format yang aksesibel seperti bahasa isyarat, Braille, cetak huruf besar, dan teks mudah baca dengan gambar. Materi pendidikan pemilih yang harus aksesibel termasuk:

- Situs web BPP
- Kampanye cetak seperti brosur, poster, dan surel
- Iklan layanan masyarakat di TV dan radio
- Manifesto/visi misi partai politik dan informasi tentang calon

39 United States. Department of Justice. Section 508 Overview. 1998. <<http://www.justice.gov/>>

40 Daisy Consortium. <<http://www.daisy.org>>

41 Coggan, Donald. "Bobby Approved Sites: Improving Web Accessibility For People With Disabilities." <www.bobby-approved.com>

42 World Wide Web Consortium. W3C. <<http://www.w3.org>>

Campagne nationale d'éduca



et in... droits

54, 64, 12, 72, 56, 82, 66

Reponse

J'a...
les devo

Pengajar kewarganegaraan mengisyaratkan kata "memilih" di Sekolah Tuna Rungu Canakry di Guinea.

A **ccesible**
PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Ejerciendo un Derecho Constitucional en un marco de dignidad y de respeto a las diferencias.

Tu voto cuenta, VOTA
ELECCIONES 2011 Guatemala, C. A

Logo of the National Council for the Disabled (CNDI) and the logo of the 2011 elections. Logos of the United Nations, the Canadian government, and the word "Canada" are also visible.



Pemilih di Guatemala menunjukkan jari bertintanya setelah memilih pada hari pemilihan.

Bagian 3: Periode Pemilu

Hambatan potensial

- Pengawas tidak memonitor masalah akses
- Partai politik mengabaikan hal-hal yang penting bagi pemilih dengan disabilitas, atau merekrut kandidat dengan disabilitas
- Manifesto partai tidak dalam bentuk yang aksesibel
- TPS tidak aksesibel
- Petugas keamanan tidak dibuat peka akan bagaimana caranya menyediakan lingkungan yang aman untuk pemilih dengan disabilitas
- Pihak media tidak menyebarkan informasi dalam bentuk yang aksesibel
- Keluhan proses penilaian tidak aksesibel
- Tidak ada sanksi bagi pelanggaran pemilu

Periode pemilu lebih dari hanya Hari Pemilu. Acara yang penting antara lain adalah:

- Pengawasan
- Nominasi partai dan kandidat
- Kampanye partai politik dan kandidat
- Memberi suara dan menghitungnya
- Tabulasi dan pengumuman hasil pemilu
- Penyelesaian sengketa pemilu

Pengawasan

Donatur internasional dan mitra implementasi dapat memfasilitasi kemitraan antara kelompok pengawas nasional dan internasional dan DPO. Orang-orang dengan disabilitas harus dilibatkan sebagai pengawas jangka pendek dan jangka panjang. Pengawasan jangka panjang sesungguhnya dimulai dalam fase pra-pemilu dan termasuk pengawasan proses-proses seperti pendaftaran pemilih. Pertanyaan tentang akses pemilu seharusnya ada dalam daftar pengawas arus utama dan orang-orang dengan disabilitas harus dilatih bagaimana caranya melakukan pengawasan akses pemilu.

IFES dan beberapa DPO⁴³ serta kelompok pengawas nasional telah menyusun suatu metode pemantauan pemilu dan paket pelatihan yang berpusat pada akses pemilu bagi orang-orang dengan berbagai jenis disabilitas. Formulir pemantauan pemilu mencakup pertanyaan tentang akses sejalan dengan standar

43 General Election Network for Disability Access. <<http://www2.agendaasia.org>

internasional mengenai hak berpartisipasi secara politik bagi orang-orang dengan disabilitas seperti ditegaskan dalam CRPD. Alat pemantauan pemilu yang baru ini memungkinkan mitra lokal DPO menggunakan data pemantauan yang andal untuk mengidentifikasi prioritas dan secara efektif membidik kesempatan untuk memastikan akses dalam seluruh siklus pemilu. Pemantauan juga diarahkan pada penyelenggara pemilu tentang sikap dan fasilitasi, terhadap pemilih dengan disabilitas.

Alat-alat ini telah dipakai di Asia Tenggara dan Amerika Latin untuk membantu DPO mengidentifikasi kesenjangan dan mengadvokasi pemilu yang lebih aksesibel.

Selain untuk melakukan pengawasan yang berfokus spesifik pada masalah akses, orang-orang dengan disabilitas harus dilibatkan sebagai pengawas pemilu arus utama. Harus ditegaskan bahwa kehadiran pengawas dengan disabilitas di TPS berdampak langsung dalam mengubah sikap dan pendapat umum dengan cara menyampaikan pesan bahwa mereka adalah mampu dan dapat dilibatkan dalam komitmen kemasyarakatan. Ini juga menekankan kepada orang-orang dengan disabilitas bahwa mereka adalah bagian dari komunitas.

Kelompok pengawas arus utama juga harus memasukkan beberapa pertanyaan ke dalam daftar mereka mengenai akses pemilu. Beberapa kelompok pengawas melakukannya, tetapi kebanyakan tidak. IFES dan NDI telah bekerja bersisian dengan organisasi internasional lain dalam mengembangkan standar misi internasional dan inisiatif pemantauan domestik. Dalam standar ini ada kebutuhan untuk menganalisa apakah akses setara disediakan untuk orang-orang dengan disabilitas dan ada rekomendasi untuk memasukkan hambatan yang dihadapi orang-orang dengan disabilitas ke dalam laporan akhir misi pengawasan. Pencantuman masalah disabilitas dalam laporan pengawas hanya membutuhkan sedikit biaya atau pelatihan tambahan, dan dapat menjadi cara penting untuk memastikan penghargaan akan hak-hak orang-orang dengan disabilitas dalam siklus pemilu yang berikutnya.

Praktek Baik

Misi pengawasan pemilu *Wolesi Jirga* (DPRD) Afganistan mengandung beberapa analisa tematik: administrasi pemilu, proses keluhan pemilu, keamanan, peran mediadan partisipasi wanita, kaum minoritas serta orang-orang dengan disabilitas. Laporan akhir menunjukkan bahwa meskipun banyak peraturan yang melindungi pemilih dengan disabilitas masih berlaku, pemilu tahun 2010 adalah kurang aksesibel dibanding pemilu tahun 2005. Namun laporan itu mendapati bahwa BPP berhasil memenuhi kuota penerimaan 5 persen orang dengan disabilitas yang ditetapkan pada tahun 2005. Memasukkan analisa kemampuan orang-orang dengan disabilitas dalam berpartisipasi, ditambah dengan kuota penerimaan bekerja,

Memastikan bahwa laporan pengawasan telah menetapkan dasar untuk peningkatan partipasi politik orang-orang dengan disabilitas.



Pengawas AGENDA mencatat kondisi non aksesibel pada TPS ini di Indonesia.

Pengawas pemilu harus memiliki karakteristik berikut:

- Pengawasan berfokus semata-mata pada aksesibilitas pemilu
- Pengawasan arus utama mencakup aksesibilitas sebagai satu dari banyak pengukuran
- Pengawasan berfokus pada sikap/ perspektif penyelenggara pemilu
- Orang-orang dengan disabilitas dilibatkan dalam misi pengawasan

“*Merasa bahwa tentu saja kami berhak memilih, tapi kami lupa bahwa bagian kedua adalah untuk dipilih dan seseorang dengan “disabilitas hampir tak punya kesempatan menang; pernah ada seorang dengan disabilitas yang terlibat dalam posisi-posisi berkuasa. Dan bukan hanya itu, semuanya berhubungan dengan membuat keputusan; partai politik sangat kaku dalam hal itu, dan tak ada tempat untuk orang dengan disabilitas menyatakan apapun dalam partai politik.*”

Wanita tuna netra dari kota Guatemala; kutipan Anonim dari focus group discussion yang direkam dalam IFES' *Assessment of Election Access Barriers*, Guatemala⁴⁴

Pencalonan

Pertama, orang dengan disabilitas harus bergabung dan menjadi aktif dalam partai politik sebelum mereka menjadi kandidat. Rendahnya keturut-sertaan mungkin akibat dari sikap apatis, kurang percaya diri atau tekanan keluarga. Apatis bisa mempengaruhi semua pemilih, tetapi pemrograman inklusi bisa memastikan bahwa apatis bukan disebabkan kurangnya informasi dalam format yang aksesibel. Pemrograman itu juga harus menyentuh diskriminasi pada pihak partai politik yang menolak menerima anggota dan/atau kandidat dengan disabilitas. Perspektif aktor partai politik masih rendah, masih ada anggapan bahwa orang dengan disabilitas tidak kapabel, tidak layak, tidak mampu menjadi anggota Dewan/legislatif. Seringkali persyaratan dari orang dengan disabilitas di lebih-lebihkan, agar tidak bisa memasukkan dokumen pencalonan dalam alah satu partai politik.

Beberapa negara seperti Zimbabwe, telah menetapkan kuota untuk memastikan bahwa orang-orang dengan disabilitas dimasukkan sebagai anggota parlementer. Implementasi kuota bisa menantang, bukan hanya karena persepsi bahwa perwakilannya tidak punya

Praktek baik

Down Syndrome Irlandia meluncurkan *My Opinion*, proyek Suara Saya di enam negara - Irlandia, Italia, Malta, Hungaria, Spanyol dan Denmark - yang memungkinkan orang dewasa dengan *down syndrome* lebih banyak terlibat dengan setiap aspek dari proses demokrasi, termasuk pemungutan suara dan advokasi untuk isu-isu penting bagi mereka. Sebagai bagian dari proyek, manifesto partai politik dibuat ke dalam format yang mudah dibaca sehingga peserta bisa membuat keputusan pada hari pemilihan.

44 Assessment of Election Access Barriers in Guatemala. International Foundation for Electoral Systems. <http://www.IFES.org/Content/Publications/News-in-Brief/2012/Dec/~//media/Files/Publications/Reports/2012/Guat_Report_Survey_DPO_Leader>

kekuasaan yang setara dengan anggota yang lain. Sama halnya dengan kuota gender, dalam beberapa kasus, orang-orang dengan disabilitas yang mendapat jabatan berjuang untuk berkuasa. Ada berbagai pertanyaan mengenai bagaimana kuota disabilitas bisa ditegakkan. Tergantung jenis sistem pemilihan, apakah peraturan mewajibkan setiap partai untuk nominasi sejumlah orang dengan disabilitas? Bagaimanakah negara-negara memastikan ada sejumlah minimum orang dengan disabilitas terpilih? Lagi pula, siapa yang termasuk dalam sebutan dengan disabilitas? Haruskah kandidat terlihat disabilitasnya? Apakah kandidat harus mewakili jenis-jenis berbeda dari disabilitas? Daripada mengajukan kuota, seringkali lebih efektif untuk berfokus pada inisiatif pendidikan pemilih yang menjadikan masyarakat umum peka akan hak-hak dan kemampuan orang-orang dengan disabilitas. Usaha advokasi yang dibidik dengan partai politik bisa juga menghasilkan perubahan cara pikir di dalam partai, sehingga orang-orang dengan disabilitas dimasukkan dalam posisi kepemimpinan dan dipandang sebagai anggota yang setara. Pendekatan akan hal ini haruslah diputuskan berdasar keadaan setiap negara.

Selain stigma yang biasa dikenakan dengan disabilitas, kandidat dengan disabilitas juga menghadapi hambatan pembiayaan. Kerajaan Inggris telah mengajukan Access to Elected Office fund⁴⁵. Pendanaan ini membantu kandidat dengan disabilitas menutup biaya tambahan, seperti transportasi yang aksesibel atau penerjemah bahasa isyarat. Dana ini memberikan hibah sampai dengan £10,000 GBP (\$16,000 USD). Meskipun mungkin pemerintahan di banyak negara tidak bisa tak dapat memberikan mekanisme yang sama, donatur internasional dan organisasi implementasi bisa membantu kandidat dengan disabilitas dalam bentuk pelatihan.

Kampanye

Satu hambatan besar dalam proses kampanye inklusif adalah kurangnya informasi dalam bentuk aksesibel. Pemilih dengan disabilitas membutuhkan informasi tentang manifesto partai politik, para kandidat, dan acara kampanye, untuk bisa membuat keputusan berdasar pertimbangan. Ada beberapa area yang dukungan kandidat dan BPP bisa memastikan para pemilih mendapat kesempatan untuk menimbang pilihan mereka.

Mengamankan Janji Pemilihan

Periode pemilihan memberi peluang pada LSM untuk menghimbau partai dan politisi untuk menanda-tangani janji kepada masyarakat dan mengemukakan kepedulian terhadap orang-orang dengan disabilitas. Tokoh politik secara alami cenderung membuat janji-janji sambil mencoba meraih suara dari sebanyak mungkin segmen masyarakat. DPO dapat menggunakan ruang politik yang tercipta karena pemilihan untuk menarik perhatian pada inisiatif advokasi yang berlangsung atau masalah yang dihadapi konstituensinya. Merancang

Praktek Baik

Di Sierra Leone, NDI membantu koalisi LSM-LSM, termasuk satu DPO, dalam membuat rancangan kode etik untuk partai yang bertanding dalam pemilu November 2012. Dokumen dimaksudkan mendorong suasana pemilu yang bebas kekejaman dan intimidasi, dan untuk mendorong wanita serta populasi terpinggirkan lainnya berpartisipasi dalam proses pemilihan. Kode etik dengan lugas menyatakan bahwa partai mesti mencakup wanita dan orang-orang dengan disabilitas dalam daftar kandidatnya, memaksa penanda tangan untuk “memberdayakan kandidat wanita, kandidat pemuda, kandidat dengan disabilitas untuk Parlemen dan dewan lokal, dengan kampanye, transportasi, dan bantuan finansial.” Kode etik menyediakan standar yang akan bisa ditagihkan oleh LSM kepada partai politik selama masa kampanye. Anggota koalisi yang merancang kode tersebut telah mempromosikan inisiatif mereka di media melalui wawancara radio dan sebaran helai kode etik berlaminasi ke kantor-kantor partai di semua tempat di negara itu.

45 United Kingdom. Access to Elected Office. Government Digital Service, 2012. <<https://www.gov.uk/government/news/access-to-elected-office>>.

janji pemilihan juga memungkinkan DPO untuk mencipta suasana tekanan sebaya yang positif di antara partai-partai dan kandidat dalam menjawab kebutuhan komunitas disabilitas, karena mereka bisa menunjuk penanda tangan janji dan mengajak yang lain untuk juga menanda-tangani. Janji-janji ini menjadi bagian utama dari keseluruhan strategi advokasi, membuka peluang DPO untuk mengawasi ketepatan janji pada periode pasca pemilu. Ini juga mendorong interaksi partai politik dengan DPO dalam masalah yang berkenaan dengan komunitas disabilitas, yang menjadi panggung hubungan kerja sama setelah pemilu.

Kandidat Melakukan Jangkauan Khusus pada Orang dengan Disabilitas

Selain memastikan bahwa bahan kampanye umum aksesibel untuk semua warga negara; DPO dapat memakai pemilu itu sebagai kesempatan melibatkan pada kandidat dalam hal-hal yang spesifik komunitas disabilitas.

Sebelum pemilihan July 2012, NDI menyediakan bantuan pada koalisi DPO-DPO di Meksiko untuk mengembangkan serangkaian proposal tentang masalah disabilitas untuk dibagikan kepada para kandidat presiden. Koalisi ini mempublikasikan proposal ini di situs web masing-masing dan mempromosikannya di platform media sosial. Setelah menerbitkan proposal, DPO mengadakan dialog dengan semua kandidat presiden dan kandidat walikota kota Meksiko, dengan kekecualian satu partai. Melalui diskusi-diskusi ini – , yang adalah pertama kalinya di Meksiko antara kandidat presiden dengan komunitas disabilitas – koalisi DPO menyajikan rekomendasi kebijakan dan para kandidat mendiskusikan landasan disabilitas mereka sendiri. Dialog itu disorot meluas di media nasional sehingga meninggikan profil masalah disabilitas dan meneguhkan posisi koalisi untuk terus terlibat dengan pejabat yang terpilih. DPO-DPO di Guatemala dan Republik Dominika telah melakukan penjangkauan yang serupa dengan kandidat mereka.



Seorang pemuda di Sierra Leone menghadiri acara umum yang mendukung kode etik para partai politik yang mencakup kemudahan dalam inklusi disabilitas.



Siaran televisi debat antara kandidat presiden di Serbia tahun 2012 yang menampilkan penerjemah bahasa isyarat.

46 Reč na reč: Debata kandidata za predsednika Srbije 2012.” Radio-televizija Srbije, June 16, 2012. <[http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/22/RTS_Satelit/1103434/Reč na reč: Debata kandidata za predsednika Srbije 2012.h](http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/22/RTS_Satelit/1103434/Reč_na_reč:_Debata_kandidata_za_predsednika_Srbije_2012.h)

Kode Etik

Organisasi masyarakat sering mengajukan kode etik untuk partai-partai politik dan kandidat yang menantang pemilu untuk mendorong akuntabilitas para pemain politik ini. Kode etik mendorong partai dan kandidat untuk menghargai peraturan yang mengarahkan proses pemilu dan mencegah kecurangan dan manipulasi. Pelibatan DPO dalam penyusunan kode etik akan memberi kesempatan adanya janji tambahan untuk menjadikan kampanye aksesibel bagi semua warganegara. Selain itu, adanya kode etik akan memungkinkan DPO untuk meminta akuntabilitas para pejabat dalam hal aksesibilitas dan inklusi⁴⁶.



Seorang pria bersiap-siap memilih di referendum Sudan selatan.

Debat

Debat adalah salah satu cara terpenting para warga belajar tentang berbagai kandidat dan membuat pilihan dengan pertimbangan pada hari Pemilu. Donatur internasional dan organisasi implementasi bisa mendukung BPP dengan memberikan panduan bagaimana membuat debat aksesibel oleh orang-orang dengan disabilitas. Contohnya, di Guatemala, BPP menyediakan penerjemah bahasa isyarat yang profesional untuk debat sehingga konstituen yang tuna rungu atau pendengaran terbatas the dapat mengikutinya di TV. DPO harus menjalin hubungan dengan penyelenggara debat supaya bisa memberi masukan dalam mengatur tempat dan informasi, selain mengusulkan pertanyaan bagi para kandidat yang relevan dengan perkara penting bagi komunitas disabilitas.

Implementasi Hari Pemilu

Dalam fase pra pemilu perencanaan akan menetapkan panggung Hari Pemilu yang aksesibel dan inklusif. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilu, namun harus disiapkan lama sebelum pemungutan suara:

- Hukum pemilihan umum
- Kebijakan prioritas memberikan suara dan kepenuhan syarat pemilih
- Seleksi TPS
- Desain bantuan suara taktil
- Mendapatkan dan mendistribusi-kan bahan pemilu yang aksesibel seperti bilik suara yang aksesibel bagi pengguna kursi roda, atau lensa pembesar
- Pelatihan BPP, KPPS dan petugas keamanan
- Akreditasi dan daftar periksa pengawas

Bantuan teknis terpusat harus tersedia bagi KPPS pada hari pemilu agar mereka bisa minta bantuan dalam

47 Uhuru Kenyatta is Announced 4th President." YouTube. <<http://www.youtube.com/watch?v=idMd1rbbbSQ>

masalah yang mungkin timbul. BPP juga harus menyediakan nomer telepon yang bisa dihubungi oleh orang-orang dengan disabilitas atau yang lain agar mereka bisa membuat panggilan atau mengirim teks untuk melaporkan TPS yang tidak aksesibel, perlakuan tak layak oleh KPPS, atau masalah lainnya.

Transmisi Hasil Pemilu

Karena media yang tidak aksesibel, pemilih dengan disabilitas terkadang menjadi orang yang terakhir mengetahui hasil dari pemilihan umum. Untuk mengatasi kecenderungan ini, Kenya National Association of the Deaf (Asosiasi Tuna Rungu Kenya) bermitra dengan saluran berita televisi nasional untuk menyediakan penerjemahan langsung ke bahasa isyarat untuk mengumumkan hasil pemilu 2013/47. Inilah pertama kalinya orang-orang Kenya tuna rungu, terganggu pendengaran, dan mendengar menerima informasi hasil pemilu secara bersamaan.

Penyelesaian Sengketa Pemilu

Hak untuk pelurusan keluhan dan sengketa pemilu adalah satu dari tujuh standar internasional inti untuk sistem pengadilan keluhan yang efektif⁴⁸. Orang-orang dengan disabilitas sering tertinggal proses pengadilan keluhan. Pemilih dengan disabilitas harus juga bisa mengajukan klaim tidak setuju hasil pemilu, selain mengajukan keluhan mengenai perlakuan mereka pada hari pemilu. BPP harus menjalankan kegiatan edukasi tentang bagaimana mengajukan keluhan dalam format yang aksesibel; membangun sistem manajemen kasus yang memiliki fitur-fitur aksesibel, seperti pengiriman online atau melalui telepon; dan mengadakan pelatihan kepekaan pada penyelidik dan hakim.

Misalnya, seorang wanita dengan disabilitas intelektual tidak diijinkan memberikan suara pada pemilu Meksiko tahun 2012. Proses pengadilan keluhan sudah aksesibel, jadi dia bisa mengajukan keluhan pada BPP, yang kemudian menyelidiki klaim itu. Ternyata KPPS melarang wanita itu memberikan suara karena ada provisi diskriminasi dalam *Federal Code of Electoral Institutions and Procedures*, yang menyatakan bahwa orang-orang yang terganggu kemampuan mental tidak dapat memberikan suara. Namun, BPP telah membuat amendemen pada provisi ini sebelum pemilu, yang memperkenankan wanita ini memberikan suaranya, kalau saja KPPS mengetahui adanya amendemen ini. Ini menunjukkan bukan saja pentingnya pelatihan KPPS, namun juga betapa informasi aksesibel tentang pengajuan keluhan telah membuka jalan pada partisipasi yang lebih aktif dari warga negara dengan disabilitas⁴⁹.

48 Vickery, Chad, ed. Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Elections (GUARDE). International Foundation for Electoral Systems. 2011. http://www.IFES.org/~media/Files/PublicBooks/2011/GUARDE_final_publication/Books/2011/GUARDE_final_publication.pdf

49 Diaz, Ariane. "No dejaron votar a una discapacitada." La Jornada. July 6, 2012: 13. Web. December 6, 2013. <http://www.jornada.unam.mx/2012/07/06/politica/013n3pol>.



Seorang pengamen di Nepal menyebarkan informasi kepada pemilih mengenai pemilu yang akan datang.

Bagian 4: Periode Pasca Pemilu

Hambatan Potensial

- Orang-orang dengan diabilitas tidak melibatkan dalam proses pembelajaran
- DPO tidak mengenal tentang hak-hak memilih
- Pendidikan kewarganegaraan tidak membahas hak-hak orang dengan disabilitas dan tidak disebarkan dalam format yang terjangkau
- Kriteria seleksi panitia pemilihan umum tidak inklusif disabilitas

Periode pasca pemilu memberi kesempatan pada pengampu kepentingan untuk menilai implementasi pemilu. Aktifitas kunci yang harus dipandang dengan lensa keterlibatan disabilitas adalah:

- Audit TPS
- Menilik dua siklus pemilu terdahulu dan menangkap pelajaran darinya
- Meningkatkan aksesibilitas dari institusi pemerintahan
- Melaksanakan kegiatan membangun kapasitas pelaksana pemilu, organisasi massa, dan partai politik
- Membela dan menerapkan reformasi hukum dan administratif
- Bila perlu memperbarui pendaftaran pemilih
- Merevisi strategi jangka panjang BPP
- Merevisi kurikulum pendidikan kewarganegaraan
- Merevisi kriteria seleksi komisioner baru
- Pembekalan komisioner baru tentang materi isu disabilitas
- Mengembangkan rencana monitor yang memastikan akuntabilitas kinerja pejabat terpilih dalam hal yang penting bagi orang dengan diabilitas



Seorang pria melakukan audit aksesibilitas pada TPS di Zimbabwe

Audit TPS

Seringkali sudah ada hukum yang menetapkan aksesibilitas TPS, namun pemilihan tempat tidak selalu menaati peraturan itu. Harus ada badan pemerintah yang mengawasi aksesibilitas pada hari Pemilu, dan badan itu memiliki kewenangan untuk menjatuhkan penalti apabila standar tersebut tidak dipatuhi. Misalnya, di Amerika Serikat, pada hari Pemilu Departemen Keadilan mengawasi ketaatan pada peraturan aksesibilitas nasional dan mengajukan tuntutan pada pemerintahan lokal bila melanggar peraturan tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa peraturan benar ditegakkan.

Merekam Pembelajaran

Suatu tinjauan harus dilakukan dari sudut pandang BPP, DPO, dan pengawas. Tinjauan ini harus menilai dampak tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan akses. Adakah peningkatan dari pemilu sebelumnya? Apa yang perlu dilakukan para pengampu kepentingan untuk melaksanakan pemilu yang lebih inklusif di masa datang? BPP harus memeriksa efektifitas peralatan seperti bantuan surat suara taktil yang dikembangkan pada siklus pemilu sebelumnya. Partai politik harus memanfaatkan waktu ini untuk menilai apakah usaha menjangkau orang-orang dengan disabilitas telah memadai, dan untuk mengembangkan strategi ke depan. Ormas harus menilai apakah pengawasan dan metode pendidikan kewarganegaraan mereka dapat ditingkatkan untuk menambah aksesibilitas dan menjadi lebih inklusif untuk orang dengan disabilitas.

DPO harus memakai kesempatan yang ada selama masa pasca pemilu untuk membuat rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan dalam menghadapi tantangan. Tilikan itu harus mencakup analisa perbaikan yang bisa diterapkan dalam jangka pendek dan jangka panjang. DPO juga harus terlibat dalam usaha perbaikan peraturan pemilu yang terjadi pada masa pasca pemilu. Ormas harus dengan aktif mempertahankan relasi dengan aktor-aktor politik selama masa pemilu. Bila DPO melakukan pengawasan akses pemilu, maka masa pasca pemilu adalah waktunya untuk merancang rekomendasi kepada BPP berdasarkan dengantemuan mereka. Jika DPO melakukan pembelaan dengan partai politik dan berhasil mendapatkan kesepakatan mereka dalam menerapkan kebijakan inklusif, maka masa pasca pemilu adalah waktunya untuk menindak-lanjuti dengan kandidat yang menang dalam memastikan penerapan kebijakan ini.

Aksesibilitas pada Institusi Pemerintahan

Meskipun semua hambatan telah dapat diatasi dan seorang dengan disabilitas terpilih sebagai perwakilan BPP lokal, regional atau bahkan nasional, tetap akan ada tantangan. Seringkali bangunan tempat bekerja politisi dan PNS atau angkutan umum yang diperlukan untuk menuju tempat bekerja tidaklah aksesibel. Informasi mengenai peraturan dan kebijakan juga mungkin tidak ada dalam bentuk aksesibel. Pejabat terpilih dengan disabilitas dapat menyoroti kesenjangan aksesibilitas ini dengan kehadirannya pada jabatan tersebut. Mereka juga bisa menyumbangkan usaha pembelaan yang akan berdampak pada prioritas pembiayaan dan pemerintahan.

Praktek Baik

NDI menyediakan bantuan bagi *Poraka*, sebuah DPO Makedonia yang mewakili orang-orang dengan disabilitas intelektual, dalam menyusun dan memndorong perjanjian bagi partai-partai untuk meratifikasi CPRD dalam 100 hari sejak pembentukan pemerintah yang baru. *Poraka* menggunakan persetujuan yang ditandatangani untuk menarik liputan pers yang meluas akan kebutuhan untuk meratifikasi CRPD. Setelah kampanye ini, Dewan Makedonia dengan suara bulat meratifikasi CRPD. Kampanye sukses ini mengangkat profil DPO sebagai aktor ormas yang memiliki kemampuan, sehingga menunjukkan persepsi baik akan orang-orang dengan disabilitas sebagai warga negara yang berdaya.

Membangun kapasitas DPO

Telah dicatat bahwa kapasitas DPO seringkali lebih rendah dari kapasitas ormas lain. Alasannya beragam, namun seringkali karena rendahnya pendidikan gara-gara sekolah dan sumber-sumber yang tidak aksesibel. Karenanya, dukungan berlebih diperlukan dalam pelatihan dalam penganggaran dan manajemen proyek. Organisasi pelaku implementasi bersama DPO harus merencanakan tambahan penjatahan waktu kerja staf dan sumber-sumber. Pelatihan bisa dilakukan dalam masa manapun siklus pemilu, namun yang ideal adalah jauh sebelum pelaksanaan pemilu.

Selain keterampilan dasar manajemen proyek, DPO umumnya kurang kemampuan dalam pemilu dan dalam perpotongan antara proses politis dan disabilitas. Kecualian dalam hal ini adalah Indonesia, yang memiliki DPO: Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA) yang melakukan advokasi untuk hak politis dan hak memilih bagi orang dengan disabilitas. DPO ini didirikan setelah kejatuhan seorang diktator, karena komunitas disabilitas tidak mau tertinggal dalam memajukan demokrasi. Kebanyakan DPO memerlukan pelatihan dalam proses pemilu, CRPD dan peraturan lokal yang relevan, sebelum mereka bisa mengimplementasikan demokrasi dan perancangan pemerintahan sebelum mereka bisa menjadi pelaku advokasi yang efektif.

Seringkali diperlukan pelatihan DPO dalam advokasi berdasarkan hak. Banyak DPO hanya berfokus pada penyediaan layanan dan pelatihan advokasi berdasarkan hak akan bermanfaat bagi mereka.

Bersamaan dengan kontak langsung dengan BPP, untuk memastikan implementasi peraturan yang ada diperlukan advokasi yang ditargetkan pada anggota parlemen dan komisi legislatif yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan BPP. Ini bukan hanya memberi ruang gerak tambahan untuk akses setara, namun akan memastikan bahwa pembuat peraturan tidak akan menghambat kemajuan yang telah dicapai dengan BPP dan memperluas jejaring pembuat keputusan yang akrab dengan hambatan yang dihadapi seorang dengan disabilitas. Dalam banyak demokrasi yang masih berkembang proses pengawasan legislatif sering masih dalam tahap awal, menjadikan peluang bagi DPO untuk menetapkan preseden yang positif. Program bantuan bagi DPO dalam advokasi inisiatif akan mendapat manfaat dari membangun kapasitas DPO dalam berinteraksi dengan BPP, pembuat peraturan, dan badan-badan hak azasi nasional.

Kriteria Seleksi Komisioner KPU

Calon komisioner KPU harus memenuhi sejumlah kriteria seleksi, tetapi pengetahuan tentang kebijakan dan prosedur yang inklusif disabilitas tidak pernah dievaluasi. Beberapa BPP, seperti Philippines Commission on Elections (COMELEC), menunjuk seorang komisioner khusus yang bertanggung jawab akan hak-hak disabilitas. Akan tetapi komisioner ini tidak selalu memiliki latar belakang disabilitas.

Pendidikan Kewarganegaraan yang Inklusif

Pendidikan kewarganegaraan harus dilakukan sepanjang siklus Pemilu, tetapi dalam manual ini dibahas dalam bagian pasca pemilu, karena ini adalah masa yang berguna untuk merefleksikan pemilu yang baru lalu dan kesenjangan yang ada dalam pengetahuan akan pemilu. Pendidikan kewarganegaraan menggambarkan hak dan kewajiban warga negara. Mengetahui peran pemerintah, warga negara dan peraturan yang relevan akan

Praktek Baik

Siswa-siswa dari kelas pendidikan kewarganegaraan di Georgia merekam salinan audio dari buku cetak mereka *Democracy and Citizenship* (Demokrasi dan Kewarganegaraan). Mereka menjadi advokat untuk mempromosikan akses kepada pendidikan kewarganegaraan tingkat universitas untuk siswa-siswa dengan disabilitas visual dan telah menyebarkan CD buku tersebut ke pemuda-pemuda tuna netra.

memberdayakan individu untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk masyarakat mereka. Di Georgia, IFES mengembangkan materi kewarganegaraan untuk universitas, yang menyoroti hak-hak setiap warga negara, termasuk yang dengan disabilitas. Dalam tulisan akan materi ajar itu, seorang siswa berkata, "Kami tidak melihat orang dengan disabilitas. Sebelumnya kami tidak memikirkan orang-orang ini, namun sekarang tahu bahwa mereka layak mendapat hak sosial, hak pendidikan, dan hak proses pemilihan yang sama. Janganlah masyarakat kita memisah-misahkan antara orang-orang ini."

Selama ini pemenuhan hak dasar orang dengan disabilitas belum difasilitasi sepenuhnya oleh pemerintah, apalagi hak politik.



Mahasiswa-mahasiswa di Georgia merekam buku pendidikan kewarganegaraan dalam CD.



Seorang wanita menunjukkan tinta permanen yang menandai jarinya setelah memilih di Indonesia.

**RAKER / PELATIHAN
PENGHITUNGAN SUARA DI PPS
PILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012
KELOMPOK KERJA KETUA DAN ANGGOTA PPS KOTA JAKARTA
Jakarta, 6 Juli 2012**



Pelatihan Penghitungan Suara di PPS untuk Pemilihan Gubernur di Jakarta, Indonesia.

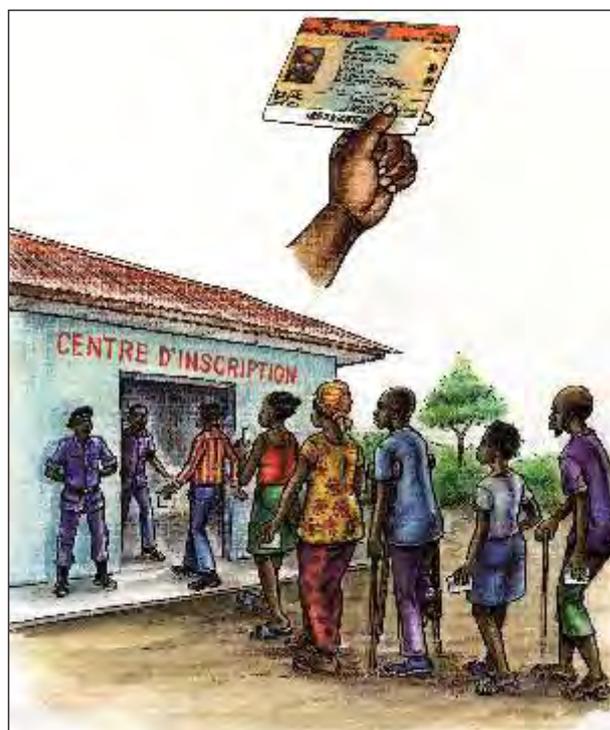
Bagian 5: Tantangan

Ada banyak tantangan dalam implementasi program demokrasi dan pemerintahan. Tidak ada konsensus bagaimana caranya mengatasi sebagian tantangan ini dan dalam berbagai negara situasinya berbeda.

Kurangnya Data

Pengampu kepentingan kekurangan data yang andal dan menyeluruh tentang jumlah orang dengan disabilitas dalam setiap negara. Negara yang menghitung disabilitas dalam sensus nasionalnya memakai definisi yang berbeda-beda dan sering memperkirakan jumlah yang jauh di bawah perkiraan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang 15 percent di seluruh

Dunia Ini bisa menjadikan lebih sukar lagi untuk meyakinkan otoritas lokal dan donatur internasional bahwa keterlibatan disabilitas harus menjadi prioritas, Definisi disabilitas yang berbeda tiap negara juga menjadikannya sukar untuk menetapkan dasar dalam mengawasi dan mengevaluasi program.



Gambar diatas merupakan bagian dari penyuluhan masyarakat mengenai pemilu di DR Congo.

Petugas pendaftaran yang tidak memiliki keberpihakan, seringkali mengabaikan pemilih dengan disabilitas. Petugas tidak mau melakukan asesment yang membutuhkan waktu sedikit panjang.

Diskriminasi

Pejabat pemerintahan, bahkan anggota keluarga membuat asumsi salah akan kemampuan orang-orang dengan disabilitas. Sebuah laporan yang dibuat Vietnamese Hanoi Independent.

Living Center mendapati bahwa dari 50 keluarga dari orang-orang dengan disabilitas yang diwawancarai, setengahnya tidak percaya bahwa orang dengan disabilitas perlu memilih karena mereka “tidak perlu memikirkan masalah politik.⁵⁰” Orang sering berasumsi bahwa sesama warga negara dengan disabilitas tidak bisa menjadi kandidat atau petugas TPS dan karena mereka tidak tertarik pada politik atau politik tidak berpengaruh dalam hidup mereka. Satu alasan mengapa orang dengan disabilitas tidak memiliki KTP nasional atau surat kelahiran adalah karena keluarganya menganggap itu tidak perlu. Anggota keluarga juga terkadang enggan menemani anggota keluarganya yang mungkin membutuhkan bantuan untuk pergi ke TPS atau mereka tidak ada transportasi yang terjangkau. Pendidikan pemilih yang membuat masyarakat umum peka akan hak-hak orang dengan disabilitas akan dapat menghapuskan stereotip demikian.

50 Election Access for Persons with Disabilities in Vietnam. Hanoi Independent Living Center. AGENDA. 2013.

Sehubungan hal diatas, dalam perhelatan demokrasi, orang dengan disabilitas belum mendapat tempat yang layak. Mereka sering terabaikan dalam proses penyelenggaraan demokrasi. Berbagai hambatan lingkungan dan sosial seringkali mengabaikan proses penyelenggaraan pemilu untuk memastikan akses informasi yang seluas-luasnya dalam rangka mendorong partisipasi orang dengan disabilitas dalam menggunakan hak dipilih dan memilih yang cerdas.

“Tidak memilih karena keluarga saya tidak nyaman membiarkan saya pergi karena di tempat itu ada tembakan senjata dan seorang tuna rungu bisa berada dalam bahaya yang lebih besar”

Janeris, wanita muda dengan disabilitas, Republik Dominika

Lingkungan Beroperasi

Dalam beberapa negara, ada ketakutan akan hukuman dari pemerintah kalau membicarakan tentang hak-hak politik. Hal ini tidak spesifik tentang hak-hak disabilitas namun berlaku pada hak-hak politik yang lebih luas. Program hak-hak disabilitas dianggap netral, namun donatur internasional dan organisasi yang mengimplementasikannya harus memberi waktu yang lebih untuk merekrut mitra di tempat mana pembahasan HAM mendapat tantangan lebih.

Wajib Memilih

Beberapa negara punya peraturan yang mewajibkan semua warganya untuk memilih. Karena ketiadaan transportasi, TPS, dan informasi yang aksesibel, terkadang negara yang mewajibkan memilih mengecualikan warga dengan disabilitas atau orang tua dari kewajiban ini.

Dalam tahun 2011, BPP di Peru mencabut lebih dari 20,000 orang dengan disabilitas intelektual dari daftar pemilih. BPP berasumsi mereka tidak akan memilih karena disabilitasnya. BPP percaya bahwa ini adalah langkah yang baik, menghapus mereka dari daftar pemilih artinya mereka tidak akan perlu membayar denda bila tidak memilih. Akan tetapi proses ini dilakukan tanpa konsultasi dan kebijakannya tidak dipublikasi. Akibatnya pemilih datang di hari pemilihan dan mereka tidak bisa memilih karena namanya telah dihapus dari daftar.

BPP yang tidak bisa memenuhi kewajiban CRPD-nya harus membebaskan orang dengan disabilitas atau orang tua yang tidak bisa mengakses TPS dari tekanan kewajiban memilih beserta penalti yang berkenaan dengannya. Akan tetapi, kebijakan yang memungkinkan pembebasan dari penalti tidak boleh dianggap sebagai pengganti dari membuat proses pemilu itu aksesibel. DPO dan tokoh masyarakat lainnya harus terus mengawasi langkah-langkah yang diambil BPP dalam menjadikan proses pemilu menjadi aksesibel dan mengadvokasi keterlibatan penuh semua warga negara.

Kepemimpinan

Orang dengan disabilitas seharusnya tidak hanya menjadi subyek program bantuan, namun juga menjadi peserta aktif dan pemimpin dalam pemerintahannya. Sukar untuk meyakinkan BPP, LSM dan partai politik untuk mempekerjakan orang dengan disabilitas. Terkadang juga susah menemukan orang-orang dengan disabilitas – dan terutamanya yang wanita – yang memiliki percaya diri dan pengetahuan yang diperlukan dalam

menjadi pe-mimpin. Untuk mengatasinya dan menumbuhkan kepemimpinan kuat dengan disabilitas perlu ada dukungan program pelatihan kepemimpinan seperti Building Resources in Democracy, Governance and Elections (BRIDGE)⁵¹.

Rekomendasi atau hasil evaluasi pemilu sebelumnya, tidak di follow-up kepemimpinan KPU periode berikutnya.

Teknologi Aksesibel

Teknologi pemilu, seperti mesin pemilihan elektronik sering diusulkan sebagai jalan keluar yang gampang untuk membuat proses pemilu menjadi lebih aksesibel bagi orang dengan disabilitas. Akan tetapi BPP harus hati-hati memikirkan semua pertimbangan teknis dan logistik sebelum mengajukan opsi teknologi tinggi di negara-negara yang mungkin kurang berkemampuan dalam mengelola teknologi rumit. Dalam kasus demikian, beberapa bentuk sederhana teknologi bisa membuat proses ini lebih aksesibel dengan resiko kecil. Misalnya, di Australia, pemilih yang tuna netra atau berpenglihatan kurang bisa memilih melalui telepon.

Pemilihan online adalah solusi lain yang diusulkan untuk membuat proses ini aksesibel bagi orang dengan disabilitas. Beberapa negara Eropa, seperti Estonia, mengizinkan pemilihan online dan menganggap proses ini lebih aksesibel. Namun, pemilihan online perlu sistem terpercaya selain sumber dan kemampuan teknologi maju, dan ini dalam banyak negara belum tentu ada.

Memonitor dan Mengevaluasi

Dalam mendesain deskripsi program atau permintaan proposal, donatur harus merinci bahwa semua indikator program harus dipilah berdasarkan disabilitas. Data kualitatif untuk keterlibatan disabilitas juga harus dikumpulkan.

Memonitor dan mengevaluasi program keterlibatan disabilitas tidaklah mudah. Telah disebutkan bahwa definisi disabilitas berbeda pada tiap negara. Ada empat



Wanita dengan dan tanpa disabilitas berpartisipasi dalam pelatihan kepemimpinan di Kamboja.

Contoh-Contoh Indikator

Program USAID dalam menopang komunitas disabilitas membutuhkan target, hasil, dan indikator yang disesuaikan dengan tujuan dari program tersebut. Indikator USAID disebut "Standard Foreign Assistance Indicators," atau "F-Indicators." Di bawah ini contoh dari proyek IFES di Libya:

TARGET: Keterlibatan warga meningkat, terutama di antara kelompok yang ter-pinggirkan dan yang kurang terwakili, melalui pemahaman masyarakat yang lebih tinggi akan proses-proses yang berkenaan dengan transisi politik Libya.

HASIL MENENGAH: Pada BPP dan pemangku kepentingan pemilu, ada kesadaran lebih tinggi akan permasalahan inti, kebutuhan dan hambatan orang dengan disabilitas dalam mengakses proses pemilu.

INDIKATOR HASIL (penyesuaian IFES): Jumlah rekomendasi yang diajukan kepada BPP dan pemangku kepentingan pemilu untuk adaptasi prosedur pemilihan dalam mengatasi kebutuhan orang dengan disabilitas

INDIKATOR HASIL (F-Indicator): Jumlah LSM penerima bantuan USG yang terlibat dalam advokasi intervensi.

51 Building Resources in Democracy, Governance and Elections. <<http://bridge-project.org>>

jenis definisi berbeda yang dapat dipakai: negara tuan rumah, negara mitra implementasi, negara donatur, atau WHO. Kurangnya definisi yang umum diterima secara global mengakibatkan inkonsistensi dalam membandingkan informasi.

Donatur sering tidak punya indikator yang spesifik disabilitas, jadi beberapa mitra implementasi mengembangkan sendiri indikatornya. Meskipun ini berguna bagi proyek tersebut, namun membuatnya menjadi lebih susah untuk donatur dan organisasi yang mengimplementasikannya dalam merekam dampak dari semua pemrograman ini.

Selain dalam dasar memonitor dan mengevaluasi, donatur harus mendorong penilaian dampak pemrograman pada orang-orang dengan disabilitas. Mereka juga bisa memetakan apakah pemrograman keterlibatan disabilitas berdampak luas pada masyarakat, seperti adanya perubahan sikap sosial, keterbukaan pemerintah terhadap orang dengan disabilitas atau proses politik yang lebih terbuka.

Berbagi Pembelajaran

Pasal 32 dari CRPD menyerukan kerjasama internasional melalui pertukaran informasi dalam pengalaman dan praktek terbaik. Ini termasuk memastikan program bantuan internasional aksesibel dan inklusif orang-orang dengan disabilitas, dan pembelajarannya dikumpulkan serta disebar-luaskan. Contoh-contoh bagus pemilu inklusif dan pemrograman proses politik terjadi di seluruh dunia, tetapi DPO dan pemerintahan sering memulai dari awal. Untuk mengatasi kesenjangan ini, situs web IFES www.ElectionAccess.org⁵² berfungsi sebagai alat advokasi dan pendidikan yang aksesibel bagi orang-orang dengan disabilitas di seluruh dunia. Situs web menampilkan peraturan internasional dan nasional yang berkenaan dengan partisipasi politik orang-orang dengan disabilitas dan menyoroti contoh-contoh bahan pendidikan pemilih inklusif dan alat bantu seperti bantuan surat suara taktil.

52 www.ElectionAccess.org International Foundation for Electoral Systems. <<http://www.ElectionAccess.org>



Seorang pelajar ikut serta untuk menjadi pengawas pemilu di Republik Dominika.



Seorang pemilih memperbaharui informasi pendaftarannya di Republik Dominika.

Bagian 6: Studi Kasus Republik Dominika

Pemangku Kepentingan Utama:

- Organisasi orang-orang dengan disabilitas
- Badan penyelenggara pemilu
- IFES
- Kelompok-kelompok pemantau pemilu nasional
- Partai-partai politik dan para calonnya
- Dewan Nasional Orang-orang dengan Disabilitas

Garis Besar

Menurut WHO, lebih dari 1.5 juta warga Dominik menyandang disabilitas. Warga tersebut jarang diikutsertakan dalam proses pemilu dan politik. Bersama dengan mitra kerja Organisasi Orang-Orang dengan Disabilitas Republik Donminik, *La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física* (La Red), IFES bekerja untuk meningkatkan kesadaran hak-hak politik warga Dominik penyandang disabilitas. Program ini, yang menargetkankan berbagai pemagku kepentingan (termasuk komunitas penyandang cacat, BPP, partai politik dan calon-calon), berusaha untuk mengatasi isu ini dan menyoroti komitmen-komitmen yang dibuat oleh Republik Dominik ketika meratifikasi CPRD pada tahun 2009.

IFES dan La Red bekerja bersama pada proyek berumur dua tahun sebelum dan sesudah pemilu presiden Mei 2012 untuk mendorong pemungutan suara dan keterlibatan yang lebih dalam kehidupan politik warga penyandang disabilitas. Kasaus studi ini menunjukkan dampak positif kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah dan partai politik.

“Saya sangat yakin bahwa kita akan melihat orang-orang dengan disabilitas berpartisipasi sebagai calon, dan juga banyak pemilih dengan disabilitas yang lainnya, karena ini adalah takdir politik negara kita. Saya pikir yang kita lakukan saat ini akan menyiapkan panggung untuk semua orang berpartisipasi dalam proses pemilu.”

Cristina Francisco, Pendiri Lingkaran Perempuan dengan Disabilitas
(*Circle of Women with Disabilities*), Republik Dominika

Bagaimana Proyek Mengikutsertakan Penyandang Disabilitas di Pemilu dan Kehidupan Politik?

Manajemen - IFES mempekerjakan seorang wanita penyandang disabilitas untuk mengurus proyek dan memberi sub-penghargaan kepada Organisasi Orang-Orang dengan Disabilitas lokal yang menugaskan tim yang semuanya perempuan untuk memimpin proyek. Semua kegiatan dibuat dengan kolaborasi tim ini.

Memorandum of Understanding (MoU) - IFES memfasilitasi penandatanganan MoU antara *Junta Central Electoral (JCE)* dengan 18 DPO lokal. Persetujuan ini, yang paling pertama JCE menandatangani dengan DPO, mempromosikan kerja sama antara grup-grup ini untuk meningkatkan inklusi dan akses penyandang disabilitas.

“*Saya sangat semangat bergabung dengan usaha ini karena termasuk di dalamnya memperhatikan hambatan-hambatan yang dihadapi orang-orang dengan disabilitas seperti saya.*”

Maria del Carmen Guerrero German, siswa berumur 23 tahun dilatih sebagai pengawas pemilu, Republik Dominika

Pelatihan Hak Politik - IFES dan La Red melakukan workshop-workshop pada tingkat daerah dan kotamadya tentang proses dan pentingnya pemungutan suara. Workshop ini mencapai 2.279 penyandang disabilitas. Dua puluh pemimpin DPO kotamadya juga dilatih sebagai fasilitator untuk meningkatkan kesadaran hak pemilu. Sebagai tambahan, kesadaran ditingkatkan melalui distribusi 1.000 poster dan brosur pendidikan pemilih.

Visi –Misi dan Forum Politik – Delapan belas DPO membentuk sebuah kelompok kerja untuk mengembangkan visi-misi politik tentang isu-isu penting termasuk infrastruktur yang mudah diakses dan pendidikan inklusif. Visi-misi ditampilkan ke calon-calon presiden di sebuah forum yang dihadiri empat partai. Setiap calon menandatangani visi-misi sehingga menjanjikan diri untuk melaksanakan ketentuan jika dipilih. Pemerintah calon pemenang telah melaksanakan saran dari dokmumen. Ini termasuk hukum disabilitas nasional, pembangunan tepi jalan di trotoar dan mengembangkan rencana aksi keaksaraan untuk negara.

Pendaftaran Pemilih - IFES dan La Red bekerja sama dengan JCE untuk mengkoordinasikan upaya mengikutsertakan enam perempuan penyandang disabilitas dalam peran kepemimpinan untuk kampanye “Verifikasi” JCE, yang mendesak warga untuk memverifikasi pendaftaran pemilih dan



Poster dan brosur tentang pemungutan suara disebarakan ke seluruh negara, termasuk ke universitas, pusat rehabilitasi, dan pusat komunitas.

informasi TPS. Untuk mencapai warga penyandang disabilitas sebanyak mungkin, IFES menggunakan organisasi seperti Dominican Association of Rehabilitation sebagai pusat kegiatan aktifitas kampanye “Verifikasi”. Sebagai hasil, lebih dari 1.000 orang penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk memastikan detil pendaftaran. Pelatihan Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara – JCE yang bekerja sama dengan La Red dan The National Council on Disability, mendukung pelatihan pelatih untuk 154 petugas yang difokuskan untuk mengelola pilihan penyandang disabilitas. Berbagai teknik khusus diliputi termasuk sebuah unit tentang bahasa isyarat dasar. Pelatih lalu mengajarkan informasi ini ke KPPS di tingkat kota dalam latihan bertahap. Brosur panduan juga dibuat untuk KPPS untuk digunakan pada hari pemilu.



Pemilih memasuki stadium bisbol yang digunakan sebagai TPS pada hari pemungutan suara.

Pendidikan Pemungut Suara – IFES mendukung upaya JCE untuk menargetkan komunitas penyandang disabilitas melalui pembuatan program televisi⁵³. Video ini menghadirkan penyandang disabilitas ikut serta dalam komunitas masing-masing. Untuk pertama kalinya, penyelenggara pemilu menghadirkan bahasa isyarat didalam video mereka. Program pendidikan pemilih ini disiarkan secara luas, mencakup delapan penyiar TV dan website JCE, National Council on Disability dan sebuah calon presiden. Sehari sebelum pemilu, program tersebut merupakan video yang paling banyak ditonton di website JCE. JCE bahkan menghadirkan bahasa isyarat di semua video resmi dan program yang disiarkan di stasiun TV mereka, yang juga merupakan pencapaian pertama lain.

Pemantauan Pemilu Arus Utama - IFES mengarusutamakan keterlibatan penyandang diabilitas dalam upaya pemantauan dengan mendraft tujuh pertanyaan yang ditujukan untuk akses penyandang disabilitas. IFES bekerja sama dengan kelompok pemantau pemilu nasional *Participación Ciudadana* (PC) untuk memasukkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam daftar periksa mereka ketika menyebarkan 3.000 pemantau ke seluruh negeri.

Pemantauan Akses Pemilu - IFES melatih 22 orang penyandang disabilitas, yang mayoritas wanita muda, untuk menjadi pemantau akses pemilu. Pemantau belajar cara menggunakan daftar contrenge khusus yang ditujukan khusus untuk isu akses. Pemantau akses pemilu ditugaskan ke tempat pemungutan suara seluruh negeri pada hari pemilu.

53 “Tu derecho a elegir!” YouTube. Junta Central Electoral, 12 Mei 2012. <http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZojfAqP8K_U>.

Saran Untuk JCE – Berdasarkan halangan-halangan yang teridentifikasi di laporan pemantauan akses pemilu, IFES dan La Red menyiapkan saran-saran untuk JCE tentang cara membuat pemilu di masa depan lebih dapat diakses. JCE dengan giat mencari saran DPO dan National Council on Disability tentang cara meningkatkan proses.

Pelatihan BPP – JCE meminta 155 karyawannya dari seluruh negeri untuk menghadiri pelatihan sehari penuh tentang keterlibatan kepemiluan yang dipimpin oleh IFES dan La Red. Anggota dari setiap kantor wilayah mengembangkan rencana kegiatan untuk menerapkan hasil latihan.

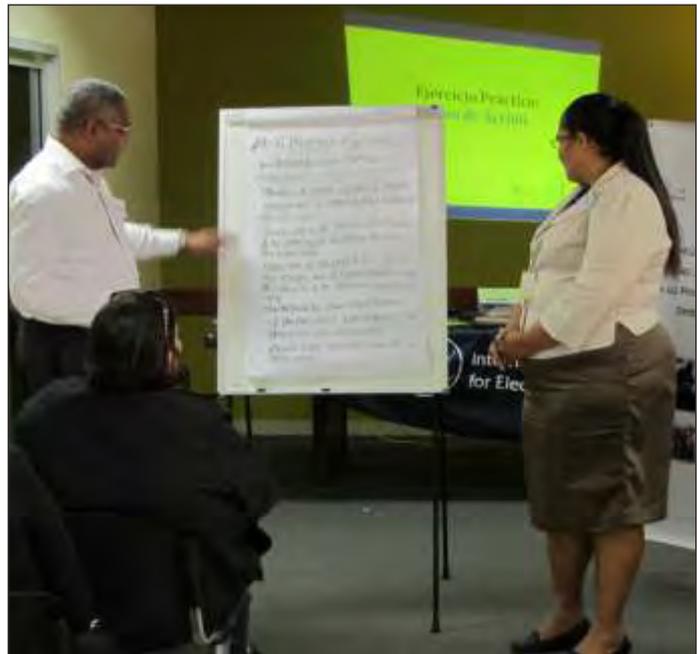
Pelatihan Pemuda Penyandang Disabilitas - Pemuda penyandang disabilitas tidak terlibat secara aktif dalam DPO atau ikut serta dalam kehidupan politik dalam komunitas mereka. Dalam rangka membantu para pemuda ini mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menjadi pemimpin masa depan, IFES dan La Red melaksanakan pelatihan pembangunan kemampuan memimpin selama dua hari yang ditujukan ke 16 anggota bermunculan dari provinsi-provinsi seluruh negeri. Ini adalah pertama kali peserta terpapar oleh suatu pelatihan yang dapat membuat mereka mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan komunikasi. Sebagai hasil dari pelatihan ini, delapan peserta luar biasa memperoleh pelatihan tambahan teknik komunikasi sehingga mereka dapat berbicara di komunitas mereka tentang hak penyandang disabilitas dan menjelaskan hukum nasional disabilitas baru.

Berbagi Pelajaran yang Diambil - La Red memproduksi sebuah buklet⁵⁴ tentang pelajaran yang dipelajari ketika berinteraksi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat sipil. Mereka telah membagi produk ini dengan DPO dan BPP di seluruh wilayah.

Tantangan dan Pelajaran

Komunitas penyandang disabilitas dibagi dengan dua cara : antara kelompok yang mewakili berbagai jenis disabilitas dan antara masyarakat sipil beserta Dewan Disabilitas Nasional. Mengajak komunitas disabilitas untuk bersama-sama merancang visi-misi politik membantu menyatukan komunitas mengenai isu-isu penting untuk mereka semua dan memaksakan isu-isu tersebut ke agenda politik pemerintah. Hasilnya, komunitas DPO menyaksikan disahkannya hukum disabilitas nasional beserta pengantar sebuah program “Perlindungan Sosial Orang Penyandang Disabilitas”, yang termasuk langkah khusus untuk meningkatkan kondisi hidup dan sosial penyandang disabilitas.

- Terdapat jumlah karyawan DPO yang terbatas untuk melaksanakan pemilu dan kegiatan proses politik.
- BPP dan petugas pemerintah lain sering tidak menyadari dampak CPRD ke pekerjaan mereka.
- Partai politik terbuka untuk melibatkan penyandang disabilitas, namun ragu-ragu untuk mengikutsertakan mereka sebagai pimpinan partai atau calon.



Di akhir pelatihan, ofisial JCEmpresentasikan rencana tindakan tentang cara mereka membuat proses pemilu lebih aksesibel di daerah mereka.

54 Project: “Right to Choose” Manual for Best Practices and Lessons Learned. International Foundation for Electoral Systems. La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad, 12 Mei 2012. <<http://www.IFES.org/~media/FBD32B2B184542CDA3D753431C4331C3.pdf>>.

Ketegangan antara pemerintah dengan komunitas Haiti di Republik Dominik⁵⁵ membuat beberapa aspek dari proyek, seperti pendaftaran pemilih, menjadi isu politik sensitif.

Dampak

MoU yang ditandatangani antara DPO dan JCE menghasilkan sebuah forum dimana isu akses dapat didiskusikan.

Untuk pertama kalinya, warga Dominika tuna rungu dapat mempelajari proses kepemiluan dari program TV harian JCE dikarenakan tersedianya interpretasi bahasa isyarat pada setiap siaran.

Pertanyaan khusus disabilitas dimasukkan ke dalam daftar pemantau nasional yang digunakan di seluruh negeri.

Hukum disabilitas nasional disahkan pada Februari 2013. Visi-misi dan forum politik, yang dikembangkan dan dilaksanakan melalui proyek ini, menjadi faktor penting dalam pengesahan hukum. Hukum baru mengakui komitmen CPRD Republik Dominik dan memperkuat National Council on Disability dengan membuat kantor daerah dan provinsi.

JCE sekarang memiliki orang yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas keterlibatan penyandang disabilitas yaitu, Deputy of Elections.

Rekomendasi

Pelaksana proyek menemukan aspek-aspek berikut kunci dalam keberhasilan kegiatan:

- Melibatkan orang dengan berbagai jenis disabilitas dalam rancangan dan implementasi proyek.
- Mempekerjakan orang penyandang disabilitas di posisi-posisi kepemimpinan, seperti manajer proyek, pemantau pemilu, staf EMB sementara dan pelatih.
- Membangun kerjasama antara DPO, EMB, partai politik, dan kelompok pemantau pemilu.
- Menyediakan panduan khusus untuk otoritas pemerintah dan masyarakat sipil tentang cara mereka dapat lebih inklusif.
- Identifikasi advokat di dalam EMB yang memiliki kemauan dan pengaruh politik untuk memperjuangkan keterlibatan dan aksesibilitas penyandang disabilitas.



Setelah menggunakan plantilla untuk memilih, seorang pria memasukkan surat suaranya.

55 "Dominican Republic Overview." World Directory of Minorities and Indigenous Peoples. Minority Rights Group International. <<http://www.minorityrights.org/2565/dominican-republic/dominican-republic-overview.html>>.



Seorang pemilih dari Filipina pada hari pemungutan suara.

Lampiran: Tonggak Pencapaian Akses Pemilu

Di bawah adalah kutipan tonggak pencapaian internasional dan regional dalam jalan menuju keterlibatan penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan politik. Untuk teks penuhnya, silahkan melihat link.

Desember 1948 - Universal Declaration of Human Rights⁵⁶ - Pasal 21

1. Setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.
2. Setiap orang memiliki hak setara untuk memperoleh pelayanan publik di negaranya.
3. Kehendak rakyat menjadi dasar otoritas pemerintahan; kehendak ini akan diekspresikan dalam pemilu periodik dan asli yang akan dilaksanakan dengan hak pilih universal dan sama dan akan dilaksanakan dengan pemungutan suara rahasia atau prosedur pemungutan suara bebas yang setara.

Maret 1976 - International Covenant on Civil and Political Rights⁵⁷ - Pasal 25

Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan tidak masuk akal:

- a. Untuk terlibat dalam pelaksanaan urusan publik, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas
- b. Untuk memilih dan dipilih dalam pemilu periodik dan asli yang akan dilaksanakan dengan hak pilih universal dan sama dan dilaksanakan dengan surat suara rahasia, menjamin kebebasan berekspresi kehendak dari pemilih.
- c. Untuk mendapatkan akses, dengan persamaan dalam arti umum, layanan publik di negaranya.

September 2001 - Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities⁵⁸ - Pasal 3

Untuk mencapai tujuan konvensi ini, pihak negara melakukan:

1. Untuk melaksanakan tindakan legislatif, sosial, kependidikan, ketenagakerjaa, atau tindakan-tindakan lain yang dibutuhkan untuk menghapus diskriminasi kepada orang penyandang disabilitas dan untuk mendorong pemersatuan penuh ke dalam masyarakat, termasuk namun tidak terbatas kepada:

56 "The Universal Declaration of Human Rights." United Nations. <<http://www.un.org/en/documents/udhr/>>.

57 United Nations Human Rights, "International Covenant on Civil and Political Rights." <<http://www.ohchr.org/en/>>

58 "Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities." Organization of American States. <<http://www.oas.org/juridico/english/signs/a-65.html>>.

- a. Tindakan untuk menghapus diskriminasi secara perlahan-lahan dan untuk mendorong pemersatuan oleh otoritas pemerintah dan/atau pihak swasta dalam penyediaan barang, jasa, fasilitas, program, dan aktifitas seperti pemekerjaan, transportasi, komunikasi, perumahan, rekreasi, pendidikan, olahraga, penegakkan hukum dan administrasi keadilan, serta kegiatan politik dan administrasi.

Mei 2008 - Convention on the Rights of Persons with Disabilities⁵⁹ - Pasal 29

Pihak Negara akan menjamin kepada penyandang disabilitas hak politik beserta kesempatan untuk menggunakannya pada tingkat yang setara dengan orang lain dan akan melakukan:

- (a) Memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat ikut serta dalam kehidupan publik dan politik secara efektif dan penuh pada tingkat yang sama dengan yang lain, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih, inter alia, dengan:
 - (i) Memastikan prosedur, fasilitas, dan bahan pemungutan suara sesuai, mudah diakses serta mudah dipahami dan digunakan;
 - (ii) Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih dengan menggunakan surat suara rahasia baik di pemilu maupun di referendum umum tanpa intimidasi, dan untuk mencalonkan diri, untuk dengan efektif memegang kekuasaan dan melaksanakan semua tugas publik pada setiap tingkat pemerintahan, dengan menyediakan teknologi baru dan membantu dimana tepat;
 - (iii) Menjamin kebebasan ekspresi dari kehendak penyandang disabilitas sebagai pemilih hingga, dimana dibutuhkan, atas permintaan mereka, memperbolehkan bantuan dalam pemungutan suara oleh orang pilihan mereka;
- (b) Mendorong secara aktif lingkungan dimana penyandang disabilitas dapat ikut serta secara efektif dan penuh dalam masalah urusan publik, termasuk:
 - (i) Partisipasi dalam lembaga swadaya masyarakat dan asosiasi yang perhatian dengan kehidupan publik dan politik negara, beserta kegiatan dan administrasi partai politik;
 - (ii) Membentuk dan bergabung dengan organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili orang penyandang disabilitas pada tingkat internasional, nasional, regional dan lokal.

Mei 2010 - European Court of Human Rights - Kiss v. Hungary⁶⁰

(ii) Proporsionalitas

39. Pengadilan tinggi mencatat bahwa keterbatasan yang dimaksud tidak membedakan antara mereka yang berada dalam perwalian penuh dan mereka yang berada dalam perwalian sementara (lihat paragraf 11 diatas), dan dihilangkan ketika perwalian dimatikan (lihat pengajuan Pemerintah di paragraph 27 diatas yang tidak disengketakan pemohon). Namun, Pengadilan memerhatikan penegasan pemohon pada paragraf 29 diatas, tidak disengketakan oleh Pemerintah, bahwa 0,75% dari penduduk Hungary yang berhak memilih menjadi perhatian pencabutan hak yang dikarenakan berada dalam perwalian yang sembarangan. Pengadilan menemukan ini angka yang berarti dan tidak dapat menyatakan bahwa batasan hasilnya dapat diabaikan.

59 The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol. International Foundation for Electoral Systems, 2012. <[http://www.IFES.org/~media/Files/Publications/Books/2012/CRPD Final.pdf](http://www.IFES.org/~media/Files/Publications/Books/2012/CRPD%20Final.pdf)>.

60 Alajos Kiss v. Hungary. European Court of Human Rights. May 20, 2010. Case of Alajos Kiss v. Hungary. European Court of Human Rights. <<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-98800>>.

40. Pemerintah bergumentasi, berdasarkan margin apresiasi, bahwa seharusnya diperbolehkan untuk legislasi untuk membuat peraturan memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kemampuan menilai akibat dari tindakan mereka dan membuat keputusan secara sadar dan bijaksana yang dapat berpartisipasi dalam urusan publik.
41. Pengadilan menerima bahwa ini merupakan wilayah dimana, secara umum, margin apresiasi lebar harus diberikan ke legislasi nasional dalam menentukan apakah batasan hak pilih dapat dibenarkan dalam masa modern dan, jika iya, bagaimana keadilan seimbang dapat dicapai. Khususnya, pihak legislatif seharusnya menentukan prosedur apa yang harus dibuat untuk menilai kemampuan memilih penyandang disabilitas mental. Pengadilan memerhatikan bahwa tidak ada bukti dari legislatif Hungary untuk menimbang kepentingan bersaing atau untuk menilai proporsionalitas batasan yang berdiri.
42. Pengadilan, namun, tidak dapat menerima bahwa batasan absolut untuk pemungutan suara oleh siapapun yang berada dalam perwalian sebagian, terlepas dari kemampuannya, berada dalam margin apresiasi. Tentunya, walaupun Pengadilan menegaskan ulang bahwa margin apresiasi ini lebar, ini tidak mencakup semua (*Hirst v. the United Kingdom (no. 2)* [GC], op. cit., § 82). Sebagai tambahan, jika batasan kepada hak fundamental dilakukan kepada kelompok rentan dalam masyarakat, yang telah merasakan diskriminasi cukup banyak di masa lalu, seperti penyandang disabilitas menta, maka margin apresiasi Pemerintah cukup menyempit dan harus memiliki alasan yang cukup berta untuk pembatasan yang dimaksud (cf. juga merupakan contoh penderita perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin – *Abdulaziz, Cables dan Balkandi v. the United Kingdom*, 28 Mei 1985, § 78, Series A no. 94, race – *D.H. dan lainnya v. the Czech Republic* [GC], no. § 182, ECHR 2007-..., atau orientasi seksual – *E.B. v. France* [GC], no. § 94, EHCR 2008-...). Alasan pendekatan ini, yang mempertanyakan beberapa klasifikasi, adalah bahwa kelompok-kelompok tersebut secara historis menjadi korban prasangka dengan dampak berjangka panjang, mengakibatkan eksklusi sosial kelompok tersebut. Prasangka tersebut dapat menyebabkan pelabelan legislatif yang melarang penilaian individual akan kemampuan dan kebutuhan mereka (cf. *Shtukaturov v. Russia*, no. § 95, 27 March 2008).
43. Pemohon dalam kasus ini kehilangan hak untuk memilih sebagai akibat dari pembebanan sebuah batasan otomatis dan menyeluruh atas nama mereka yang berada dalam perwalian sementara. Beliau lalu, dapat menuntut sebagai korban dari perlakuan tersebut. Pengadilan tidak dapat spekulasi apakah pemohon akan tetap kehilangan hak memilih jika batasan yang lebih terbatas pada hak penyandang disabilitas mental dikenakan oleh kebutuhan Pasal 3 dari Protokol No. 1 (lihat *mutatis mutandis Hirst v. the United Kingdom (no. 2)*, op.cit, §§ 48 to 52).
44. Pengadilan mempertimbangkan dengan lebih lanjut bahwa perlakuan sebagai satu kelompok dari mereka penyandang disabilitas intelektual atau mental merupakan klasifikasi yang dipertanyakan, dan pembatasan hak mereka harus diberi pengawasan ketat. Pendekatan ini tercermin dalam alat hukum internasional, sebagaimana yang dimaksud diatas (paragraf 14-17). Pengadilan lalu, menyimpulkan bahwa penghapusan hak memilih sembarangan, tanpa evaluasi hukum individual dan hanya berdasarkan disabilitas mental yang mengharuskan perwalian sebagian, tidak dapat dikonsiderasi sesuai dengan asas dasar pembatasan hak memilih. Telah terjadi penyelewengan Pasal 3 dari Protokol No. 1 kepada Konvensi.

November 2011 - Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community⁶¹

Kami, Masyarakat, dari Anggota Negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), diwakili oleh Kepala Negara atau Pemerintahan Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrat Rakyat Lao, Malaysia, Myanmar Serikat, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosial Vietnam...

Dengan ini menyatakan untuk:

7. Mendorong partisipasi penyandang disabilitas pada semua aspek perkembangan termasuk kegiatan politik dengan menyediakan mereka hak politik sama dalam pemilu pemimpin dan parlemen, baik di tingkat lokal maupun nasional.

November 2011 - Council of Europe Recommendation CM/Rec(2011)14 of the Committee of Ministers to Member States on the Participation of Persons with Disabilities in Political and Public Life⁶²

2.4. Prosedur, tempat pemungutan suara dan fasilitas pemilihan suara

Anggota negara harus memberi perhatian khusus kepada pentingnya aksesibilitas peraturan dan prosedur sebelum dan sesudah pemilu pada setiap tingkat, beserta pada saat lain dimana warga diajak untuk partisipasi dalam urusan publik. Kertas surat suara dan fasilitas aksesibel sebaiknya disediakan pada saat pemilihan suara. Informasi mengenai aksesibilitas prosedur, surat suara dan fasilitas pemilihan suara, melalui format komunikasi yang mudah dibaca dan dipahami, sebaiknya disebarluaskan diawal, untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik.

Prinsip Desain Universal dapat membantu untuk memastikan penghalang yang menghambat akses ke lingkungan fisik, barang dan jasa, informasi dan komunikasi, terutama dalam hal prosedur dan surat suara pemilihan suara, dihilangkan dan agar tidak diciptakan hambatan baru. Tujuan dan langkah spesifik yang tertera dalam Garis Langkah No. 6 “lingkungan buatan”, No. 7 “Transport”, No. 3 “Informasi dan komunikasi” dan, sebagaimana mestinya, ketentuan dari pasal yang relevan dari UNCPRD, terutam 9 “Aksesibilitas”, 21 “Kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan akses untuk informasi” dan 13 “Akses untuk keadilan” sebaiknya digunakan untuk memandu langkah yang akan dilakukan dalam mengejar tujuan aksesibilitas menyeluruh sebagaimana dijelaskan diatas.

3. Non-diskriminasi dalam pelaksanaan kapasitas legal

Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan pada Garis Langkah No. 12 “Perlindungan legal” dari Council of Europe Disability Garis Langkah 2006-2015 dan, sebagaimana mestinya, Pasal 12 “Pengakuan sama di mata hukum” dari UNCPRD, anggota negara sebaiknya memastikan bahwa legislasi secara keseluruhan tidak mendiskriminasi kepada penyandang disabilitas dalam kehidupan politik dan publik. Mereka sebaiknya memberi dukungan tersedia kepada orang yang membutuhkan bantuan menggunakan kapasitas legalnya dalam semua aspek kehidupan, terutama ketika melaksanakan hak memilih, yang merupakan hak universal, terutama menurut ketentuan Pasal 29 UNCPRD, sebagaimana alat internasional legal dimana anggota negara adalah bagian. Anggota negara sebaiknya memastikan bahwa legislasi tidak memiliki, pada semua tingkat,

61 “Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community.” Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community. Association of Southeast Asian Nations. <http://www.asean.org/archive/documents/19thsummit/Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf>.

62 “Recommendation CM/Rec(2011)14 of the Committee of Ministers to Member States on the Participation of Persons with Disabilities in Political and Public Life.” Council of Europe. <<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1871285&Site=CM>>.

ketentuan-ketentuan yang menghilangkan hak memilih atau mencalonkan diri penyandang disabilitas.

Semua orang penyandang disabilitas, baik fisik, sensorik, atau penghambat intelektual, masalah kesehatan mental atau penyakit kronis, memiliki hak memilih atas dasar yang sama dengan warga lain, dan agar tidak dihilangkan hak ini melalui hukum apapun yang membatasi kemampuan legal mereka, oleh keputusan hukum apapun atau keputusan lain atau oleh pengukuran lain yang berdasarkan disabilitas mereka, kemampuan kognitif atau kapasitas asumsi. Semua orang penyandang disabilitas juga berhak untuk memegang kekuasaan pada dasar yang sama dengan yang lain dan sebaiknya tidak dihilangkan hak ini oleh aturan apapun yang membatasi kemampuan legal mereka, oleh keputusan hukum apapun atau keputusan lain atau oleh pengukuran lain yang berdasarkan disabilitas mereka, kemampuan kognitif atau kapasitas asumsi, atau oleh cara lain.

Anggota negara sebaiknya memastikan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas dilarang di semua bidang kehidupan politik dan publik, terutama dalam hal pemilihan suara, mencalonkan diri, melaksanakan mandat dan/atau aktif dalam partai politik atau lembaga swadaya masyarakat, atau melaksanakan kewajiban publik. Kegiatan diskriminasi tersebut termasuk kegagalan untuk mematuhi kewajiban untuk memberikan akomodasi wajar (lihat poin 2 di atas, "Aksesibilitas") untuk orang penyandang disabilitas sehingga mereka dapat menikmati hak politik mereka sepenuhnya.

Desember 2011 - Revised Venice Commission Interpretative Declaration to the Code of Good Practice in Electoral Matters on the Participation of People with Disabilities⁶³

I. Kode Praktik Baik dalam Kepemiluan, sebagaimana diangkat oleh Komisi Eropa untuk Demokrasi Melalui Hukum (Komisi Venice) pada Oktober 2002, menyatakan bahwa "Lima prinsip yang mendasari warisan pemilu Eropa adalah universal, setaral, bebas, rahasia dan hak pilih langsung" (item I). Kode juga menyatakan dengan lebih lanjut di item I.1.1 bahwa "Hak pilih universal secara prinsip berarti bahwa semua manusia memiliki hak memilih dan mencalonkan diri."

1. Maka orang penyandang disabilitas seharusnya dapat melaksanakan hak memilih mereka dalam kehidupan politik dan publik sebagai perwakilan terpilih pada dasar yang sama dengan warga lain. Partisipasi seluruh masyarakat di kehidupan politik dan publik dan proses demokrasi tersebut penting dalam pengembangan masyarakat demokratis.

II. Berikut melengkapi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Kode

1. Hak pilih universal

2. Hak pilih universal merupakan prinsip fundamental dari Warisan Pemilu Eropa. Orang penyandang disabilitas tidak dapat didiskriminasi dalam hal ini, sesuai Pasal 29 dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Penyandang Disabilitas⁶⁴ dan kasus hukum Pengadilan Eropa tentang Hak Asasi Manusia⁶⁵.
3. Prosedur dan fasilitas pemilihan suara sebaiknya dapat diakses kepada orang penyandang disabilitas sehingga mereka dapat melaksanakan hak demokratis mereka, dan membiarkan, dimana dibutuhkan, penyediaan bantuan dalam pemilihan suara, berdasarkan prinsip bahwa pemilihan suara harus individual (Kode, item I.4.b).
4. Aplikasi prinsip-prinsip Desain Universal⁶⁶ dan partisipasi langsung dan/atau tidak langsung dari pengguna pada semua tahap desain adalah cara efektif meningkatkan aksesibilitas tempat pemungutan suara dan prosedur pemilu untuk memberikan suara dan memperoleh akses informasi pemilu.

63 Council of Europe and Venice Commission. "Revised Interpretative Declaration to the Code of Good Practice in Electoral Matters on the Participation of People with Disabilities in Elections." December 19, 2011. <[http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD\(2011\)045.aspx](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2011)045.aspx)>.

64 The Convention on the Rights of Persons with Disabilities was adopted on December 13, 2006, by the United Nations in New York.

65 European Court of Human Rights, case of Kiss v. Hungary, application No. 38832/06, judgment May 20, 2010. See in particular par. 43-44, with a reference to Article 29 of the UN Convention.

2. Hak pilih setara

5. Prinsip “kesetaraan kesempatan harus dijamin oleh partai dan calon” (Kode, item I.2.3.a). Aplikasi prinsip ini sebaiknya diperluas untuk melingkupi kesetaraan kesempatan untuk orang penyandang disabilitas yang mencalonkan diri.

3. Hak pilih bebas

6. Dalam kewajiban untuk “memperbolehkan pemilih untuk mengetahui daftar dan calon pemilu” (Kode, item I.3.1.b.ii), otoritas publik harus memastikan informasi di atas tersedia dan aksesibel, seluas-luasnya dengan mempertimbangkan prinsip akomodasi wajar⁶⁷, dalam semua format alternatif dalam batasan yang dapat diukur, regulasi legal dan kelayakan realistis. Informasi ini akan mudah dibaca dan dipahami.

4. Hak pilih rahasia

7. Hak orang penyandang disabilitas untuk memilih dengan surat suara rahasia harus dilindungi, inter alia, dengan “menjamin kebebasan ekspresi kehendak orang penyandang disabilitas sebagai pemilih hingga, dimana dibutuhkan, atas kemauan mereka, memperbolehkan mereka menggunakan teknologi pembantu dan/atau dibantu dalam pemilihan suara oleh orang pilihan mereka⁶⁸” dalam kondisi yang memastikan orang terpilih tidak melakukan pengaruh yang tidak semestinya.

December 2011 - UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific- Regional Stakeholder Consultation for the High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons, 2003-2012 (Second Session)⁶⁹

Tujuan 2: Mendorong partisipasi dalam proses politik dan pembuatan keputusan.

Saran berikut dibuat untuk dipertimbangkan:

- (a) Sasaran baru tentang “Peningkatan partisipasi organisasi swadya dan kelompok advokasi keluarga pada organisasi advokasi nasional, sub-nasional dan lokal”
- (b) Mengikutsertakan “pemuda penyandang disabilitas”; “pemuda penyandang disabilitas intelektual”; dan “orang penyandang disabilitas psikososial”; “akomodasi wajar dan pembangunan kemampuan untuk orang penyandang disabilitas beragam untuk melaksanakan hak mereka memilih”; dan “perwakilan organisasi orang penyandang disabilitas beserta anggota keluarga”
- (c) Mencerminkan “partisipasi orang penyandang disabilitas pada badan legislatif daerah dan proses hukum”; “badan pembuat keputusan di sektor pengembangan lain”; keterlibatan dari “kelompok penyandang disabilitas beragam tidak hanya di mekanisme koordinasi nasional, namun juga di mekanisme koordinasi subnasional (provinsi/negara; dan lokal)”

66 Recommendation CM/Rec(2009)8 of the Committee of Ministers to member states on achieving full participation through Universal Design: Universal Design is a strategy which aims to make the design and composition of different environments, products, communication, information technology and services accessible and understandable to, as well as usable by, everyone, to the greatest extent in the most independent and natural manner possible, preferably without the need for adaptation or specialized solutions. The terms “design for all,” “integral accessibility,” “accessible design,” “inclusive design,” “barrier-free design,” “transgenerational design” and “accessibility for all” are regarded as converging towards the term “Universal Design” used in this text.

67 Article 2 - Definitions of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities; “reasonable accommodation” means necessary and appropriate modification and adjustments, not imposing a disproportionate or undue burden, to ensure to people with disabilities the enjoyment of human rights and fundamental freedoms on an equal basis with others.

68 Article 29 (iii) of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities; cf. item II.2 above, and the Code, item I.4.b.

69 “Regional Stakeholder Consultation for the High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons, 2003-2012.” Social Development in Asia and the Pacific. The Social Development Division of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. <<http://www.unescap.org/disability/event/regional>>.

(d) Memasukkan acuan untuk kebutuhan bahan informasi berhubungan pemilu, dan prosedur dibuat aksesibel untuk orang penyandang disabilitas beragam, termasuk pendaftaran orang penyandang disabilitas sebagai pemilih

(e) Menambahkan “Keterlibatan orang penyandang disabilitas beserta organisasinya dalam komisi pemilu nasional atau badan setara”

December 2011 - Thematic study by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on participation in political and public life by persons with disabilities⁷⁰

68. Konvensi Hak Orang Penyandang Disabilitas menjanjikan masa yang baru untuk partisipasi politik penyandang disabilitas. Pasal 29 membutuhkan pihak Negara untuk menjamin kepada orang penyandang disabilitas hak politik beserta kesempatan untuk menikmatinya pada dasar yang sama dengan yang lain. Ketentuan ini tidak meramalkan pembatasan wajar apapun, dan tidak diperbolehkan pengecualian apapun. Pasal 12, yang mengakui bahwa orang penyandang disabilitas menikmati kapasitas legal pada dasar yang sama dengan yang lain pada semua aspek kehidupan, juga tidak menyediakan pengecualian apapun secara prinsip, dan hanya membutuhkan pihak Negara untuk mengambil tindakan sewajarnya “untuk menyediakan akses bagi orang penyandang disabilitas kepada bantuan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan kapasitas legal mereka.”

69. Dapat disimpulkan sesuai dengan Konvensi, eksklusi atau pembatasan hak politik penyandang disabilitas dapat dinyatakan sebagai “diskriminasi dengan dasar disabilitas” dalam pengertian pasal 2 dari Konvensi dan bertentangan dengan Konvensi.

70. Dalam mayoritas negara yang menjawab kuesioner OHCHR, orang penyandang disabilitas psikosial dan intelektual terus dihilangkan hak memilih dan mencalonkan diri atas dasar ketentuan konstitusional atau legal yang menghubungkan hak politik dengan kapasitas legal. Pembatasan tersebut tidak konsisten dengan kewajiban pihak Negara yang terdapat dalam pasal 2, 12 dan 29 dari Konvensi, dan sebaiknya diprioritaskan untuk dihapus dari legislasi dan praktik nasional, sesuai pasal 4, paragraf 1 (a) dan (b), Konvensi. Untuk memastikan orang penyandang disabilitas psikosial atau intelektual dapat melaksanakan hak memilih mereka, pihak Negara sebaiknya mengangkat semua tindakan semestinya, sesuai pasal 12, paragraf 3 dan 29 (a) (iii), untuk menyediakan bantuan yang dibutuhkan kepada orang penyandang disabilitas, termasuk bantuan orang yang dipilih mereka, dalam menggunakan hak politiknya.

71. Pasal 25 dari Perjanjian Internasional tentang Hak Politik dan Sipil sebaiknya diterjemahkan dan diaplikasikan dengan mempertimbang perkembangan hak asasi manusia penyandang disabilitas. Melihat perkembangan ini, Komite Hak Asasi Manusia sebaiknya mempertimbangkan mengulas komitmen umum No. 25 (1996) tentang hak untuk partisipasi dalam urusan publik, hak pemilihan suara dan hak akses sama untuk layanan publik, sehingga mencerminkan evolusi progresif hukum hak asasi manusia internasional dalam bidang ini.

72. Balasan kuesioner memberikan sejumlah contoh positif upaya yang dikeluarkan Negara untuk memastikan orang penyandang disabilitas dapat menggunakan hak memilihnya pada dasar yang setara dengan yang lain. Namun, kuesioner juga menunjukkan bahwa di banyak negara orang penyandang disabilitas terus

70 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. “Thematic study by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on participation in political and public life by persons with disabilities.” United Nations. December 21, 2011. <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SubmissionThematicStudy/A.HRC.19.36_en.doc>.

ditemui sejumlah halangan fisik dan komunikasi, mulai dari tempat pemungutan suara yang tidak aksesibel hingga kekurangan informasi dalam format aksesibel yang menghambat atau membatasi partisipasi yang setara dan efektif dalam melaksanakan urusan publik. Lebih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati hak politiknya dengan setara dan efektif.

73. Pasal 29 (a) (iii) membutuhkan anggota Negara untuk mengangkat tindakan semestinya untuk memperbolehkan penyandang disabilitas yang tidak dapat menggunakan hak memilih secara independen mereka untuk dibantu dalam pemilihan suara oleh orang pilihan mereka. Dalam balasannya, Negara telah menyediakan beberapa contoh penyandang disabilitas dapat peroleh sehingga dapat menggunakan hak pilih mereka. Terutama, mereka mendaftarkan sejumlah cara pemilihan suara alternatif, seperti pemilihan suara pos atau tempat pemungutan suara khusus, yang telah dikembangkan dan diimplementasi untuk mempermudah partisipasi politik orang penyandang disabilitas.
74. Kewajaran tindakan ini harus selalu dinilai melawan kewajiban umum untuk mengikutsertakan orang penyandang disabilitas dalam semua aspek masyarakat untuk mendorong kemandirian, otonomi dan harga diri mereka. Cara alternatif pemilihan suara sebaiknya hanya digunakan dalam kasus dimana tidak dimungkinkan, atau sangat sulit, untuk orang penyandang disabilitas memilih di tempat pemungutan suara. Ketergantungan umum dalam bantuan pemilihan suara tidak akan konsisten dengan kewajiban umum yang dilakukan pihak Negara dibawah pasal 4 dan 29 dari Konvensi.

November 2012 - Bali Commitments on Equal Access to Elections⁷¹

Kami, anggota badan pengurus pemilu, organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat sipil, organisasi dan institut internasional, dan perwakilan kalangan akademika, menyadari orang penyandang disabilitas sering dikesampingkan dalam kehidupan politik di negara mereka dan berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah untuk membuat proses kepemiluan lebih inklusif dan aksesibel.

Kami menegaskan kembali hak dan prinsip yang tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perjanjian Internasional tentang Hak Politik dan Sipil dan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Kami meminta hak untuk partisipasi dalam pemilu yang bebas, adil dan aksesibel dan memilih dengan surat suara rahasia. Hak ini berlaku untuk semua orang termasuk mereka penyandang disabilitas fisik, sensorik, intelektual atau psikososial.

Kami mengenal halangan unik yang dialami setiap negara Asia Tenggara. Kami menyatakan kembali komitmen yang dibuat anggota negara ASEAN dalam Pasal 7 dari Deklarasi Bali tentang Peningkatan Peran dan Partisipasi Penyandang Disabilitas di Komunitas ASEAN.

Kami bertekad untuk menghapus semua jenis diskriminasi kepada partisipasi politik penuh dan setara orang penyandang disabilitas. Mengetahui kewajiban ini, kami setuju untuk bekerja sama untuk memastikan orang penyandang disabilitas memiliki kesempatan sama untuk:

1. Memperoleh kartu identifikasi nasional dan daftar pemilihan suara*
2. Pengakuan sama di mata hukum kepemiluan

71 "Bali Commitments on Equal Access to Elections." International Foundation for Electoral Systems. <[http://www.IFES.org/Content/Publications/Articles/2012/~media/Files/Publications/International Standards/2012/Bali Commitments on Equal Access to Elections_Nov2012.pdf](http://www.IFES.org/Content/Publications/Articles/2012/~media/Files/Publications/International%20Standards/2012/Bali%20Commitments%20on%20Equal%20Access%20to%20Elections_Nov2012.pdf)>.

3. Memperoleh pendidikan pemilih dan sipil serta visi-misi partai politik dalam format aksesibel, seperti bahasa isyarat, Braille, audio, print besar, bergambar dan mudah baca
4. Akomodasi wajar seperti bantuan di tempat pemungutan suara, panduan surat suara taktil, tempat pemungutan suara rendah, kaca pembesar dan pena cengkraman besar
5. Infrastruktur aksesibel seperti lerengan dan tata letak bangunan yang mudah dimanuver oleh para pengguna alat bantu.
6. Perhitungan dan pengumuman hasil pemilu dalam format aksesibel
7. Mengajukan keluhan dan partisipasi dalam penyelesaian sengketa kepemiluan
8. Mengabdikan peran kepemimpinan seperti calon, badan pengurus pemilu, kelompok pelaksana pemungutan suara dan pemantau

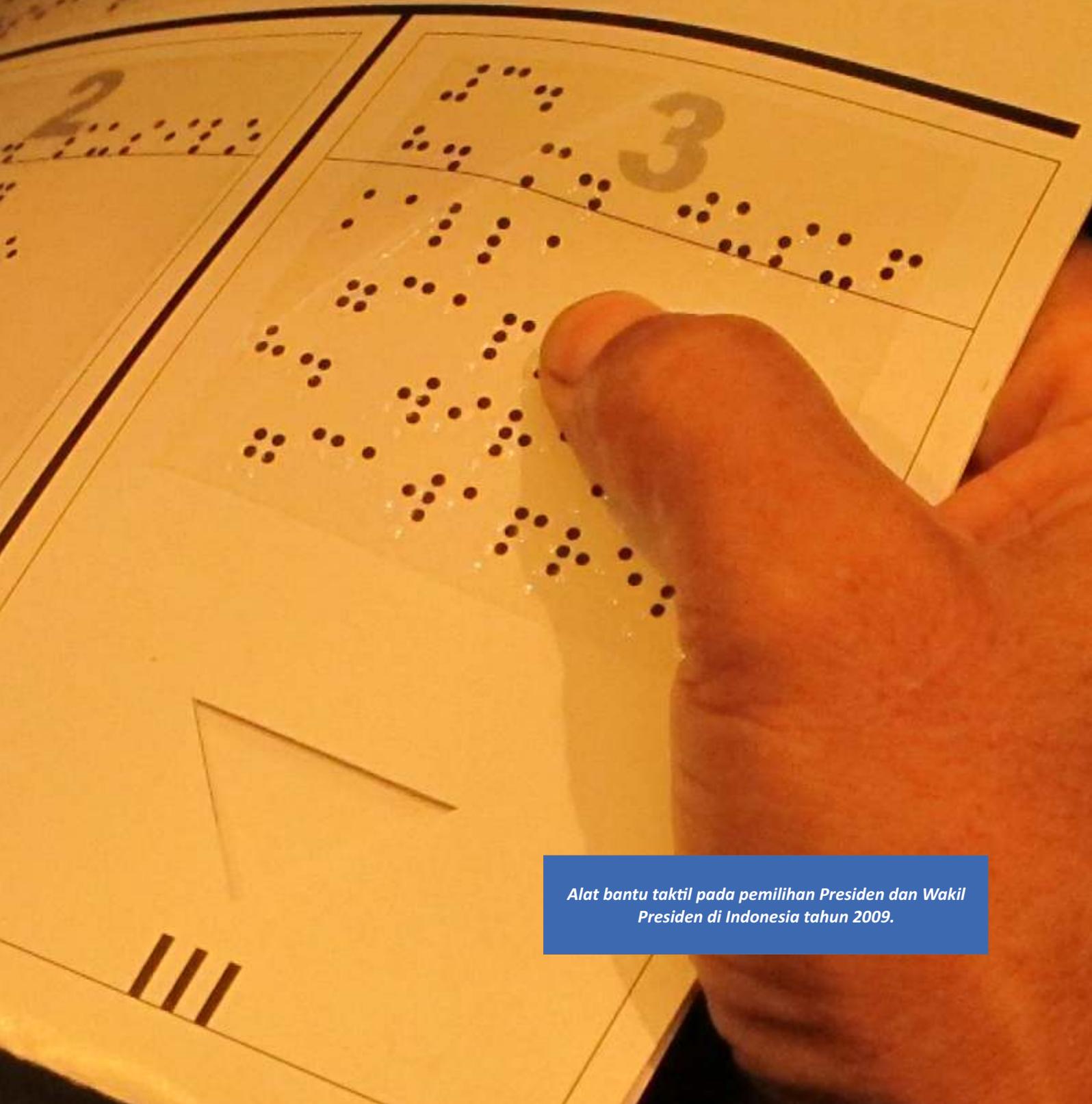
Kami akan kembali ke negara masing-masing dan membagi pengalaman dan hasil konferensi ini dengan pemerintah, organisasi orang penyandang disabilitas, masyarakat sipil, media dan pemangku kepentingan lainnya. Kami mempertegas keinginan kami untuk melanjutkan kolaborasi dan membagi praktik dan pelajaran terbaik dengan sesama.

*Peserta mendorong EMB untuk mengumpulkan informasi mengenai jenis disabilitas pada proses pendaftaran.

SURAT SUARA

PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009



Alat bantu taktil pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia tahun 2009.